



**KONSEP BATAS WILAYAH LAUT  
ANTAR DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL  
SEBAGAI UPAYA PENATAAN TATA RUANG WILAYAH PESISIR**

**T E S I S**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Ajik Sujoko, S.H.  
B4A 006 275**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**KONSEP BATAS WILAYAH LAUT  
ANTAR DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL  
SEBAGAI UPAYA PENATAAN TATA RUANG WILAYAH PESISIR**

**Disusun Oleh :**

**Ajik Sujoko, S.H.  
B4A 006 275**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.H.  
NIP. 131 682 453

**KONSEP BATAS WILAYAH LAUT  
ANTAR DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL  
SEBAGAI UPAYA PENATAAN TATA RUANG WILAYAH PESISIR**

**Disusun Oleh :**

**Ajik Sujoko, S.H.  
B4A 006 275**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 31 Oktober 2008**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui  
Ketua Program

Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.H.  
NIP. 131 682 453

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H.  
NIP. 130 531 702

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- Beruntunglah bagi orang yang diberi ilmu dan mengamalkannya
- *Jer basuki mowo beyo* (Cita-cita yang luhur disertai dengan pengorbanan)

### PERSEMBAHAN :

- *Kedua orang tua dan keluargaku*
- *Keluarga besar Subulassam*
- *Teman-teman seperjuangan*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkat, rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “KONSEP BATAS WILAYAH LAUT ANTAR DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN KENDAL SEBAGAI UPAYA PENATAAN TATA RUANG WILAYAH PESISIR ”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penyusunan tesis ini tidak lepas dari kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Diucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis berdasarkan DIPA Sekretaris Jendral DEPDIKNAS Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun 2008.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S.,Med.Sp.And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang juga sebagai penguji dan *reviewer*.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S., selaku penguji dan *reviewer*.
5. Bapak Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah berkenan membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Ibu Dr. Kushandayani, MSi., selaku penguji dan *reviewer*.
7. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Diponegoro Semarang yang memberikan rekomendasi ijin belajar kepada penulis, khususnya kepada Prof. Dr. F.X. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
8. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum khususnya Kajian Hukum Laut yang memberikan pengetahuan dan ilmunya kepada penulis.
9. Bapak Cahyo Saparianto, selaku Kepala DKP Kota Semarang yang telah berkenan memberikan ijin penelitian kepada penulis dan keterangannya.
10. Ibu Yuli, Bapak Haris, Bapak Suwito, dan Bapak Feri, staf Pemerintah Kota Semarang baik di Bappeda, Biro Sekber Kedungsepur maupun Biro Pemerintahan Umum yang telah memberikan data di pemerintah Kota Semarang guna keperluan penyelesaian tesis ini.
11. Bapak Effendi Awan, staf DKP Propinsi Jawa Tengah yang telah berkenan memberikan ijin penelitian kepada penulis dan keterangannya.

12. Bapak Narno, Ibu Woro dan Bapak Endro Hendiyono, staf Kerjasama dan Otonomi Daerah Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan data di pemerintah Propinsi Jawa Tengah guna keperluan penyelesaian tesis ini.
13. Bapak Prihastoto, Staf Dinas Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan data di pemerintah Propinsi Jawa Tengah guna keperluan penyelesaian tesis ini.
14. Bapak Heri K. Wibisono, Kepala Tata Pemerintahan Umum Kabupaten Kendal telah berkenan memberikan ijin penelitian kepada penulis dan keterangannya.
15. Teman-teman di Kajian Hukum Laut Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu per satu khususnya di Subulassalam.
16. Terima kasih yang tak terhingga kepada staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan semua pihak yang telah membantu penulis, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, Oktober 2008

Penulis

Konsep Batas Wilayah Laut  
antar Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal  
sebagai Upaya Penataan Tata Ruang Wilayah Pesisir

Abstrak

Berdasarkan kewenangan daerah mengelola sumber daya di wilayah laut, sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlunya daerah menata tata ruang khususnya wilayah pesisir. Diketuinya batas wilayah pesisir antar ke dua daerah, dijadikan acuan bagi ke dua pemerintah untuk merencanakan penataan ruang wilayah pesisir yang berbatasan. Pengaturan tata ruang wilayah pesisir dalam UU Nomor 27 Tahun 2007, penataan ruang masuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) pemerintah Propinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota. RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi/Kabupaten/Kota. RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan penataan ruang secara umum menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Mengacu pada batasan wilayah pesisir secara administratif, permasalahan yang kemungkinan akan dapat terjadi adalah ketika daerah akan menentukan wilayah kewenangan di laut.

Dengan metode *yuridis normatif*, mencoba untuk meneliti dan mengemukakan konsep batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan tata ruang wilayah pesisir.

Hasil penelitian sebagai berikut; *pertama*, penegasan batas wilayah laut antar Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal belum dilakukan karena penegasan batas daerah di wilayah darat belum final. Penegasan batas daerah di wilayah laut merupakan perpanjangan setelah penegasan batas darat. Pemerintah daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat menegaskan batas wilayah laut dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. *Kedua*, Konsep pemecahan masalah batas wilayah laut diketahui dari segi teknis penegasan dan bentuk pengaturan batas wilayah laut. Dengan diketahuinya batas wilayah di laut, maka akan jelas pula batas wilayah pesisir ke dua daerah. *Ketiga*, Keputusan Bersama tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur dapat dijadikan landasan yuridis dalam melakukan kerjasama antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal.

Pemerintah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat melaksanakan kerjasama penataan ruang wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah dengan menerapkan kerja sama antar daerah (*regional management*).

Kata kunci: penegasan, batas wilayah laut, wilayah pesisir, penataan ruang, kerjasama



*Concept of Interregional Sea Areas Boundary  
between Semarang City with Kendal Regency  
as an Effort of Ordering of Coastal Areas Spatial Order*

*Abstract*

*Based on the authority of local government to manage resources on the sea areas is based on Article 18 paragraph (3) of the Local Government Act Number 32, 2004 the need of region to ordering its spatial order especially coastal areas. Knowing the boundary of the coastal areas between the two regions, will be used as reference for both local government to set up the spatial ordering of adjacent coastal areas. The coastal areas spatial order arrangement include on the Management Coastal Area and Small Islands Act Number 27, 2007, spatial order include on Small Islands and Coastal Area Zona Plan (RZWP-3K) of Province and/or District/City. This RZWP-3K is then fixed and balanced with the regional spatial order plan (RTRW) Province and/or District/City. RTRW Province and/or District/City is the general implementation of spatial order arrangement based on The Spatial Ordering Act Number 26, 2007.*

*Referring to the restrictions on coastal areas administratively, which will likely be problems can occur is when the region will determine the areas of authority in the sea.*

*By using juris-normative method, try to examine and confront concept of interregional sea areas boundary between Semarang City with Kendal Regency as an effort of ordering of coastal areas spatial order.*

*The results of this study are as follows; first, emphasis of Semarang with Kendal sea boundaries has not been determined, because the land boundaries has not been finished. Emphasis of the sea boundaries area is the prolongation after emphasis of land boundaries. Local government of Semarang and Kendal may emphasis the sea areas boundary by referring to the rule of Minister of Internal Affairs Number 1, 2006 about the Manual of Region Emphasis. Second, The concept of problem solving sea areas boundary known to the technical forms of terms and the setting sea boundaries. By knowing the sea areas boundary, coastal areas boundary to both regions will be very clear. The information of coastal areas boundary will be used as reference for both local government to set up the spatial ordering of adjacent coastal areas. Third, the Joint Decree on Cooperation of Development Program in Kedungsepur region can be used as juridical basis in manifesting co-operation between Semarang and Kendal.*

*Local government of Semarang and Kendal can implement cooperation to set up the spatial ordering of adjacent coastal areas by implementing by applying interregional co-operation (regional management).*

*Keywords : emphasis, sea areas boundary, coastal areas, spatial ordering, co-operation*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. 1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1. 2. Permasalahan.....	13
1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. 4. Metodologi Penelitian .....	15
1. 5. Kerangka Pemikiran .....	18
1. 6. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II .	TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2. 1.	Pengertian Ruang Wilayah Pesisir dan Batasan	
	Pengertian Wilayah Pesisir .....	22
2.1.1.	Pengertian Ruang Wilayah Pesisir.....	22
2.1.2.	Batasan Pengertian Wilayah Pesisir .....	25
	2.1.2.1. Pendekatan Ekologis .....	27
	2.1.2.2. Pendekatan Perencanaan .....	29
	2.1.2.2.1 Jenis Perencanaan .....	31
	2.1.2.2.2 Tingkat-tingkat Perencanaan	
	Daerah.....	33
	2.1.2.3. Pendekatan Administratif .....	37
2. 2.	Wilayah Pesisir Propinsi/Kabupaten/Kota.....	39
2. 3.	Penegasan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah .....	43
	2.3.1. Batas Wilayah Laut .....	43
	2.3.2. Penegasan Batas Wilayah Laut Kewenangan	
	Daerah .....	44
	2.3.3. Metode Penegasan Batas Wilayah Laut	
	Kewenangan Daerah .....	45
	2.3.3.1. Pemilihan Peta, Titik Awal dan Garis Dasar	45
	2.3.3.2. Metode Pengukuran Batas Laut.....	48
	2.3.3.3. Konsep Pemetaan.....	50

2.3.3.4. Pembuatan Peta Batas .....	55
2.3.3.5. Sistem Informasi Geografis .....	56
2. 4. Tinjauan Aspek Penataan Ruang Wilayah Pesisir.....	58
2.4.1. Aspek Penataan Ruang Wilayah Pesisir Menurut UU	
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ..	58
2.4.1.1. Perencanaan Tata Ruang .....	64
2.4.1.2. Pemanfaatan ruang.....	65
2.4.1.3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang .....	66
2.4.2. Aspek Penataan Ruang Wilayah Pesisir menurut UU	
Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah	
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .....	67
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>74</b>
3.1. Konsep Bentuk Pengaturan Batas Wilayah Laut Antar	
Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal	
sebagai Upaya Penataan Ruang Wilayah Pesisir.....	74
3.1.1. Gambaran Umum Penegasan Batas Daerah Kota	
Semarang dengan Kabupaten Kendal .....	74
3.1.2. Pembentukan Tim Penegasan Batas Wilayah	
Daerah di Laut Kota Semarang dengan Kabupaten	
Kendal dan Pelaksana Survey .....	77
3.1.3. Penentuan Batas Secara Kartometri Wilayah Laut	82
3.1.4. Penarikan Luas Kewenangan Wilayah Laut Daerah	

Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal.....	84
3.1.4.1. Tahap Rekonesen .....	84
3.1.4.2. Tahap Pekerjaan Lapangan .....	89
3.1.4.3. Penggambaran Peta Batas .....	92
3.1.5 Pengaturan Batas Laut Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal.....	94
3.1.6. Penegasan Batas Wilayah Pesisir Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal.....	99
3.2. Konsep Pemecahan Masalah Batas Wilayah Laut antar Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai Upaya Penataan Ruang Wilayah Pesisir.....	101
3.2.1. Pemecahan Masalah Batas Wilayah Laut dari Segi Teknis Penegasan .....	103
3.2.2. Pemecahan Masalah Batas Wilayah Laut dari Segi Bentuk Pengaturan .....	106
3.3. Konsep Kerjasama Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai Upaya Penataan Ruang Wilayah Pesisir .....	111
3.3.1. Gambaran Umum Kota Semarang.....	111
3.3.2. Gambaran Umum Kabupaten Kendal .....	113
3.3.3. Pengaturan Tata Ruang Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal secara Umum .....	114

3.3.3.1. Pengaturan Tata Ruang Daerah Kota	
Semarang dan Kabupaten Kendal menurut	
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang	
Wilayah Kabupaten/Kota .....	114
3.3.3.1.1. Pengaturan Tata Ruang Daerah	
Kota Semarang menurut Peraturan	
Daerah Rencana Tata Ruang	
Wilayah .....	115
3.3.3.1.2. Pengaturan Tata Ruang Daerah	
Kabupaten Kendal menurut	
Peraturan Daerah Rencana Tata	
Ruang Wilayah .....	123
3.3.3.2. Pengaturan Tata Ruang Wilayah Pesisir	
Daerah Kota Semarang dan Kabupaten	
Kendal .....	126
3.3.3.2.1. Pendekatan Batasan Wilayah	
Pesisir dalam Mengatur Tata Ruang	
Wilayah Pesisir Daerah Kota	
Semarang dan Kabupaten	
Kendal .....	126

3.3.3.2.2. Bentuk Peraturan Tata Ruang	
Wilayah Pesisir Daerah Kota	
Semarang dan Kabupaten	
Kendal .....	130
3.3.3.3. Analisis Pengaturan Tata Ruang Wilayah	
Pesisir Daerah Kota Semarang dan	
Kabupaten Kendal .....	135
3.3.4. Kondisi Kerjasama antar Daerah Kota Semarang	
dengan Kabupaten Kendal.....	140
3.3.4.1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir	
Perbatasan antara Kota Semarang dengan	
Kabupaten Kendal .....	145
3.3.4.2. Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Wilayah	
Pesisir Perbatasan antara Kota Semarang	
dengan Kabupaten Kendal .....	148
3.3.4.3. Konsep Kerjasama Penataan Ruang Wilayah	
Pesisir Kota Semarang dengan Kabupaten	
Kendal .....	150
3.3.4.3.1. Landasan Yuridis Kerjasama....	150
3.3.4.3.2. Pembentukan Bentuk Kerjasama	
dan Lembaga.....	156

3.3.4.3.3. Penyelesaian Perselisihan.....	160
---	-----

#### **BAB IV. PENUTUP**

4.2. Simpulan.....	164
4.2. Saran .....	169

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. : Kawasan penataan ruang berdasar fungsi utama .....	59
Tabel 2. : Jenis kawasan strategis .....	63
Tabel 3. : Zona yang diharapkan dari penataan ruang terpadu darat dan laut.....	72
Tabel 4. : Alokasi Ruang RZWP-3-K Kabupaten/Kota .....	134

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. : Batasan wilayah pesisir .....	27
Gambar 2. : Titik Awal dan Garis Pantai sebagai acuan penarikan garis dasar.....	47
Gambar 3. : Contoh penentuan titik awal dan garis dasar (garis dasar lurus dan garis dasar normal).....	47
Gambar 4. : Contoh penarikan garis batas bagi daerah yang berbatasan dengan laut lepas atau perairan kepulauan.....	48
Gambar 5. : Contoh penarikan garis batas dengan metode garis tengah ( <i>median line</i> ) pada dua daerah yang berhadapan .....	49
Gambar 6. : Contoh penarikan garis tengah dengan metode Ekuidistan pada dua daerah yang berdampingan.....	49
Gambar 7. : Brass Tablet .....	85
Gambar 8. : Bentuk dan dimensi pilar .....	86
Gambar 9. : Bentuk dan dimensi titik bantu .....	87
Gambar 10.: Lokasi PABU 0002 .....	88
Gambar 11.: Peta Tata Guna Lahan Bagian Wilayah Kota (BWK X) (Kecamatan Ngaliyan Dan Kecamatan Tugu ) .....	119

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 136/0106 tanggal 8 Mei 2006 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penegasan Batas Daerah Kota Semarang.
2. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 130/160/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kendal.
3. Kesepakatan Bersama Nomor : 130/07272 - Nomor : 16/Perj-XII/1998 - Nomor : 261/1998 - Nomor : 762A/1998 - Nomor : 1694/1998 - Nomor : 180/1998 tanggal 21 Desember 1998 tentang Kerjasama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Salatiga Pemerintah Daerah Tingkat II Kendal, Demak dan Grobogan.
4. Keputusan Bersama Nomor : 30 Tahun 2005 – Nomor : 130.1/0975.A - Nomor : 130/02646 - Nomor : 63 Tahun 2005 - Nomor : 130.1/A.00016 - Nomor : 130.1/4382 tanggal 15 Juni 2005 tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur.
5. Peta Batas Daerah Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah.
6. Peta RDRTK Kawasan Industri Kaliwungu Kabupaten Kendal 2007-2017.

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Ajik Sujoko, SH, menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 13 Oktober 2008  
Penulis

Ajik Sujoko, S.H.  
NIM. B4A 006 275

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Seiring dengan pergulatan dan pergesaran politik, Indonesia sepakat sistem negara kesatuan dengan otonomi luas.<sup>1</sup> Kesepakatan ini telah tertuang dalam perubahan kedua UUD 1945. Di dalam Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa :

- 1.) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupetan dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2.) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka untuk penyelenggaraan pemerintah dalam negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan Provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan pemerintah daerah yang diberikan kewenangan mengatur pemerintahan berdasarkan pasa asas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006). hlm. 227.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan yakni nilai unitaris dan nilai desentralisasi. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di dalam kesatuan pemerintahan lokal ataupun regional.<sup>2</sup> Nilai desentralisasi diwujudkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia yang terkait dengan pola pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah otonom diadakan guna menyangga tatanan Negara Kesatuan. Dasar kesatuan ini amat penting dalam mendudukannya dengan dasar otonomi seluas-luasnya. Negara Kesatuan tidak dapat meniadakan Otonomi Daerah namun betapapun luas kewenangan Otonomi Daerah, tidaklah dapat meniadakan wadah Negara Kesatuan.<sup>3</sup>

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan titik awal dilaksanakannya konsep otonomi daerah di Indonesia. Kini undang-undang ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>2</sup> Zudan Arif Fakrulloh, *Konstruksi dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Makalah dalam Seminar Nasional UUD 1945 sebagai Hukum Tertinggi dengan Empat Kali Perubahan Sebagai Dasar Menuju Milenium II (Semarang : Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007). hlm.2.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 3.

Berbagai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah termasuk didalamnya kewenangan untuk mengelola sumber daya di laut. Hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.

Kewenangan mengelola sumber daya di laut oleh daerah termasuk didalamnya pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi laut dan pengaturan tata ruang. Hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
- b. pengaturan administratif;
- c. pengaturan tata ruang;
- d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
- e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
- f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.

Pasal 18 ayat (4) dan (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola

sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud. Batas wilayah pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan (5) dimaknai sebagai batas wilayah pengelolaan.

Batas wilayah pengelolaan sumber daya di wilayah laut tidak ditafsirkan batas yuridiksi seperti dalam halnya dalam batas perbatasan antar negara. Ini artinya batas wilayah pengelolaan jangan sampai dimaknai seperti batas wilayah kedaulatan.<sup>4</sup> Penetapan kewenangan daerah di wilayah laut selebar 12 mil laut tidak diartikan sebagai pengkaplingan laut, tetapi lebih kepada penetapan batas kewenangan dalam melaksanakan desentralisasi untuk pengelolaan, antara lain untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengaturan pemanfaatan, penataan ruang dan penegakan hukum dalam wilayah laut tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Jacob Rais, tidak ada istilah laut Provinsi, laut Kabupaten/Kota. Pada dasarnya perairan nasional adalah Laut Negara.<sup>6</sup> Batas wilayah pengelolaan laut kewenangan daerah selebar 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota merupakan batasan secara

---

<sup>4</sup> Kausar AS, *Investasi di Pulau-Pulau Kecil dan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Ceramah Dirjen Otonomi Daerah pada Acara Seminar Nasional Topik: "Investasi Asing dan Kedaulatan Bangsa di Pulau-Pulau Kecil" diselenggarakan Komunitas Wartawan Kelautan dan Perikanan (Komunikan), Jakarta 17 April 2006.

<sup>5</sup> Jacob Rais, *Pedoman Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999*, (USAID – Indonesia Coastal Resources Management Project Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003). hlm. 32.

<sup>6</sup> *Loc.Cit.*



administratif. Pengertian batasan laut tersebut merupakan batasan wilayah pesisir secara administratif juga.

Secara administratif, wilayah pesisir Indonesia akan tercakup ke dalam keseluruhan wilayah laut yang berada di bawah kewenangan pengelolaan dari semua yaitu 33 daerah Provinsi di Indonesia, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004.<sup>7</sup> Demikian pula akan mencakup sebagian besar daerah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki wilayah pesisir. Jadi lebar batasan wilayah laut sampai 12 mil laut sama dengan batasan wilayah pesisir (ke arah laut) secara administratif.

Untuk kepentingan secara praktis dalam lingkup nasional Indonesia, terdapat pula kesepakatan mengenai batasan wilayah pesisir yaitu bahwa batas ke arah laut suatu wilayah pesisir adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat pada Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang berskala 1 : 50.000, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.<sup>8</sup>

Untuk memberikan kejelasan ruang lingkup pengertian wilayah pesisir Indonesia telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Batasan wilayah pesisir menurut Pasal 2 UU Nomor 27 Tahun 2007 menegaskan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan

---

<sup>7</sup> L. Tri Setyawanta R., "Pengaturan Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia dan Implikasinya secara Regional", *Masalah-Masalah Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut suatu Kompilasi*. (Semarang : Pusat Studi Hukum Laut Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 95.

<sup>8</sup> L. Tri Setyawanta R., *Buku Ajar Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional*. (Semarang : Pusat Studi Hukum Laut Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 38.

pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Secara teoritis, batasan wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif.<sup>9</sup> Berdasarkan pendekatan secara ekologis, wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran.<sup>10</sup> Ditinjau berdasarkan pendekatan dari segi perencanaan, wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggung jawab.<sup>11</sup>

Pemberian kewenangan daerah mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi pengaturan tata ruang sebagaimana Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004. Tata ruang adalah wujud struktural dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>10</sup> L. Tri Setyawanta R., *Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu di Indonesia*, Kapita Selekta Hukum Menyambut Dies Natalis ke 50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang : Fakultas Hukum Undip, 2007), hlm. 123.

<sup>11</sup> Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2001, Bab I, Hlm.5., di dalam L. Tri Setyawanta R., *Buku Ajar Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional*. (Semarang : Pusat Studi Hukum Laut Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 30.

pola pemanfaatan ruang.<sup>12</sup> Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.<sup>13</sup> Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi. Pengertian bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horisontal dan vertikal. Di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi, yang ada di bawah permukaan bumi dan yang ada di atas permukaan bumi.<sup>14</sup> Jadi tata ruang wilayah pesisir merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di wilayah pesisir.

Dengan melihat batasan wilayah pesisir sebagaimana dalam Pasal 2 UU Nomor 27 Tahun 2007, pengaturan tata ruang wilayah laut kewenangan daerah selebar 12 mil laut merupakan bagian dari tata ruang wilayah pesisir. Perlunya pengaturan tata ruang di wilayah pesisir sebagai konsekuensi dari dinamika pesisir yang dapat merusak ekosistem.<sup>15</sup>

Dinamika pesisir tersebut terjadi akibat faktor alam maupun akibat aktivitas ulah manusia. Faktor alam yang mempengaruhi

---

<sup>12</sup> Dyah Marganingrum, *Tinjauan Karakteristik Wilayah Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Barat dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu*, Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil di Indonesia editor Robert M. Delinom (Ed). (Jakarta : LIPI Press, 2007), hlm. 51.

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>14</sup> Robinson Tarigan, *Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Edisi Revisi, (Jakarta : Bumi Aksara: 2005). hlm. 111.

<sup>15</sup> *Loc.Cit.*

dinamika pesisir seperti tsunami, abrasi, gelombang pasang, banjir rob, pasang surut maupun pemanasan global. Aktivitas ulah manusia yang memberi andil besar dinamika pesisir seperti penambangan karang dan pasir pantai, penggundulan hutan mangrove, reklamasi pantai, maupun pencemaran. Gangguan yang dialami ekosistem laut, khususnya di wilayah pesisir bukan main dahsyatnya, bahkan sudah pada taraf yang cukup mengkhawatirkan. *World Resource Institute (WRI)* memperkirakan bawa lebih dari lima puluh persen wilayah pesisir dunia mengalami kerusakan lingkungan yang parah akibat tekanan pembangunan.<sup>16</sup> Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam.<sup>17</sup> Demikian pula dapat dikatakan bahwa sebagian besar permasalahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan kawasan pesisir dan laut merupakan akibat dari kegiatan-kegiatan di darat.<sup>18</sup>

Naiknya permukaan air laut merupakan salah satu permasalahan penting yang harus dihadapi oleh negara-negara pantai atau negara kepulauan di dunia. Fenomena alam ini perlu diperhitungkan dalam semua kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, karena dapat berdampak

---

<sup>16</sup> Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu Sintesis dan Gagasan*. (Jakarta : PT. Gremedia Pustaka Utama, 2005). hlm. 42.

<sup>17</sup> Penjelasan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>18</sup> Dyah Marganingrum, *Op.Cit.*, hlm. 64.

langsung pada pemunduran garis pantai.<sup>19</sup> Akibat dinamika pesisir yang dapat merusak ekosistem, perlunya penataan ruang pesisir terpadu. Prinsip dasar penyusunan tata ruang pesisir terpadu adalah bagaimana mendapatkan manfaat dari sumber daya yang tersedia seoptimal mungkin dengan tidak mengabaikan aspek ekonomi, sosial, kelembagaan dan pertahanan dan keamanan.<sup>20</sup>

Berdasarkan dinamika yang terjadi pada wilayah pesisir di atas, dibutuhkan tata ruang wilayah pesisir. Penyusunan tata ruang mengacu kepada beberapa aspek berikut :<sup>21</sup>

- a. Kelestarian Sumber Daya Pesisir
- b. Kesesuaian Lahan
- c. Keterkaitan Kawasan

Pengaturan tata ruang secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administrasi, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.<sup>22</sup>

Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tidak memberikan kriteria penataan ruang wilayah pesisir berdasarkan klasifikasi tersebut. Hal ini

---

<sup>19</sup> Dewayany Sutrisno, John Pariwono, Jacob Rais, dan Tridoyo Kusumastanto, *Dampak Kenaikan Muka Laut Pada Pengelolaan Delta: Studi Kasus Penggunaan Lahan Tambak di Pulau Muaraulu Delta Mahakam*, Jurnal Ilmiah Geomatika Vol.11 No.1, September 2005.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 64-66.

<sup>22</sup> Pasal 4 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

akan dapat menyebabkan kurang jelasnya ruang lingkup wilayah pesisir dalam klasifikasi penataan ruang menurut UU Nomor 26 Tahun 2007.

Tata ruang kawasan transisi darat-laut ini akan sangat mungkin tergolong kawasan strategis mengingat persaingan penggunaan atau pemanfaatan ruang di kawasan ini sudah memperlihatkan kondisi yang sebetulnya mengerikan seperti : pengubahan rona muka bumi pantai melalui reklamasi pantai untuk kepentingan permukiman, pengerukan pasir untuk penambangan dan bahan urugan reklamasi pantai di tempat lain, dan kepentingan penahan gelombang muka air laut sebelum kawasan pesisir ditenggelamkan oleh kenaikan muka air laut akibat pemanasan global.<sup>23</sup>

Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, dalam hal pengelolaan di ruang laut diatur undang-undang tersendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (5), bahwa ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam konteks pengaturan tata ruang termasuk dalam kewenangan pengelolaan ruang laut menurut Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tidak mengatur penataan ruang di ruang laut. Berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2007, pengaturan tata ruang wilayah pesisir masuk dalam rumusan pengelolaan wilayah pesisir, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU Nomor 27 Tahun 2007, bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.

---

<sup>23</sup> Herman Hermit, Pembahasan Undang Undang Penataan Ruang (U.U. No. 26 Tahun 2007). (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008). hlm. 65.

Pengaturan tata ruang wilayah pesisir dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 masuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota. RZWP-3-K diserasikan, diseleraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota.<sup>24</sup> RZWP-3-K Provinsi mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hamparan ruang yang saling terkait antara ekosistem daratan dan perairan lautnya. Skala peta Rencana Zonasi disesuaikan dengan tingkat ketelitian peta rencana tata ruang wilayah provinsi. RZWP-3-K Kabupaten/Kota mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai 1/3 (sepertiga) wilayah perairan kewenangan provinsi. Pemerincian perencanaan pada tiap-tiap zona, dan tingkat ketelitian skala peta perencanaan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Mengacu pada batasan wilayah pesisir secara administratif, permasalahan yang kemungkinan akan dapat terjadi adalah ketika daerah Provinsi akan menentukan wilayah kewenangan di laut seluas

---

<sup>24</sup> Pasal 9 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

12 mil dari garis pantai.<sup>25</sup> Demikian pula ketika daerah Kota/Kabupaten akan menetapkan batas 1/3 dari kewenangan Provinsi tersebut.<sup>26</sup> Pengukuran luas laut 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk Kabupaten/Kota. Yang dimaksud dengan garis pantai dalam ketentuan ini adalah perpotongan garis air rendah dengan daratan.<sup>27</sup> Yang dimaksud dengan garis pantai adalah garis pangkal biasa atau garis pangkal normal yang merupakan garis air rendah sepanjang pantai, yang ditarik pada saat air surut.<sup>28</sup>

Pelaksanaan penetapan batas-batas wilayah laut yang akan menjadi kewenangan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang juga akan menentukan batas wilayah pesisir secara administratif, kemungkinan juga akan dapat menimbulkan sengketa batas wilayah laut antar Provinsi, antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota.<sup>29</sup> Penetapan batas-batas wilayah laut kewenangan daerah perlu ditindaklanjuti dengan penegasan batas wilayah laut di lapangan. Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik aspek yuridis

---

<sup>25</sup> L. Tri Setyawanta R., *Kapita Selekta Hukum*....., *Op.Cit.* hlm. 135.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>27</sup> Penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>28</sup> Pasal 5 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perairan Indonesia.

<sup>29</sup> L. Tri Setyawanta R., *Kapita Selekta Hukum*.....hlm. 137.



maupun fisik di lapangan<sup>30</sup>. Jadi penegasan batas wilayah laut antar daerah diperlukan. Penegasan batas wilayah laut antar daerah dibutuhkan sebagai dasar batas kewenangan administratif daerah mengelola sumber daya di wilayah laut guna mengatur tata ruang wilayah pesisir.

Seperti halnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menegaskan batas wilayah pesisir di laut. Penetapan batas wilayah laut ini sebagai dasar kejelasan penataan tata ruang wilayah pesisirnya. Provinsi Jawa Tengah memiliki 35 daerah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, di mana sebagian Kabupaten/Kota tersebut memiliki wilayah pesisir. Sudah seharusnya ada penegasan batas wilayah antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

Kota Semarang dan Kabupaten Kendal merupakan salah satu Kabupaten/Kota secara administratif masuk dalam Provinsi Jawa Tengah di mana memiliki wilayah pesisir yang berbatasan. Seharusnya pula ada penegasan batas wilayah laut antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal. Dengan penegasan batas wilayah laut antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal akan diketahui batas wilayah laut kewenangan masing-masing daerah sebagai dasar penataan tata ruang wilayah pesisirnya.

---

<sup>30</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

## **1.2. Permasalahan**

Dari uraian di atas dikemukakan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana konsep bentuk pengaturan batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir?
2. Bagaimana konsep pemecahan masalah batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir?
3. Bagaimana konsep kerjasama daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan mendiskripsikan konsep bentuk pengaturan batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir.
2. Mengetahui dan mendiskripsikan konsep pemecahan masalah batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir.

3. Mengetahui dan mendiskripsikan konsep kerjasama daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir.

## **Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Praktis**

Berdasarkan penulisan tesis ini diharapkan akan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai hal yang berkenaan dengan penegasan batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal, serta dapat digunakan untuk masukan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisirnya.

### **2. Kegunaan Secara Teoritis**

Penulisan tesis ini untuk memperdalam pengetahuan yang berkaitan mengenai penegasan batas laut dan penataan ruang wilayah pesisir, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum laut.

## **1.4. Metodologi Penelitian**

### **1.4.1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang diterapkan dalam ilmu pengetahuan yang mempunyai identitasnya sendiri-sendiri, selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian hukum

mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro,<sup>31</sup> penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan karena dalam penelitian ini menghendaki pendekatan yuridis normatif.. Pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian.<sup>32</sup> Penelitian ini berangkat dari kaidah-kaidah positif yang berlaku umum yaitu peraturan perundang-undangan.

#### **1.4.2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai penegasan batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir di daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.4.3. Jenis Data**

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1994). hlm 9.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena merupakan penelitian hukum normatif terutama dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang diambil dari bahan-bahan yang berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan hukum nasional dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan ketentuan tersebut yang meliputi:
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  - c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  - d. Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang berupa jurnal-jurnal dan terbitan-terbitan serta bentuk laporan-laporan lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan kamus lainnya serta peraturan-peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal

yang tidak dipublikasikan seperti Perda, rancangan Perda dan Surat Keputusan Kepala Daerah.

#### **1.4.4. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data sekunder yang dipakai dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan.

#### **1.4.5. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis kualitatif normatif. Analisis tersebut bersifat deskriptif analitis, yaitu berusaha memberikan data yang ada dan menilainya, kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

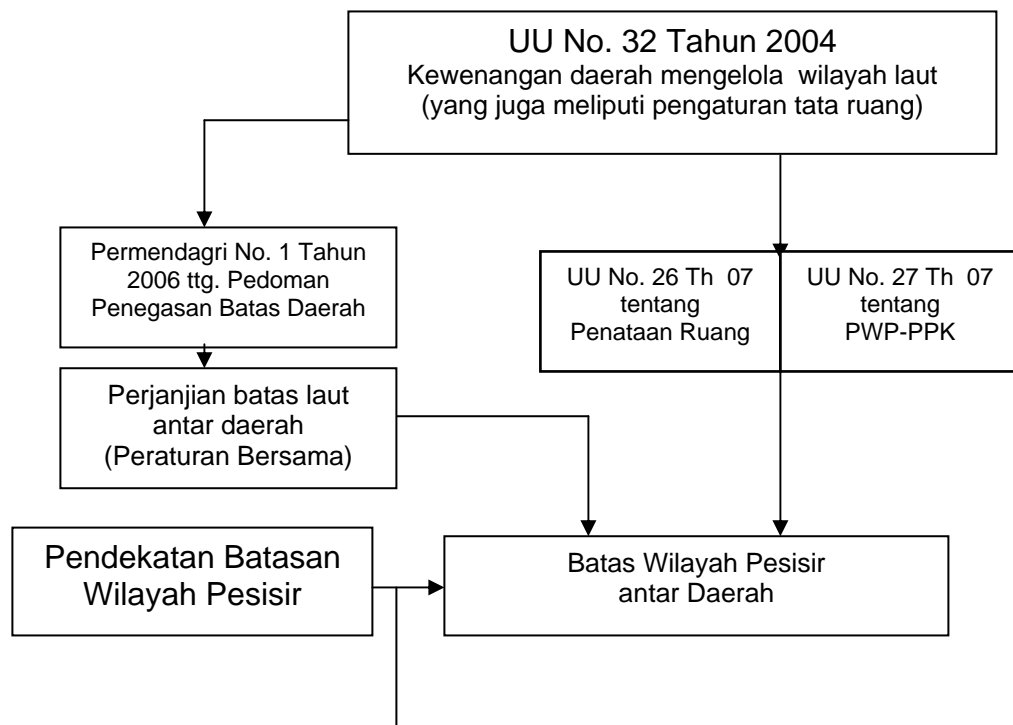
Berdasarkan kewenangan daerah mengelola sumber daya di wilayah laut meliputi pengaturan tata ruang sebagaimana Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 perlunya daerah menata tata ruang wilayah pesisirnya. Penataan ruang wilayah pesisir mengacu pada peraturan yang berlaku. Pengaturan tata ruang wilayah pesisir dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 masuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota. RZWP-3-K diserasikan, diseleraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota. RTRW Provinsi/Kabupaten /Kota merupakan pelaksanaan penataan ruang secara umum menurut UU Nomor 26 Tahun 2007.

Guna mengatur tata ruang wilayah pesisir perlu penegasan batas wilayah laut sebagai dasar batas kewenangan administratif daerah mengelola sumber daya di wilayah laut. Provinsi Jawa Tengah dapat menentukan wilayah kewenangan di laut seluas 12 mil dari garis pantai. Kewenangan 12 mil laut Provinsi masih dibagi kepada daerah Kabupaten/Kota yang juga berhak 1/3 dari kewenangan Provinsi, termasuk daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal.

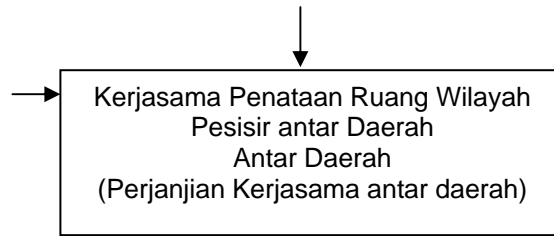
Penegasan batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal perlu diatur dalam perjanjian batas antar daerah. Bentuk pengaturan perjanjian batas wilayah laut dapat dibuat

peraturan bersama antar ke dua daerah. Perjanjian batas laut antar daerah ini digunakan sebagai acuan kewenangan penataan ruang wilayah pesisir antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal. Diketuinya batas wilayah di laut, maka akan jelas pula batas wilayah pesisir ke dua daerah. Jelasnya batas wilayah pesisir antar daerah dijadikan acuan dalam kerjasama penataan ruang wilayah pesisir antar daerah. Kerjasama penataan ruang wilayah pesisir antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal perlu pengaturan sebagai landasan hukumnya. Penataan ruang wilayah pesisir antar daerah juga perlu melihat hubungan ekologis dan perencanaan wilayah pesisir.

Skema kerangka pemikiran usulan penelitian ini dilihat dari bagan berikut:







## 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun menjadi 4(empat) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan terdiri dari 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu Pengertian Ruang Wilayah Pesisir dan Batasan Pengertian Wilayah Pesisir, Wilayah Pesisir Provinsi/Kabupaten/Kota, Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah dan Tinjauan Aspek Penataan Ruang Wilayah Pesisir.

Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu konsep bentuk pengaturan batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir, konsep pemecahan masalah batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir dan konsep kerjasama

daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai upaya penataan ruang wilayah pesisir.

Bab IV sebagai Penutup yang terdiri 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Ruang Wilayah Pesisir dan Batasan Pengertian Wilayah

##### Pesisir

##### 2.1.1. Pengertian Ruang Wilayah Pesisir

Ruang merupakan alih kata *space* untuk bahasa Indonesia.<sup>33</sup> Secara umum ruang dapat diartikan dengan tempat berdimensi tiga atau konotasi yang tegas atas batas dan lokasinya yang dapat menampung atau ditujukan untuk menampung benda apa saja. Ruang bersifat umum, tidak terikat dengan isi maupun lokasi.<sup>34</sup> Oleh *Munitz* ruang diberi pengertian sebagai tempat acuan untuk menunjukkan posisi perletakan sebuah objek dan menjadi suatu medium yang memungkinkan suatu objek bergerak.<sup>35</sup> Ruang dapat dikatakan sebagai ruang publik adalah suatu tempat yang dapat menunjukkan perletakan sebuah objek. Tempat ini dapat diakses secara fisik maupun visual oleh masyarakat umum.

Pengertian ruang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, di dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa ruang adalah wadah yang

---

<sup>33</sup> Paulus Hariyono, *Sosiologi Kota untuk Arsitek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 133.

<sup>34</sup> Robinson Tarigan, *Op.Cit.* hlm. 110.

<sup>35</sup> Paulus Hariyono, *Op.Cit.* hlm. 133.

meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang privat adalah ruang yang diperuntukkan bagi aktivitas kalangan terbatas dan penggunaannya biasanya bersifat tertutup dalam suatu teritori berdasarkan kepemilikan secara legal oleh perorangan maupun badan hukum. Namun demikian, terdapat ruang privat yang terbuka untuk umum karena tuntutan aktivitasnya. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 61 huruf d, wilayah pesisir pantai termasuk kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum. Kawasan pesisir sebagai milik umum digunakan untuk memberikan akses untuk kepentingan masyarakat umum.

Wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi.

Suatu perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintahan seperti Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan dusun.
- b. Berdasarkan kesamaan kondisi (*homogeneity*), yang paling umum adalah berdasarkan kondisi fisik.
- c. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi.
- d. Berdasarkan wilayah perencanaan/program.

Ruang bisa menyangkut apa saja yang membutuhkan tempat, maka harus ada batasan tentang ruang yang ingin dibicarakan. Dalam hal ini adalah ruang sebagai wilayah. Menurut Hanafiah, unsur-unsur

---

<sup>36</sup> Robinson Tarigan, *Op.cit.* hlm. 115-116.

ruang yang terpenting adalah jarak, lokasi, bentuk dan ukuran atau skala.<sup>37</sup> Artinya setiap wilayah harus memberikan keempat unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama membentuk/menyusun suatu unit ruang yang disebut wilayah yang dapat dibedakan dari wilayah lain. Wilayah merupakan ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional.<sup>38</sup>

*Glasson* mengatakan wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya.<sup>39</sup> Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isinya, misalnya wilayah perkebunan, wilayah industri dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, wilayah dapat dibedakan misalnya dengan kota dengan wilayah belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya dan lain-lain. Batas ruang wilayah di lapangan seringkali bukan kasat mata.<sup>40</sup> Dengan melakukan pengamatan seksama, perhitungan dan bantuan peralatan tertentu dapat dinyatakan sesuatu lokasi itu masuk ke dalam wilayah mana dari pengelompokan yang dibuat. Setidaknya batas

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

<sup>38</sup> Henny Lilywati dan Budiman, *Data Spasial Pilihan Cerdas Bangsa yang Bijak*, (Bogor: Penerbit Buku Ilmiah Poluler, 2007), hlm. 208.

<sup>39</sup> Robinson Tarigan, *Lo.cit.*, hlm. 112.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

itu bisa digambarkan di peta. Jadi wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki unsur-unsur ruang dan dapat diamati.

Secara leksikal pesisir dapat diartikan sebagai tanah datar berpasir yang terletak di pantai (di tepi laut).<sup>41</sup> Daerah pinggir laut atau wilayah darat yang berbatasan langsung dengan bagian laut disebut dengan pantai.<sup>42</sup> Pesisir adalah suatu wilayah yang lebih luas dari pada pantai. Wilayah pesisir mencakup wilayah daratan sejauh masih mendapat pengaruh laut (pasang surut dan perembasan air laut pada daratan) dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat (aliran air sungai dan sedimen dari darat). Menurut Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) batas wilayah pesisir ialah daerah yang masih ada pengaruh kegiatan bahari dan sejauh konsentrasi (desa) nelayan.<sup>43</sup>

### 2.1.2. Batasan Pengertian Wilayah Pesisir

Penentuan batas wilayah pesisir harus didasarkan kepada batasan jangkauan tertentu, dalam hal ini ke darat ialah sejauh kawasan tangkapan air (*water catchment area*), dan ke laut ialah hingga batas laut teritorial. Dalam beberapa kasus, penentuan kawasan tangkapan air

---

<sup>41</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan kedua, (Jakarta: Balai Pustaka,.....), hlm. 762.

<sup>42</sup> M.S. Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 39.

<sup>43</sup> \_\_\_\_\_ *Zona Pesisir dan Zona Laut, Mofologi Dasar Laut*. Pustekom, 2005, [http://www.edukasi.net/mol/mo\\_full.php?moid=99&fname=geox0804.htm](http://www.edukasi.net/mol/mo_full.php?moid=99&fname=geox0804.htm). (4 Pebruari 2008)

mungkin tidak tepat. Selain itu, identifikasi terhadap berbagai bentuk fisik seperti sungai atau batas wilayah fisik lainnya juga dapat digunakan. Kadang-kadang, batas kawasan tangkapan air bisa jadi berbeda dari batas wilayah atau kota. Dalam hal ini, batas administratif mungkin lebih sesuai.

Pada tingkat minimum, batas wilayah harus didasarkan kepada perencanaan dan keilmuan yang sesuai untuk mengawasi penggunaan yang berpengaruh atau mungkin berpengaruh terhadap wilayah perencanaan sumber daya pesisir.

Menurut kesepakatan internasional, wilayah pesisir sendiri didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua atau landas kontinen (*continental shelf*).<sup>44</sup>

Untuk kasus Indonesia, batasan wilayah pesisir yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut ialah: ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin.<sup>45</sup> Sementara ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang

---

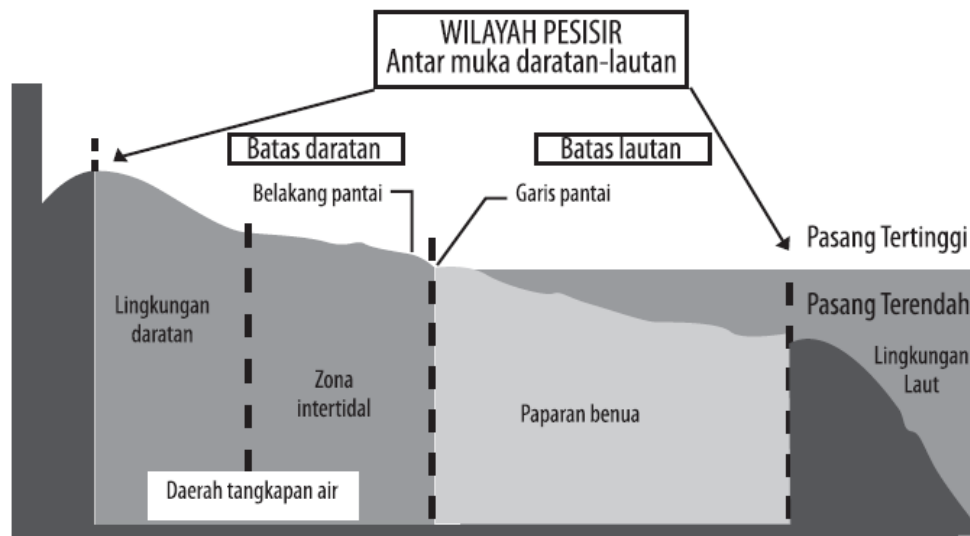
<sup>44</sup> Wiyana, A., G.H. Perdanahardja, J.M. Patlis (eds.), *Materi Acuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Seri Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. (Jakarta, Bapenas, DKP dan Depkum dan HAM bekerja sama dengan *Coastal Resources Management Project* (USAID): 2005). hlm. 33.

<sup>45</sup> *Ibid.*

terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Batasan wilayah pesisir dapat dilihat gambar 1 berikut :

Gambar 1.  
Batasan wilayah pesisir



Secara teoritis, batasan wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif.<sup>46</sup>

#### 2.1.2.1. Pendekatan Ekologis

Berdasarkan pendekatan secara ekologis, wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan

<sup>46</sup> L. Tri Setyawanta R., *Buku Ajar....., Op.Cit.* hlm. 25.



laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran.<sup>47</sup>

Hal yang penting dari ekologi ialah konsep ekosistem. Ekosistem ialah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya.<sup>48</sup> Suatu ekosistem dapat dibagi dalam beberapa subekosistem seperti subekosistem lautan, subekosistem daratan, subekosistem danau, subekosistem hutan dan subekosistem padang pasir. Antara tiap-tiap subekosistem itu pun saling berinteraksi.<sup>49</sup> Dengan konsep ekosistem, unsur-unsur dalam lingkungan tidak secara terpisah-pisah, melainkan terintegrasi dalam beberapa komponen yang saling terkait dalam suatu sistem. Pendekatan inilah yang disebut pendekatan ekosistem. Pendekatan ekosistem mempunyai kemiripan dengan perspektif menyeluruh (holistik). Akan tetapi, perspektif ini dapat diinterpretasikan sebagai cara-cara yang komprehensif dan terpadu.<sup>50</sup>

Kepentingan pendekatan ekosistem adalah pada pendekatannya yang komprehensif, menyeluruh dan terpadu.<sup>51</sup> Berdasarkan definisinya, komprehensif berarti semuanya tercakup. Pendekatan terpadu masih

---

<sup>47</sup> *Loc.Cit.*, hlm. 25-26.

<sup>48</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 3.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hlm. 84.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 76-77.

mempertahankan gagasan-gagasan dasar yang holistik (menyeluruh), akan tetapi lebih terarah dan praktis.

Pendekatan ekologi wilayah pesisir sangat memperhatikan ekosistem antara wilayah darat dengan wilayah laut sebagai satu kesatuan ekosistem. Pendekatan secara ekologis pada hakikatnya akan memperlihatkan kawasan pesisir karena kawasan merupakan istilah ekologis, sebagai wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya.<sup>52</sup> Lingkungan pantai dan laut yang biasa dikatakan sebagai lingkungan akuatik maritim mempunyai 3 ekosistem yang penting dan saling memengaruhi yaitu yakni ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang dan ekosistem padang lamun (*sea-grass*). Melihat dari pendekatan ekologis, batas wilayah pesisir tidak dibatasi oleh administrasi pemerintahan.<sup>53</sup> Pendekatan ekologis wilayah pesisir lebih melihat wilayah pesisir dengan fungsinya sebagai satu kesatuan ekosistem.

#### **2.1.2.2. Pendekatan Perencanaan**

Ditinjau berdasarkan pendekatan dari segi perencanaan, wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara

---

<sup>52</sup> Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

<sup>53</sup> M.S. Wibisono, *Op.Cit.*,. hlm. 154.

bertanggung jawab.<sup>54</sup> Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.480 pulau, panjang garis pantai mencapai 95.181 km serta luas wilayah laut mencakup 70 persen dari total luas wilayah Indonesia.<sup>55</sup> Disepanjang garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang relatif sempit memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber daya buatan serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.<sup>56</sup> Namun, wilayah pesisir juga rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam.

Memanfaatkan wilayah pesisir dengan berbagai kelebihan sumber daya yang dimiliki maupun memiliki rentan terhadap kerusakan membutuhkan perencanaan dalam mengelolanya. Keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> L. Tri Setyawanta R., *Buku Ajar....., Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>55</sup> Menteri Kelautan dan Perikanan, Sambutan dan Arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan Dan Kemaritiman Hotel Bumikarsa Bidakara, 19 Juni 2007.

<sup>56</sup> Arifin Rudyanto, *Kerangka Kerjasama Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut*, disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004.

<sup>57</sup> Penjelasan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Perencanaan wilayah pesisir sangat diperlukan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen. Fungsi manajemen dirumuskan *George R. Terry*, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).<sup>58</sup>

#### **2.1.2.2.1. Jenis Perencanaan**

Dikenal beberapa jenis perencanaan seperti: 59

1. *Top-down and bottom-up planning*
2. *Vertical and horizontal planning*
3. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung

##### **A.d.1 . *Top-down and bottom-up planning***

Perencanaan model *top-down* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih tinggi di mana institusi perencana pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi yang lebih tinggi. Sebaliknya, *bottom-up planning* adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih rendah, di mana institusi perencana

---

<sup>58</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Ghalia Indah, 1996). hlm. 17.

<sup>59</sup> Robinson Tarigan, *Lo.cit.*, hlm. 14-19.

pada level yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi perencana pada tingkat yang lebih rendah.

Umumnya yang terjadi adalah kombinasi antara kedua model tersebut. Rencana yang dihasilkan oleh kedua level institusi perencanaan tersebut dapat ditentukan model mana yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah *top-down* maka perencanaan itu disebut sentralistik, sedangkan apabila yang dominan adalah *bottom-up planning* maka perencanaan itu disebut desentralistik.

#### A.d.2 *Vertical and horizontal planning*

Pembedaan *Vertical and horizontal planning* ini didasarkan atas perbedaan kewenangan antar institusi walaupun lebih ditekankan pada perbedaan jalur koordinasi yang diutamakan perencana. *Vertical planning* adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Model ini mengutamakan keberhasilan sektoral, jadi menekankan pentingnya koordinasi antar berbagai jenjang pada instansi yang sama (sektor yang sama). Tidak diutamakan keterkaitan antar sektor atau apa yang direncanakan oleh sektor lainnya, melainkan lebih melihat kepentingan sektor itu sendiri dan bagaimana hal itu dapat dilaksanakan oleh berbagai jenjang pada institusi yang sama di berbagai daerah secara baik dan terkoordinasi untuk mencapai sasaran sektoral.

*Horizontal planning* menekankan keterkaitan antar berbagai sektor sehingga berbagai sektor itu dapat berkembang secara bersinergi. *Horizontal planning* melihat pentingnya koordinasi antar berbagai instansi pada level yang sama, ketika masing-masing instansi menangani kegiatan atau sektor yang berbeda. *Horizontal planning* menekankan keterpaduan program antar berbagai sektor pada level yang sama. Pada *horizontal planning* kegiatan masing-masing sektor dibuat saling terkait dan menjadi sinkron sehingga sasaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

A.d.3 Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung.

Pembedaan model perencanaan ini didasarkan atas kewenangan yang diberikan kepada institusi perencana yang seringkali terkait dengan luas bidang yang direncanakan. Perencanaan yang melibatkan masyarakat adalah sejak awal masyarakat telah diberitahu dan diajak dalam menyusun rencana tersebut. Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat adalah apabila masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dan paling-paling hanya dimintakan persetujuan dari DPRD untuk persetujuan akhir.

Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat misalnya apabila perencanaan itu bersifat teknis pelaksanaan, bersifat internal,

menyangkut bidang yang sempit, dan tidak secara langsung bersangkut paut dengan kepentingan orang banyak.

#### **2.1.2.2.2. Tingkat-tingkat Perencanaan Daerah**

Tingkat-tingkat perencanaan daerah di Indonesia pada umumnya mengikuti tingkat-tingkat pemerintahan yang ada, yaitu tingkat pemerintahan yang memiliki sumber pendapatan sendiri dan penggunaannya dapat mereka atur sehingga mereka harus membuat anggaran pendapatan belanja dan anggaran. Tingkat pemerintahan di Indonesia yang memiliki anggaran adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah membuat perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 154 sebagai berikut:

##### **Pasal 150**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
- c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah;
- e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 151

- (1) Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Pasal 152



- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
  - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
  - d. keuangan daerah;
  - e. potensi sumber daya daerah;
  - f. produk hukum daerah;
  - g. kependudukan;
  - h. informasi dasar kewilayahan; dan
  - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

Pentingnya perencanaan dikuatkan oleh berbagai faktor yang dikemukakan berikut ini :<sup>60</sup>

- a. Banyak di antara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbaharui.
- b. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia.
- c. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali.
- d. Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya.
- e. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian dari masyarakat yang berdomosili di wilayah tersebut.
- f. Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia di masa lalu adalah aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kamakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat langgeng.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 8-10.

Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut menjadi perencana dalam pengelolaan potensi sumber daya alam. Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukkan manfaatnya, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :<sup>61</sup>

- a. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang.
- b. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan masih diijinkan.
- c. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.
- d. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.
- e. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat.

Batasan wilayah pesisir dari segi perencanaan, lebih mengarah kepada lokasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir. Penempatan wilayah sesuai pembangunan di lokasi yang, tidak saja menghindarkan kerusakan lingkungan tetapi juga menjamin keberhasilan ekonomi.<sup>62</sup>

#### **2.1.2.3. Pendekatan Administratif**

Ditinjau berdasarkan pendekatan secara administratif, masalah batas wilayah pesisir merupakan hal yang paling mendasar yang harus

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 10-11.

<sup>62</sup> Dyah Marganingrum, *Op.Cit.*, hlm. 66.

dipahami terlebih dahulu, karena akan menunjukkan ruang lingkup berlakunya suatu peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan wilayah pesisir.<sup>63</sup> Di Indonesia, dalam konsep normatifnya batasan pengertian wilayah pesisir yang digunakan dalam Pedoman Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu adalah :<sup>64</sup>

“Wilayah peralihan ekosistem darat dan laut yang saling memengaruhi di mana ke arah laut 12 mil laut dari garis pantai untuk Provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk Kabupaten/Kota dan ke arah darat batas administrasi Kabupaten/Kota.”

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk Provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota.

Apabila wilayah laut antara 2 (dua) Provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk Kabupaten/Kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi dimaksud.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> L. Tri Setyawanta R., *Buku Ajar.....Op. Cit.* hlm. 37.

<sup>64</sup> Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pesisir Terpadu, 9 April 2002, Bab II Ketentuan Umum, butir 44.

<sup>65</sup> Pasal 18 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Batasan wilayah pesisir secara administratif juga terdapat dalam

Pasal 2 UU Nomor 27 Tahun 2007 bahwa :

Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Terkait kewenangan daerah di wilayah laut, alasan perlunya batas laut adalah untuk menyelesaikan tumpang tindih klaim daerah di wilayah laut.<sup>66</sup> Untuk menghindari sengketa, maka perlu ditarik garis batas yang disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan. Batasan wilayah pesisir secara administratif lebih menekankan kepastian batas wilayah administrasi menurut kewenangan daerah. Pendekatan batas wilayah laut secara administratif, tidak mengenal hubungan ekosistem sebagaimana dalam pendekatan ekologi.

## **2.2. Wilayah Pesisir Provinsi/Kabupaten/Kota**

Mengacu pada batasan wilayah pesisir secara administratif, wilayah pesisir ke arah laut seluas 12 mil dari garis pantai.<sup>67</sup> Pengukuran luas laut 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Yang dimaksud dengan

---

<sup>66</sup> I Made Andi Arsana, *Arti Penting Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah*. <http://geo-boundaries.blogspot.com/2006/11/arti-penting-penegasan-batas-wilayah.html>. (2 Nopember 2006)

<sup>67</sup> L. Tri Setyawanta R., *Kapita Selekta Hukum..... Op.Cit.*, hlm. 135.

garis pantai dalam ketentuan ini adalah perpotongan garis air rendah dengan daratan.<sup>68</sup> Yang dimaksud dengan garis pantai adalah garis pangkal biasa atau garis pangkal normal yang merupakan garis air rendah sepanjang pantai, yang ditarik pada saat air surut.<sup>69</sup>

Pengertian laut lepas dan perairan kepulauan tidak lepas dari rejim laut menurut ketentuan konvensi Internasional mengenai hukum laut atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. UNCLOS 1982 melahirkan delapan zonasi pengaturan (*regime*) yang berlaku di laut yaitu :<sup>70</sup>

- a. Wilayah kedaulatan negara, terdiri perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial.
- b. Yuridiksi khusus negara yang meliputi zona (jalur) tambahan
- c. Tempat melaksanakan hak-hak berdaulat atas sumberdaya alam yaitu Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
- d. Bagian yang tidak dapat dimiliki oleh negara yang melauti laut lepas.
- e. Bagian dari warisan bersama umat manusia yaitu Kawasan Dasar Laut Internasional.

Dengan berlakunya UNCLOS 1982, dan telah diratifikasinya UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi disebut *United Nations on The Law of The Sea* 1982, posisi Indonesia terhadap wilayah laut diuntungkan dan rezim wilayah laut Indonesia semakin luas. Menurut Djalal dan Rais, rejim itu mencakup

---

<sup>68</sup> Penjelasan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>69</sup> Pasal 5 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perairan Indonesia.

<sup>70</sup> Etty R. Agoes (edt.), *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita di Laut?*, (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2000), hlm. 9-10.

perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.<sup>71</sup>

Perairan Pedalaman bagi suatu negara kepulauan (seperti Indonesia) adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis-garis penutup pada mulut sungai, teluk atau pelabuhan yang terletak di perairan kepulauan.<sup>72</sup> Sebuah negara memiliki kedaulatan penuh terhadap perairan pedalaman dengan pengecualian bahwa hak lintas damai tetap berlaku bagi kapal asing di kawasan yang tidak dikategorikan sebagai perairan pedalaman sebelum ditentukannya sistem garis pangkal lurus. Di dalam perairan kepulauan, untuk penetapan batas perairan pedalaman, Pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan.<sup>73</sup>

Perairan kepulauan; perairan yang terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan.<sup>74</sup> Seperti halnya di perairan pedalaman, Pasal 52 ayat (2) UNCLOS menyatakan bahwa hak lintas damai juga berlaku pada perairan kepulauan.

Laut teritorial disebelah luar dari garis pangkal ke arah laut lepas, yang bagi suatu negara kepulauan berada di sebelah luar dari garis

---

<sup>71</sup> Mustafa Abubakar, *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik*. (Jakarta: Kompas, 2006). hlm. 23-24.

<sup>72</sup> Etty R. Agoes (edt.), *Op.Cit.* hlm. 11.

<sup>73</sup> Pasal 7 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

<sup>74</sup> Etty R. Agoes (edt.), *Op.Cit.* , hlm. 15.

pangkal lurus kepulauannya, dan lebarnya masimum hanya sampai 12 mil laut.<sup>75</sup> Kedaulatan suatu negara di laut teritorial adalah mutlak di mana negara tersebut berhak menerpakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>76</sup> Kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia.<sup>77</sup>

Zona tambahan adalah jalur laut yang terletak disebelah luar dari batas terluar laut teritorial yang lebarnya tidal boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana laut teritorial tersebut diukur.<sup>78</sup> Zona Ekonomi Eksklusif merupakan bagian dari laut lepas berupa suatu jalur yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal.<sup>79</sup>

Landas kontinen merupakan dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut teritorial sampai dengan batas terluar yang ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria antara lain jarak, kedalaman dan ketebalan endapan. Batas tersebut ditetapkan dengan ukuran jarak maksimum 200 mil laut dari garis pangkal bagi negara yang pantainya curam atau maksimum 350 mil laut dari garis pangkal negara yang

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>76</sup> Ida Kurnia, *Rezim Hukum Landas Kontinen*. (Jakarta: Diadit Media, 2007). hlm. 22.

<sup>77</sup> Pasal 11 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

pantainya landai, atau tidak melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 m.<sup>80</sup>

Dari ke enam rejim laut yang termasuk dalam wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan dan perairan pedalaman.<sup>81</sup> UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (4) diartikan bahwa kewenangan Provinsi di wilayah laut adalah selebar 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas (ke arah laut teritorial) dan atau ke arah laut kepulauan. Kewenangan Kabupaten/Kota adalah sepertiganya dari kewenangan Provinsi.

### **2.3. Penegasan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah**

#### **2.3.1. Batas Wilayah Laut**

Batas daerah adalah pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.<sup>82</sup> Kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan pilihan sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1)

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>81</sup> Pasal 3 UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

<sup>82</sup> Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.



dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004. Daerah juga diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Sebagai konsekuensi dari pemberian kewenangan tersebut adalah memberikan batas daerah di wilayah laut. Penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan.<sup>83</sup>

Batas wilayah laut atau batas maritim pada dasarnya adalah rangkaian titik-titik batas yang terhubung dengan segmen-segmen garis batas.<sup>84</sup> Secara normatif batas daerah di laut menurut Pasal 1 angka (6) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, pengertian batas daerah di laut adalah pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut.<sup>85</sup>

### **2.3.2. Penegasan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah**

Penentuan batas wilayah laut antar daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang

---

<sup>83</sup> Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

<sup>84</sup> I Made Andi Asrana, *Batas Maritim Antar Negara*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 102.

<sup>85</sup> Pasal 1 angka 6 Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Pedoman Penegasan Batas Daerah. Penegasan batas daerah di wilayah laut secara umum terdiri dua macam yaitu :

a. Penetapan Batas Daerah di Laut (Secara Kartometrik)<sup>86</sup> yang berupa :

1. Menyiapkan Peta-peta Laut, Peta Lingkungan Laut Nasional (Peta LLN) dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (Peta LPI).
2. Untuk Batas Provinsi menggunakan peta laut dan peta Lingkungan Laut Nasional, untuk batas daerah kabupaten dan daerah kota gunakan peta laut dan peta Lingkungan Pantai Indonesia.
3. Menelusuri secara cermat cakupan daerah yang akan ditentukan batasnya. Perhatikan garis pantai yang ada, pelajari kemungkinan penerapan garis dasar lurus dan garis dasar normal dengan memperhatikan panjang maksimum yakni 12 mil laut.
4. Memberi tanda rencana titik awal yang akan digunakan.
5. Melihat peta laut dengan skala terbesar yang terdapat pada daerah tersebut. Baca dan catat titik awal dengan melihat angka lintang dan bujur yang terdapat pada sisi kiri dan atas atau sisi kanan dan bawah dari peta yang digunakan.
6. Mengeplot dalam peta titik-titik awal yang diperoleh dan menghubungkan titik-titik dimaksud untuk mendapatkan garis dasar lurus yang tidak lebih dari 12 mil laut.
7. Menarik garis sejajar dengan garis dasar yang berjarak 12 mil laut atau sepertiganya.
8. Batas daerah di wilayah laut sudah tergambar beserta daftar koordinat.
9. Membuat peta batas daerah di laut lengkap dengan daftar koordinatnya yang akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri

b. Penegasan batas daerah di laut (melalui pengukuran di lapangan) yang berupa :

1. penelitian dokumen;
2. pelacakan batas;
3. pemasangan pilar di titik acuan;
4. penentuan titik awal dan garis dasar;
5. pengukuran dan penentuan batas; dan

---

<sup>86</sup> Penjelasan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

6. pembuatan peta batas.<sup>87</sup>

Penegasan batas daerah dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah yang terdiri dari :<sup>88</sup>

- (1) Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat.
- (2) Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi, dan
- (3) Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota.

### **2.3.3. Metode Penegasan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah**

#### **2.3.3.1. Pemilihan Peta, Titik Awal dan Garis Dasar**

Dalam desain awal untuk menyiapkan batas wilayah kewenangan laut daerah, peta yang dipakai adalah Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) skala 1:500.000. Peta-peta ini dibuat dalam proyeksi dan sistem grid yang dikenal dengan sistem *Universal Transverse Mercator* (UTM) dengan kerangka koordinat Datum Indonesia 1974 (Indonesian Datum 1974, atau ID74). Pada saat daerah mengukur dan menetapkan batas wilayah kewenangannya di laut, diharapkan dipakai peta dengan skala yang lebih besar, setidaknya 1:250.000.

Peta batas wilayah laut menyajikan koordinat dari titik-titik batas di laut, koordinat dari titik-titik acuan yang dipakai serta koordinat titik-dasar di pantai yang dipakai dalam menggambarkan batas di laut. Peta

---

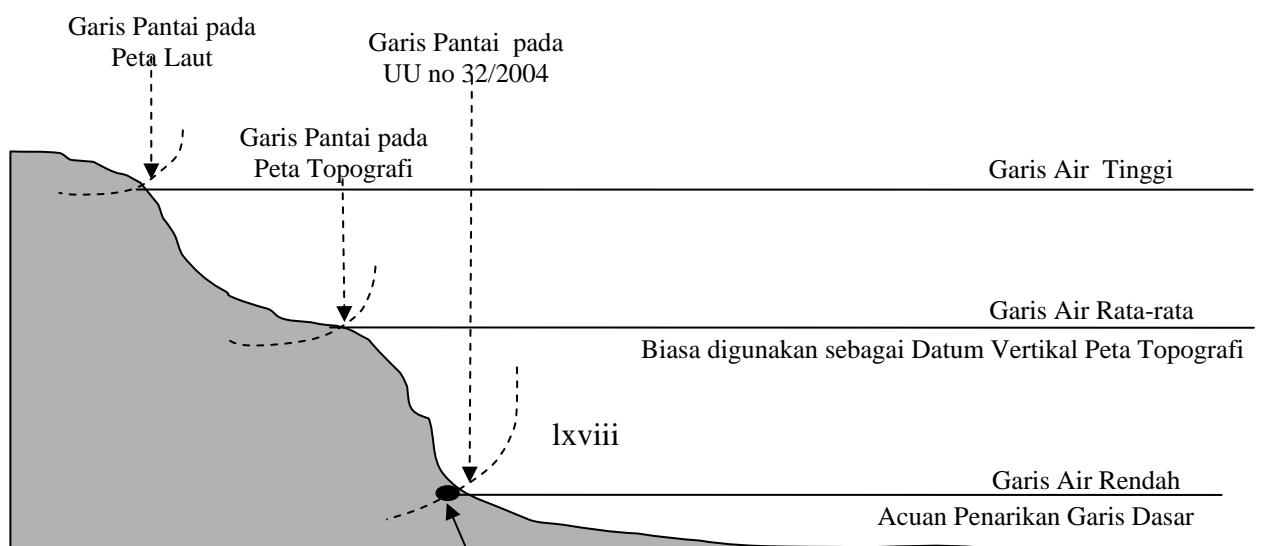
<sup>87</sup> Pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

<sup>88</sup> Pasal 18 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

laut merupakan data geospasial utama yang diperlukan untuk menggambar titik pangkal, garis pangkal, zona maritim yang diklaim dan garis batas maritim. Batas di laut ini tidak hanya berhenti pada permukaan laut tetapi ditarik vertikal sampai ke dasar laut, sehingga sumberdaya kelautan yang berada dalam batas 12 mil laut di dasar laut menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya.

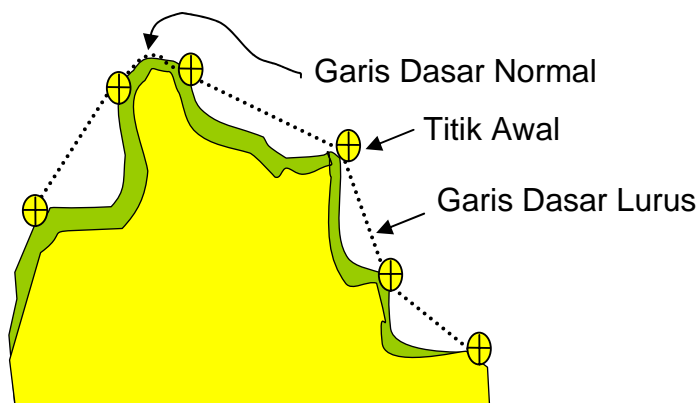
Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006, tidak dikenal istilah titik dasar melainkan titik awal, yaitu titik koordinat yang terletak pada garis pantai dan ditetapkan sebagai titik untuk menentukan garis dasar seperti gambar 2 berikut:

Gambar 2 :  
Titik Awal dan Garis Pantai sebagai acuan penarikan garis dasar



Garis Dasar adalah garis yang menghubungkan antara dua titik awal dan terdiri dari garis dasar lurus dan garis dasar normal. Garis dasar normal adalah garis antara dua titik awal yang berhimpit dengan garis pantai. Garis dasar lurus adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik awal berdekatan dan berjarak tidak lebih dari 12 mil seperti gambar 3 berikut:

Gambar 3.  
Contoh penentuan titik awal dan garis dasar  
(garis dasar lurus dan garis dasar normal)



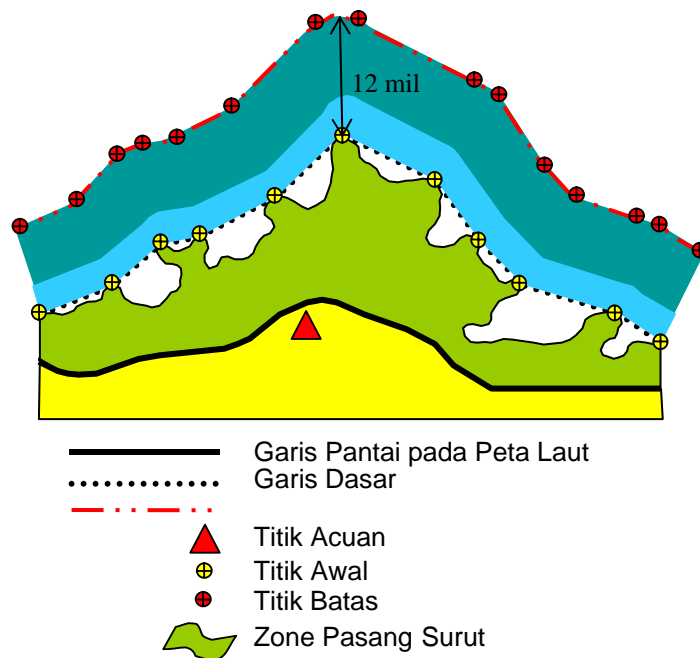
2.3.3.2.

#### **Metode Pengukuran Batas Laut**

Dalam pengukuran batas terdapat tiga kondisi yang berbeda yakni pantai yang bebas, pantai yang saling berhadapan dan pantai

saling berdampingan. Untuk pantai yang bebas pengukuran batas sejauh 12 mil laut dari garis dasar (baik garis dasar lurus dan atau garis dasar normal). Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 4 sebagai berikut:

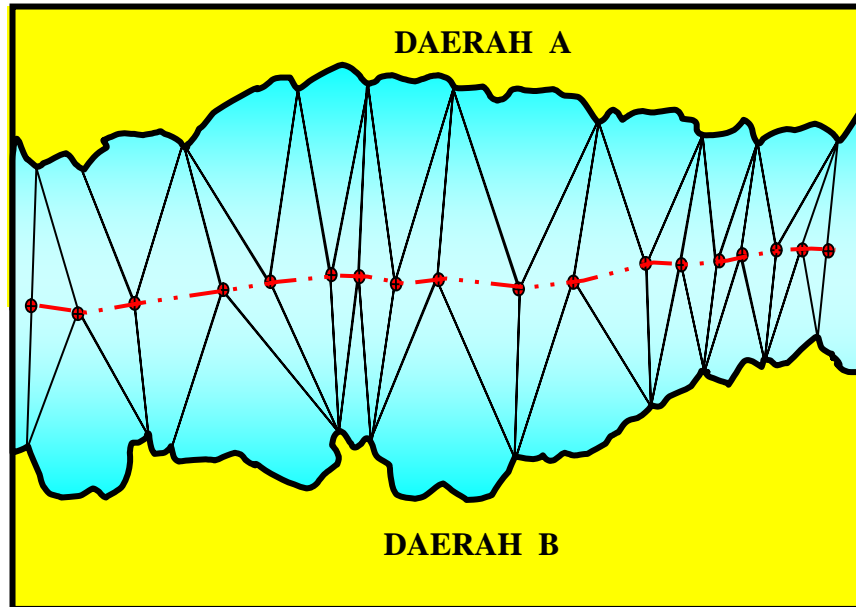
Gambar 4.  
Contoh penarikan garis batas bagi daerah yang berbatasan dengan laut lepas atau perairan kepulauan.



Untuk pantai yang saling berhadapan dilakukan dengan menggunakan prinsip garis tengah (*median line*). Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 5 sebagai berikut:

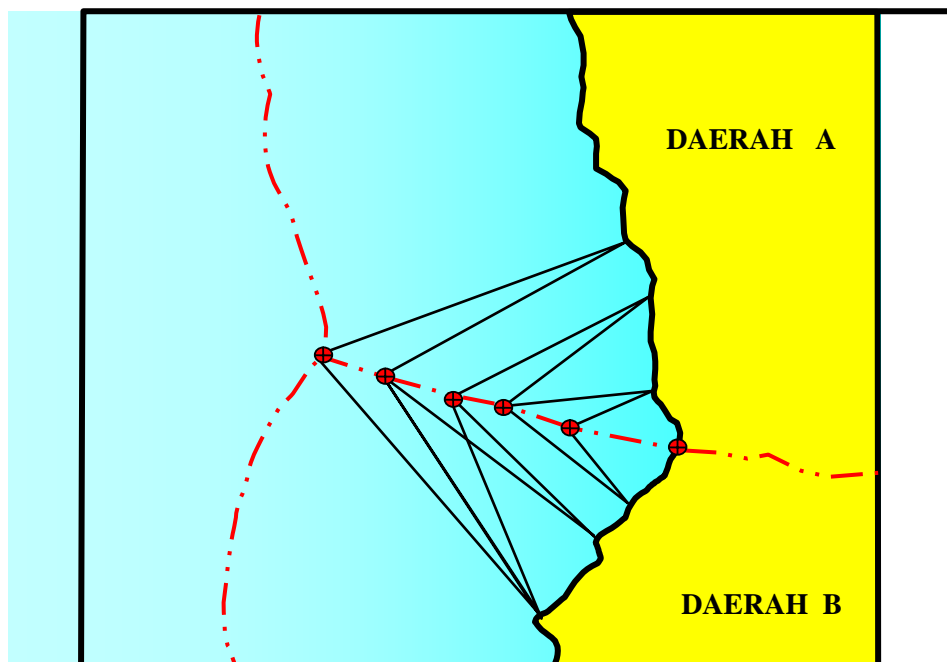
Gambar 5.  
Contoh penarikan garis batas dengan metode garis tengah

(median line) pada dua daerah yang berhadapan



Untuk pantai yang saling berdampingan dilakukan dengan menggunakan prinsip sama jarak. Pengukuran batas kondisi ini dapat dilihat pada gambar 6 sebagai berikut:

Gambar 6.  
Contoh penarikan garis tengah dengan metode Ekuidistan pada dua daerah yang berdampingan



### 2.3.3.3. Konsep Pemetaan

Pemetaan atau pembuatan peta sangat erat dengan kegiatan yang mendahuluinya yaitu kegiatan survei. Survei (*survey*) adalah kegiatan pengumpulan data tentang dunia nyata (bumi dan unsur-unsurnya) melalui (1) pengukuran (*surveying*), (2) pengamatan (*observations*) dan (3) penginderaan (*sensing*).<sup>89</sup> Yang terakhir ini dilakukan melalui jarak jauh tanpa menyentuh objeknya dan disebut penginderaan jauh atau disingkat inderaja (*remote sensing*).

Pemetaan adalah suatu kegiatan memproses data survei dan disajikan dalam bentuk peta.<sup>90</sup> Dengan demikian peta adalah suatu model penyajian dunia nyata kita di atas media bidang datar, misalnya bidang kertas. Dapat dibayangkan bahwa dunia nyata kita tidak berbentuk datar, sehingga proses penyajian data dari dunia nyata tersebut ke atas bidang datar memerlukan suatu model matematik yang disebut dengan “proyeksi peta”, yaitu rumus-rumus transformasi dari bidang tidak datar (bentuk bumi dimodelkan sebagai bentuk matematis bidang bola atau lebih akurat berbentuk bidang ellipsoidal) ke atas bidang datar (proyeksi azimuthal) atau bidang yang dapat didatarkan

---

<sup>89</sup> Jacub Rais, *Loc.Cit.*, hlm. 21.

<sup>90</sup> *Ibid.*



seperti bidang silinder (proyeksi silinder, *cylinder projection*) atau bidang kerucut (proyeksi kerucut, *conic projection*).

Dengan kata lain, peta adalah suatu model dunia nyata disajikan melalui model matematis dalam bentuk simbol matematik pula: titik, garis, area, serta simbol-simbol lain atau warna-warna untuk memperjelas atau membedakan unsur-unsur geografis pada peta. Berbeda dengan dunia nyata, peta disajikan dengan memperkecil dimensinya yang disebut dengan skala peta, yaitu perbandingan antara ukuran di atas peta dengan ukuran di muka bumi. Melihat peta pertama kali harus memperhatikan skala peta dan proyeksi petanya. Skala yang sama tetapi berbeda proyeksinya akan menampilkan bentuk unsur di peta (unsur geografis) yang berbeda. Terjadi distorsi antara bentuk-bentuk unsur geografis. Proyeksi yang sama tetapi skala yang berbeda akan memperlihatkan perbedaan rinci dari informasi di peta. Makin besar skalanya makin rinci informasi yang disajikan dibandingkan dengan skala yang lebih kecil. Skala 1 : 10.000 berarti 1 satuan ukuran di atas peta sama dengan 10.000 satuan di muka bumi atau 1 mm di peta sama dengan 10 meter di muka bumi. Dengan demikian skala 1 : 50.000 lebih kecil daripada skala 1 : 10.000.

Dalam dunia perpetaan ada dua pengertian tentang peta dasar, yaitu dalam pengertian "*basic map*" dan "*base map*". Dalam pengertian "*basic map*" adalah peta yang dibuat langsung dari survei di lapangan.

Oleh karena itu ketelitian peta tergantung pada skala yang dipilih dan skala ini menentukan teknologi dan metodologi yang dipakai dalam survei maupun pemrosesannya untuk memenuhi tingkat rinci yang disyaratkan untuk skala peta tersebut.

Dalam fungsi peta sebagai "*base map*" adalah peta yang menyajikan informasi dasar muka bumi untuk acuan bagi peta-peta tematik. Peta dasar semacam ini dinamakan peta topografi (untuk daratan) atau istilah dalam bahasa Indonesia yang dipopulerkan oleh Bakosurtanal adalah peta Rupabumi. Untuk lautan adalah peta Rupabumi Dasar Laut atau peta bathymetri. Peta dasar (*base map*) berskala baku dengan kisaran skala kecil (1 : 500.000 s/d 1 : 1.000.000).; skala medium (1 : 25.000 s/d 1 : 250.00) dan skala besar (1 : 1.000 s/d 1 : 10.000).

Dari Peta dasar (*basic map*) dengan skala awal yang didesain dapat diturunkan peta-peta turunan (*derived map*) berskala lebih kecil dari skala awalnya hanya melalui proses "generalisasi" secara kartografis di laboratorium saja tanpa perlu mengukur banyak di lapangan, kecuali utk mengontrol jika ada perubahan yang signifikan. Contoh: jika skala awal peta dasar (*basic map*) 1 : 50.000 maka dapat diturunkan peta-peta skala 1 : 100.000, 1 : 250.000, 1 : 500.000 dan 1 : 1.000.000.

Peta turunan ini dapat berfungsi sebagai peta dasar (*base map*) untuk pembuatan peta-peta tematik dengan skala yang sama. Dengan sendirinya "*basic map*" adalah juga "*base map*". Kita tidak dapat menurunkan peta-peta dengan skala yang lebih besar dari skala awalnya (dari *basic map*), karena kita memerlukan penambahan detail sebagai informasi tambahan. Mekanisme yang dilakukan oleh banyak badan-badan pemetaan nasional di semua negara adalah memetakan wilayah nasionalnya dengan basic map skala 1 : 50.000 (sebagai skala yang paling banyak gunanya) dan pada saat yang sama dapat diturunkan peta-peta yang lebih kecil. Dan kalau seluruh wilayah nasional telah tercakup dengan peta 1 : 50.000 maka revisi peta dimulai dengan *basic map* skala lebih besar, misalnya 1 : 25.000 dan pada saat yang sama dapat merevisi peta-peta skala 1 : 50.000 yang telah dibuat sebelumnya dan skala-skala turunannya yang lebih kecil.

Peta dasar adalah sarana/acuan bagi penyajian informasi geografis dengan tema-tema tertentu lainnya. Peta-peta dengan berbagai tema disebut peta tematik. Peta dasar sendiri memuat informasi dasar muka bumi terdiri dari: (1) hipsografi (tinggi rendahnya medan yang dalam peta digambar dengan kontur atau digambar secara 3-dimensi); (2) hidrografi/unsur-unsur air (laut, sungai, danau, dan sebagainya); (3) cakupan lahan (vegetasi, sawah, ladang, dan sebagainya); (4) unsur-unsur buatan (kota, desa, bandar udara,

bendungan, jalan raya, kereta api dan sebagainya); (5) nama-nama unsur geografi (nama-nama laut, pulau, gunung, sungai, tanjung, teluk, dan sebagainya, disebut juga dengan istilah toponym atau nama geografis); (6) batas-batas yurisdiksi nasional di darat dan laut (batas-batas administrasi pemerintahan: Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa serta batas-batas kadastral tanah negara, kawasan lindung, kawasan konservasi, dan sebagainya) dan akhirnya yang terpenting adalah sistem acuan geografis nasional berupa sistem koordinat baku.

Peta dasar ini dapat merupakan dasar bagi penataan ruang secara nasional. Oleh karena itu peta dasar harus memuat batas-batas kadastral yang sah, walaupun peta dasar ini bukan peta otoritas untuk batas yang digambarkan pada peta ini, namun gambaran jalannya garis batas adalah benar adanya, seperti jangan sampai ada batas daerah yang memotong daerah aliran sungai, dan sebagainya.

Adalah suatu pengetahuan umum bahwa peta topografi/ruipabumi bukanlah peta otoritas bagi garis batas yang digambarkan di atas peta ini. Ini memang benar karena peta batas yang otoritas adalah peta yang diukur di lapangan oleh tim survei dan penegasan bersama (*Joint Survey and Demarcation Team*) dan hasilnya disetujui oleh pejabat dari masing-masing pihak yang mempunyai wewenang untuk masalah

perbatasan. Prosedur baku ini berlaku untuk peta batas internasional serta batas kewenangan daerah di darat dan di laut.

#### **2.3.3.4. Pembuatan Peta Batas**

Dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, melakukan pembuatan peta batas daerah di wilayah laut harus mengikuti spesifikasi teknis yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Ellipsoida dan Proyeksi. Dalam pembuatan Peta Batas Daerah di wilayah laut dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut :

Ellipsoida : WGS-84

Proyeksi : UTM

Skala :

a) Peta Batas Daerah hasil penetapan secara Kartometris

- 1:500.000 untuk batas daerah provinsi
- 1:100.000 untuk batas daerah kabupaten
- 1:50.000 untuk batas daerah kota

b) Peta Batas Daerah hasil penegasan dengan pengukuran

- 1:500.000 untuk batas daerah provinsi
- 1:100.000 untuk batas daerah kabupaten
- 1:50.000 untuk batas daerah kota

b. Ukuran dan Format Peta :

- 1) Ukuran peta ditentukan dengan ukuran standar peta (A0)
- 2) Setiap lembar peta memuat satu wilayah provinsi dengan mencakup provinsi tetangganya
- 3) Pada peta ditulis daftar koordinat geografis dan UTM

c. Macam Simbol dan Tata Letak Informasi Tepi:

- 1) Simbol batas daerah di laut disesuaikan dengan simbol yang baku digunakan.
- 2) Tata letak mengikuti ketentuan pembuatan peta yang berlaku.

d. Penyajian Informasi Peta: Pada peta batas daerah di wilayah laut dicantumkan juga :

- 1) Nama personil pelaksana
- 2) Nama Tim Penegasan Batas Daerah
- 3) Kolom pengesahan

#### **2.3.3.5. Sistem Informasi Geografis**

Peta-peta tematik yang terkait dengan sumberdaya alam dan lingkungan dibuat melalui interpretasi manual maupun digital dari citra (foto udara dan rekaman satelit). Sedangkan untuk tema-tema sosial, ekonomi, termasuk demografi harus pula disajikan dalam bentuk spasial. Semua informasi tematik ini harus berdasarkan peta dasar rupabumi baku agar lapisan-lapisan informasi (*layers of information*)

dapat ditumpang susun baik manual maupun digital untuk dievaluasi secara terpadu yang kemudian lahirlah sistem informasi geografis (SIG).

SIG adalah sistem informasi yang didesain untuk bekerja dengan data spasial atau data yang mengacu pada posisi di muka bumi (*geo-referenced data*).<sup>91</sup> SIG terdiri dari suatu kumpulan basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data spasial maupun suatu kumpulan tindakan untuk bekerja dengan data spasial. SIG juga suatu infrastruktur untuk mengintegrasikan data dari berbagai skala dan waktu dan dari berbagai format, dengan kata lain, SIG adalah suatu peta dari tatanan yang lebih tinggi. Dengan pengembangan SIG dibangun pula teknologi 4 M (*Measurement, Mapping, Monitoring dan Modelling*) (Pengukuran, Pemetaan, Pemantauan dan Pemodelan). Peta merupakan produk dari pengumpulan data (*data acquisition*) sebagai sumber data (*data source*) untuk masuk ke dalam sistem basis data.

Satu unsur yang sama dari semua definisi SIG tersebut adalah bahwa SIG berkaitan dengan data geografis atau data spasial atau data keruangan di muka Bumi. Data geografis ini secara konvensional disajikan dalam bentuk peta, sehingga basis data SIG disebut juga basis data kartografi, walaupun banyak pakar menyebutnya basis data geografis dengan masuknya data-data yang non-peta, seperti data atribut yang tidak terkait dengan data spasial, seperti peraturan

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

perundang-undangan, dsb. sedangkan data sosial-ekonomi-budaya dapat berupa data berorientasi spasial.

## **2.4. Tinjauan Aspek Penataan Ruang Wilayah Pesisir**

### **2.4.1. Aspek Penataan Ruang Wilayah Pesisir Menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Secara umum pengaturan penataan ruang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Diuraikan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa ruang terbagi ke dalam beberapa kategori, yang diantaranya:

1. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah.
2. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, di mana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.
3. Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.<sup>92</sup>

Dari ketiga kategori ruang tersebut perlu adanya penataan sehingga akan menghasilkan tujuan penataan ruang. Tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai

---

<sup>92</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. (Bandung: Nuansa, 2008). hlm. 24.



kegiatan di berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi.<sup>93</sup>

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan :

- a. Sistem, terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- b. Fungsi utama kawasan, terdiri atas kawasan lindung dan budi daya.
- c. Wilayah administrasi, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota
- d. Kegiatan kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- e. Nilai strategis kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.<sup>94</sup>

Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan.

Kawasan penataan ruang berdasar fungsi utama tersebut dapat dilihat tabel 1. berikut :

Tabel 1.:  
Kawasan penataan ruang berdasar fungsi utama

---

<sup>93</sup> Robinson Tarigan, *Op.cit.* hal 58.

<sup>94</sup> Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Nama Kawasan	Fungsi kawasan	Kriteria kawasan
Kawasan lindung	1. Perlindungan kawasan bawahannya  2. Perlindungan setempat  3. Suaka alam dan cagar budaya  4. Rawan bencana  5. Lindung lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hutan lindung</li> <li>- bergambut</li> <li>- resapan air</li> <li>- sempadan pantai</li> <li>- sempadan sungai</li> <li>- kawasan sekitar danau/waduk</li> <li>- kawasan sekitar mata air</li> <li>- suaka alam</li> <li>- suaka alam laut</li> <li>- perairan lainnya</li> <li>- pantai hutan berbakau</li> <li>- taman nasional</li> <li>- taman hutan raya</li> <li>- taman wisata alam</li> <li>- cagar alam</li> <li>- suaka margasatwa</li> <li>- cagar budaya dan ilmu pengetahuan</li> <li>- rawan letusan gunung berapi</li> <li>- rawan gempa bumi</li> <li>- rawan tanah longsor</li> <li>- gelombang pasang</li> <li>- rawan banjir</li> <li>- taman buru</li> <li>- cagar biosfer</li> <li>- perlindungan plasma nutfah</li> <li>- pengungsian satwa</li> <li>- terumbu karang</li> </ul>
Kawasan budi daya	Dibudidayakan atas kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peruntukan hutan produksi</li> <li>- peruntukan hutan rakyat</li> <li>- peruntukan pertanian</li> <li>- peruntukan perikanan</li> <li>- peruntukan pertambangan</li> <li>- peruntukan pemukiman</li> <li>- peruntukan industri</li> <li>- peruntukan pariwisata</li> <li>- tepat beribadah</li> <li>- pendidikan</li> <li>- pertanahan dan keamanan</li> </ul>

Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi dan

penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota. Wewenang pemerintah

Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi.
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi.
4. Kerja sama penataan ruang antar Provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.<sup>95</sup>

Wewenang pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan

penataan ruang antara lain:

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
4. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.<sup>96</sup>

Pengaturan kerjasama antar daerah diatur dalam Pasal 195

sampai dengan Pasal 198 UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

#### Pasal 195

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

---

<sup>95</sup> Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

<sup>96</sup> Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

#### Pasal 196

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Untuk pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah membentuk badan kerja sama.
- (4) Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

#### Pasal 197

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud Pasal 197 UU No 32 Tahun 2004 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

#### Pasal 198

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Penataan ruang berdasarkan kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap :

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya.
2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis dilihat tabel 2. berikut :

Tabel 2.:  
Jenis kawasan strategis

No	Sudut kepentingan	Contoh
1.	Pertahanan dan keamanan	- Kawasan perbatasan negara termasuk pulau kecil terdepan - Kawasan latihan militer
2.	Pertumbuhan ekonomi	- Kawasan metropolitan - Kawasan ekonomi khusus - Kawasan pengembangan ekonomi terpadu - Kawasan tertinggal - Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas
3.	Sosial budaya	- Kawasan adat tertentu - Kawasan konservasi warisan budaya
4.	Pendayagunaan SDA dan atau teknologi tinggi	- Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi di lepas pantai - Kawasan yang menjadi lokasi instalasi nuklir
5.	Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	- Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tidak memberikan kriteria penataan ruang wilayah pesisir berdasarkan klasifikasi tersebut. Hal ini

akan dapat menyebabkan kurang jelasnya ruang lingkup wilayah pesisir dalam klasifikasi penataan ruang menurut UU Nomor 26 Tahun 2007.

Tata ruang kawasan transisi darat-laut ini akan sangat mungkin tergolong kawasan strategis mengingat persaingan penggunaan atau pemanfaatan ruang di kawasan ini sudah memperlihatkan kondisi yang sebetulnya mengerikan seperti : pengubahan rona muka bumi pantai melalui reklamasi pantai untuk kepentingan permukiman, pengerukan pasir untuk penambangan dan bahan urugan reklamasi pantai di tempat lain, dan kepentingan penahan gelombang muka air laut sebelum kawasan pesisir ditenggelamkan oleh kenaikan muka air laut akibat pemanasan global.<sup>97</sup>

Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007, dalam hal pengelolaan di ruang laut diatur undang-undang tersendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (5), bahwa ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

#### **2.4.1.1 Perencanaan Tata Ruang**

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.<sup>98</sup> Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Secara hirarki, rencana tata umum tata ruang terdiri atas :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

---

<sup>97</sup> Herman Hermit, *Loc.Cit.*, hlm. 65.

<sup>98</sup> Pasal 1 angka 13 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Rencana rinci tata ruang terdiri dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Perencanaan tata ruang untuk menghasilkan rencana rinci hanya diperlukan apabila dalam perencanaan tata ruang yang menghasilkan rencana umum tata ruang tersebut memiliki tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta yang tidak rinci. Pentingnya peta bagi perencanaan adalah menempatkan posisi detil-detil objek rencana dalam ruang pada posisi yang benar dalam media yang datar (kertas atau monitor).<sup>99</sup> Objek yang digambarkan dalam peta rencana harus memberikan nilai koordinat dan luasan yang sesungguhnya agar bisa secara tepat direkonstruksi di lapangan pada saat detil objek-objek rencana tersebut diimplementasikan.

---

<sup>99</sup> Herman Hermit, *Op.Cit.* hlm. 103.

#### **2.4.1.2. Pemanfaatan ruang**

Pemanfaatan ruang dalam pengertian luas yang ingin diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2007 adalah :

- a. Dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- b. Dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang secara vertikal maupun di dalam bumi.
- c. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.
- d. Diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dengan rencana tata ruang.
- e. Disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administrasi sekitarnya.
- f. Memperhatikan standar pelayanan minimum dalam penyediaan sarana dan prasarana.

#### **2.4.1.3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta



pengenaan sanksi.<sup>100</sup> Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Ijin pemanfaatan ruang diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Insentif merupakan upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Disentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

#### **2.4.2 Aspek Penataan Ruang Wilayah Pesisir menurut UU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2007, pengaturan tata ruang wilayah pesisir masuk dalam rumusan pengelolaan wilayah pesisir, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UU Nomor 27 Tahun 2007, bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.

---

<sup>100</sup> Pasal 35 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ruang Lingkup UU Nomor 27 Tahun 2007 diberlakukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (*Integrated Coastal Management*) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling penguatan pemanfaatannya.

Perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibagi ke dalam empat tahapan: (i) rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi.

#### 2. Pengelolaan

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan antara lain pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan

Pesisir (HP-3). Izin pemanfaatan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing instansi terkait.

### 3. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:

- a. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
- b. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya;
- c. memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi; maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.

Pengaturan tata ruang wilayah pesisir dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 masuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota. RZWP-3-K diserasikan, diseleraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan hal berikut:<sup>101</sup>

1. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan.
2. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir.
3. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

RZWP-3-K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.<sup>102</sup> Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

---

<sup>101</sup> Pasal 9 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

<sup>102</sup> Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

1. Pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut.
2. Keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem laut dalam suatu bioekoregion.
3. Penetapan pemanfaatan ruang laut.
4. Penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan.

RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang:

1. Alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana alur.
2. Keterkaitan antar ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil dalam suatu Bioekoregion.
3. Penyusunan RZWP-3-K diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kawasan, zona, dan/atau alur laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Skala peta Rencana Zonasi disesuaikan dengan tingkat ketelitian peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. RZWP-3-K Kabupaten/Kota mencakup wilayah perencanaan daratan dari kecamatan pesisir sampai 1/3 (sepertiga) wilayah perairan kewenangan

provinsi. Pemerincian perencanaan pada tiap-tiap zona, dan tingkat ketelitian skala peta perencanaan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Secara garis wilayah pesisir dipilah menjadi 3 (tiga) mintakan (*zones*) yaitu mintakan preservasi, konservasi dan pemanfaatan.<sup>103</sup> Tujuan pemintakan ini adalah untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang bersifat saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*).<sup>104</sup>

Penentuan zona tersebut difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan sumberdaya pesisir guna mempermudah pengendalian dan pemanfaatan. Rencana pemintakatan menjelaskan fokus kegiatan dan nama zona yang dipilih berdasarkan kondisi dan kegiatan yang diizinkan atau dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu. Kegiatan bersyarat tersebut tidak perlu ditujukan untuk suatu zona tetapi pada waktu yang bersamaan dapat dipertimbangkan berkesinambungan pada suatu zona khusus. Penetapan rencana pemintakatan dimaksudkan untuk memelihara keberlanjutan sumberdaya pesisir dalam jangka panjang serta mengeliminir berbagai

---

<sup>103</sup> Dyah Marganingrum, *Loc.Cit.*, hlm. 66.

<sup>104</sup> Lampiran Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep. 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

faktor tekanan terhadap ekosistem pesisir akibat kegiatan yang tidak sesuai (*incompatible*).

Zona yang diharapkan dari penataan ruang wilayah pesisir disajikan dalam tabel 3 berikut:<sup>105</sup>

Tabel 3.:  
Zona yang diharapkan dari penataan ruang terpadu darat dan laut

Penjelasan Zona	
Zona Laut	Zona Darat
1. Taman Laut Nasional	1. Konservasi (daratan)
2. Cagar Alam Laut/Suaka Alam Laut	2. Perlindungan (daratan)
3. Taman Wisata Laut	3. Kehutanan
4. Perikanan (Rumpon/Mutiara)	4. Pertanian
5. Pertambangan	5. Pemukiman
6. Pariwisata	6. Industri (daratan)
7. Industri	7. Pariwisata
8. Transportasi dan Komunikasi	
9. Zona Tata Guna Khusus Laut Militer/Ekonomi	
10. Zona Konservasi Laut (usulan)	

Agar dapat menempatkan berbagai kegiatan pembangunan di zona yang sesuai secara ekologis maka kelayakan biofisik di wilayah pesisir harus diidentifikasi dahulu. Ada 12 (dua belas) langkah dalam penyusunan rencana zonasi sebagai berikut:<sup>106</sup>

1. Memulai penyusunan rencana
2. Menyusun katalog informasi sumber daya yang tersedia
3. Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya dan isu-isu perencanaan

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Tim Penyusun Pedoman Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K, DKP, *Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Laut*. (Jakarta: DKP, 2007). hlm. 15.

4. Analisa data potensi dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang berdasarkan kepentingan stakeholder
5. Memilih tujuan pengelolaan untuk paket sumber daya
6. Menetapkan tujuan pengelolaan zona dan sub-zona
7. Membuat draft peta zonasi
8. Menyusun matriks kesesuaian ragam aktivitas dengan tujuan pengelolaan sumber daya
9. Memeriksa konsistensi draft rencana zonasi dengan RTRW dan aturan-aturan lainnya
10. Melaksanakan review publik untuk draft rencana zonasi
11. Mengidentifikasi lokasi konflik pemanfaatan sumber daya, atau berpotensi konflik dan memberikan rekomendasi pemecahannya
12. Mengajukan rencana zonasi untuk pengesahan.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **3.1. Konsep Bentuk Pengaturan Batas Wilayah Laut Antar Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai Upaya Penataan Ruang Wilayah Pesisir**

##### **3.1.2. Gambaran Umum Penegasan Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal**

Penegasan batas wilayah antara daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal telah dilakukan sejak tahun 2006.<sup>107</sup> Sampai tahun 2008 penegasan batas wilayah daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sudah dilaksanakan masih sebatas penegasan batas wilayah darat. Batas daerah di wilayah darat adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas di lapangan dan daftar koordinat di peta.

Penegasan batas wilayah darat dilakukan oleh tim penegasan batas daerah ke dua daerah. Tim penegasan batas daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal tergabung dalam Tim Penegasan dan Penetapan Batas Daerah (PPDB) Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang dibawah koordinasi Badan Koordinasi Pembangunan Lintas (Bakorlin)

---

<sup>107</sup> Suwito, *Wawancara*, Staf Pemerintahan Umum Kota Semarang, (17 Juli 2008).

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I.<sup>108</sup> Fungsi Bakorlin ini sebagai fasilitator penegasan batas wilayah antar daerah. Sedangkan tim supervisi teknis dipercayakan kepada Topdam IV Diponegoro. Hasil dari penegasan batas daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal berupa peta kesepakatan mengenai batas wilayah di mana yang disepakati sebagai dasar hukumnya. Peta garis batas ini memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Skala : 1: 100.000
2. Datum : DGN 95
3. Elipsoid referensi : Spheroid WGS 1984
4. Lebar Zone : 6 derajat
5. Sistem grid : UTM (*Universal Transverse Mercator*)
6. Angka perbesaran : 0,9996 pada Meridian tengah
7. Interval kontur : 50 meter
8. Sistem referensi koordinat : Primer grid geografi

Pelaksanaan penegasan batas wilayah daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal mencakup di dalamnya kegiatan pelacakan, pengukuran, pemetaan dan pembuatan peta lokasi pilar batas. Tahap penegasan batas darat daerah Kota Semarang dengan Kabupaten

---

<sup>108</sup> Tim Teknis PPBD, 2006. Laporan Hasil Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Batas Daerah Penegasan dan Penetapan Batas Daerah Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dengan Kota Semarang. "Laporan Akhir". (Semarang, 30 Desember 2006).

Kendal tersebut masih dalam tahap verifikasi dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan belum final. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah bahwa keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan sampai tahun 2008 penegasan batas daerah di wilayah laut antara daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal belum dilaksanakan. Pelaksanaan penegasan batas wilayah laut ini belum dilakukan karena penegasan batas daerah di wilayah laut merupakan perpanjangan setelah penegasan batas darat.<sup>109</sup>

Hasil pelaksanaan penegasan batas wilayah di darat daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal masih belum final. Hal ini membawa implikasi pelaksanaan penegasan batas wilayah daerah di laut pun belum bisa dilaksanakan. Batas daerah di laut adalah pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut.

Belum akhirnya status batas wilayah daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal belum memiliki status hukum yang tetap karena penegasan batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis

---

<sup>109</sup> I Made Andi Asrana, *Batas Maritim Antar Negara. Loc.Cit.* hlm. 151.

maupun fisik di lapangan. Sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik batas kedua wilayah yang berbatasan khususnya di wilayah laut.

### **3.1.2. Pembentukan Tim Penegasan Batas Wilayah Daerah di Laut Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dan Pelaksana Survey**

Secara umum tim penegasan batas daerah antara daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sudah dibentuk oleh tim penegasan batas daerah ke dua daerah. Kedua tim penegasan batas daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal tergabung dalam Tim Penegasan dan Penetapan Batas Daerah (PPDB) Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang dibawah koordinasi Badan Koordinasi Pembangunan Lintas (Bakorlin) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I.<sup>110</sup>

Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sesuai amanat dengan Pasal 18 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Tim Penegasan Batas Daerah antara Kota

---

<sup>110</sup> Tim Teknis PPBD, 2006. Laporan Hasil Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Batas Daerah Penegasan dan Penetapan Batas Daerah Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dengan Kota Semarang. "Laporan Akhir". (Semarang, 30 Desember 2006).

Semarang dengan Kabupaten Kendal dibuat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah masing-masing.

Tim Penegasan Batas Daerah Kota Semarang dibuat berdasar Keputusan Walikota Semarang Nomor 136/0106 tanggal 8 Mei 2006 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penegasan Batas Daerah Kota Semarang. Sedangkan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kendal dibuat berdasar Keputusan Bupati Kendal Nomor 130/160/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kendal. Kedua Tim Penegasan Batas Daerah Kota Semarang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis.

Tugas Tim Pengarah yaitu :

- 1) Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah;
- 2) Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- 3) Melakukan pelacakan dan memberikan tanda batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas;
- 4) Melakukan penegasan batas daerah dengan pemasangan pilar permanen, pengukuran titik koordinat pilar batas dan pemetaan batas daerah dengan menggunakan prinsip geodetik.

- 5) Melaksanakan sosialisasi batas daerah kepada masyarakat;
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki batas daerah dengan Kota Semarang (untuk Tim Pengarah Kota Semarang) / Kabupaten Kendal (untuk Tim Pengarah Kabupaten Kendal);
- 7) Menyiapkan rancangan kesepakatan bersama dengan daerah Kabupaten/Kota dimaksud dengan Penetapan Batas Daerah.

Tim Teknis bertugas antara lain:

- 1) Melakukan pelacakan (ajudifikasi dan penandaan titik-titik batas) berdasarkan acuan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Kota Semarang (untuk Kota Semarang) / Kabupaten Kendal (untuk Kabupaten Kendal);
- 2) Membuat peta kerja batas daerah;
- 3) Melakukan survey meliputi pelacakan batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, pemasangan pilar batas dan penentuan peta batas;
- 4) Membuat berita acara dari setiap tahapan kegiatan dari penetapan dan penegasan batas daerah;
- 5) Membuat laporan hasil kerja Tim Teknis kepada Ketua Tim Penegasan Batas Daerah Kota Semarang (untuk Kota Semarang) / Kabupaten Kendal (untuk Kabupaten Kendal);

Melihat dari pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kota Semarang maupun Kabupaten Kendal, bahwa tim tersebut hanya dibuat untuk melaksanakan penegasan batas wilayah darat antara daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal. Pembentukan suatu tim penegasan batas wilayah di laut perlu pekerjaan survei hidro oseanografi maupun pembuatan peta batas di laut. Kedua surat keputusan dari kedua Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah belum mencerminkan pelaksanaan tugas penegasan batas wilayah di laut. Hal ini sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah bahwa tugas Tim Penegasan Batas Daerah terdiri :

- 1) Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah;
- 2) Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- 3) Melakukan pelacakan dan memberikan tanda batas sementara yang dituangkan dalam berita acara hasil pelacakan dan tanda batas;
- 4) Melakukan penegasan batas daerah dengan pemasangan pilar permanen, pengukuran titik koordinat pilar batas dan pemetaan batas daerah dengan menggunakan prinsip geodetik.
- 5) Melaksanakan survei hidro oseanografi untuk penentuan batas daerah di laut.
- 6) Menuangkan hasil penegasan batas ke dalam bentuk peta batas daerah baik di darat maupun di laut;
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada gubernur bagi tim penegasan batas provinsi dan kepada bupati/walikota bagi tim penegasan batas daerah kabupaten/kota;
- 8) Menyiapkan rancangan kesepakatan bersama.

Oleh karena itu dalam penegasan batas wilayah di laut perlunya merevisi Keputusan kedua Kepala Daerah baik Daerah Kota Semarang maupun Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah.

Dalam melaksanakan survey di lapangan pelaksanaan penegasan batas wilayah darat antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dilakukan oleh Topdam IV Diponegoro. Pemilihan tim survey tersebut dilakukan dengan prosedur pengadaan barang/jasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan karena ada dasarnya pekerjaan penentuan batas wilayah kewenangan Daerah adalah tanggung jawab dan beban anggaran Pemerintah Daerah. Pemilihan tim survey pelaksanaan penegasan batas wilayah darat antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dilakukan dengan metode pemilihan langsung menurut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>111</sup>

Pelaksana survey di lapangan lapangan pelaksanaan penegasan batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat dipilih seperti halnya penegasan batas wilayah darat. Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat mengkontrakkan pekerjaan *survey* ini kepada dunia usaha atau instansi

---

<sup>111</sup> Suwito, *Wawancara*, Staf Pemerintahan Umum Kota Semarang (17 Juli 2008).



pemerintah pusat, seperti Bakosurtanal dan/atau Dishidros-AL (sekarang Janhidros/Jawatan Hidro-Oceanografi TNI AL) atau perguruan tinggi. Anggaran pekerjaan lapangan menjadi tanggung jawab daerah yang bersangkutan dapat dibebankan oleh Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal.

Setiap *survey* dan penegasan batas di lapangan selalu dilakukan secara bersama dengan membentuk tim gabungan antara kedua tim *survey* dari daerah yang bersangkutan (*Joint Survey Team*). Tujuannya untuk memecahkan masalah di lapangan bersama, saling mengecek hasil pengukuran dan saling memberi informasi. Dengan kata lain, hasil *survey* harus disetujui oleh Ketua-Ketua Tim dari ke dua belah pihak. Ketentuan ini sudah menjadi prosedur baku di mana saja dalam *survey* dan penegasan batas antar dua negara.

### **3.1.3. Penentuan Batas Secara Kartometri Wilayah Laut**

Penentuan batas secara kartometri dilakukan pengukuran di atas peta. Untuk ini dipakai peta Lingkungan Laut Nasional (LNN) skala 1:500.000 yang diterbitkan oleh BAKOSURTANAL- Dinas Hidrografi AL Edisi I - 2000. Mengingat skalanya yang kecil maka garis pantai di peta dianggap sama dengan garis pantai pada surut rendah, sehingga dapat dipilih titik-titik awal pada peta yang berupa titik-titik yang menonjol

(*salient points*) pada kedua sisi dari masing-masing daerah. Untuk itu perlu peta yang lebih besar setidaknya 1:250.000.

Setelah menentukan titik-titik yang menonjol dari wilayah daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal kemudian dapat menerapkan prinsip sama jarak (ekuidistan) dalam mengukur batas wilayah laut sampai sejauh 4 mil laut. Batas laut antara Daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, diukur mulai dari titik awal pada garis pantai berdasarkan prinsip sama jarak.

Peta batas secara kartometri ini dipakai sebagai peta kerja jika *survey* dan penegasan batas dilakukan di lapangan. Dalam istilah bahasa Inggris ada yang disebut "*Survey and Delimitation*" adalah pengukuran batas di atas peta, sedangkan "*Survey and Demarcation*" adalah pengukuran batas di lapangan. Pembuatan peta batas daerah di wilayah laut dibuat dengan spesifikasi sebagai berikut :

- a. Elipsoidal : WGS-84
- b. Proyeksi : UTM
- c. Skala : - 1:100.000 untuk batas daerah Kabupaten Kendal  
- 1:50.000 untuk batas daerah Kota Semarang

Peta batas secara kartometri ini dipakai sebagai peta kerja jika *survey* dan penegasan batas dilakukan di lapangan. Dengan penegasan secara kartografi maka batas daerah di wilayah laut sudah tergambar beserta daftar koordinat. Langkah selanjutnya adalah membuat peta

batas daerah di laut lengkap dengan daftar koordinatnya. Menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2006, peta batas kartografi ini dimintakan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

### **3.1.4. Penarikan Luas Kewenangan Wilayah Laut Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal**

#### **3.1.4.1. Tahap Rekonesen**

Dalam tahap rekonesen (*reconnaissance*) atau penjajakan di lapangan, Tim melakukan kegiatan utama, antara lain:

- a. Menentukan titik air rendah dalam satu hari, bila perlu dua hari, secara visual atau melalui pengukuran situasi dengan alat theodolit, dan tetapkan letak titik awal yang pasti di pantai.<sup>112</sup> Karena titik awal ini akan selalu berada di bawah muka air laut pada saat pasang, maka diperlukan suatu titik acuan pada posisi yang lebih stabil dan kering ke arah darat dari garis pantai pada saat pasang (*high tide shoreline*).
- b. Pembuatan titik acuan/titik referensi ini berupa pilar beton dengan ukuran baku. Pembuatan Pilar Titik Acuan menurut Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

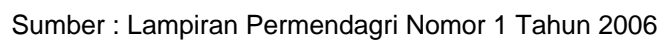
---

<sup>112</sup> Jacob Rais, 2003. *Studi Kasus Batas Wilayah Laut antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka-Belitung* (USAID – Indonesia Coastal Resources Management Project Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003). hlm. 5.

- 1) Penentuan Lokasi Pilar titik acuan batas/Titik Referensi : Kriteria teknis penentuan lokasi pilar titik acuan batas/titik referensi adalah;
  - a. Pada kondisi tanah yang stabil
  - b. Di daerah terbuka dan terhindar dari abrasi
  - c. Mudah ditemukan dan mudah dijangkau
  - d. Pada “titik sekutu” (titik batas antara Kabupaten Kendal dengan Kota Semarang), titik acuan juga merupakan pilar titik acuan batas.
- 2) Bentuk dan Dimensi Pilar Titik Acuan :
  - a. Pilar memiliki bentuk dan dimensi yang standar
  - b. Setiap pilar dilengkapi dengan “Brass Tablet”

Gambar “Brass Tablet” sebagaimana dalam Gambar 7 berikut:

Gambar 7.  
Gambar “Brass Tablet”



Gambar 8.  
Bentuk dan dimensi pilar



2)

3)

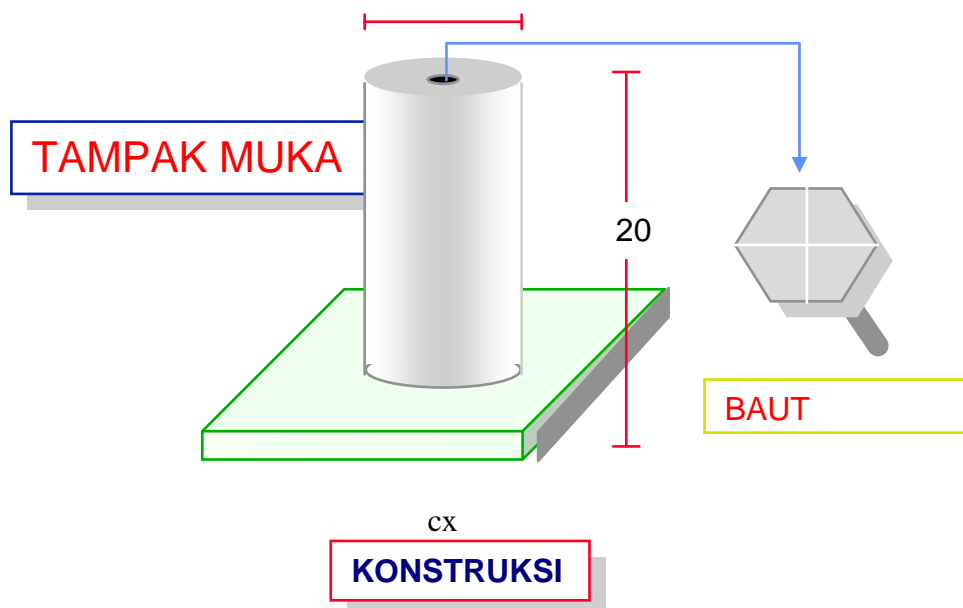
Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 1 Tahun 2006

3) Membuat Titik Bantu :

- a. Setiap pilar titik acuan batas diikatkan pada tiga titik bantu
- b. Titik bantu diukur jarak dan arahnya
- c. Bentuk dan dimensi titik bantu dapat dilihat pada gambar 9

berikut:

Gambar 9.:  
Bentuk dan dimensi titik bantu



Sumber : Lampiran Permendagri Nomor 1 Tahun 2006

Hasil penegasan batas wilayah darat Daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal telah memiliki Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 0002 / TA – 33 – 22 - 0010. Lokasi PABU 0002 / TA – 33 – 22 - 0010 terletak di Ds. Sumbirejo, Kaliwungu, Kendal dan Ds. Mangkang Kelurahan Tugu, Semarang. Dengan posisi :  $06^{\circ} 56' 57,60345$  LS –  $110^{\circ} 17' 33,20204$  BT. Pilar batas darat ini sudah dibuat dalam peta dengan

skala 1:35.000. Gambar lokasi PABU 0002 dapat dilihat dalam gambar10 berikut :

Gambar 10.:  
Lokasi PABU 0002



Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Kota Semarang (2008).

Pilar batas darat ini dapat dipakai sebagai titik acuan dalam menegaskan batas wilayah di laut antara Daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal. Hal ini juga sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 bahwa tanda batas yang terletak di darat pada



koordinat batas antar daerah kabupaten dan kota yang digunakan sebagai titik acuan untuk penegasan batas di laut.

#### **3.1.4.2. Tahap Pekerjaan Lapangan**

Setelah pilar titik acuan dibangun, maka dilakukan pengukuran-pengukuran sebagai berikut:

1. Pengukuran jarak dalam meter (Dm) dan azimuth (Az) antara titik acuan dan titik awal dengan memakai theodolit, dapat sejenis *Total Station*, atau pada titik Acuan dan Titik awal ditentukan posisinya dengan GPS,<sup>113</sup> sehingga dapat dicari jarak dan azimuth antara kedua titik tersebut dengan software yang ada dalam alat GPS. Titik Acuan adalah PABU 0002 dengan koordinat 06°56'57, 60345 LS – 110°17'33,20204 BT. Penentuan posisi dengan GPS navigasi di dua titik ini dilakukan untuk memperoleh jarak dan azimuth, dengan titik Acuan sebagai “waypoint” dalam pengukuran GPS.
2. Pengukuran teliti titik acuan dengan GPS tipe geodetik dilakukan berdasarkan metode diferensial dengan memakai minimal 2 alat GPS. Alat yang kedua diletakkan pada jaringan GPS nasional terdekat, sehingga koordinat geodetik titik Acuan dapat dihitung

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

dalam sistem koordinat nasional (Datum Geodesi Nasional Indonesia, DGNI 1995) agar konsisten dengan sistem perpetaan.<sup>114</sup>

3. Membuat peta sketsa dari letak titik acuan dan titik-titik bantu, dengan kontur dan garis pantai sebagai bagian dokumen arsip dari titik awal dan titik acuan. Kontur dapat dibuat dengan pengukuran situasi dengan theodolit.<sup>115</sup>

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip sama jarak kasus batas wilayah laut antara daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal adalah kedua daerah dibatasi oleh sungai (Kali Plumbor) dan Sungai (Kali Slembang) yang sama-sama bermuara ke Laut Jawa. Sungai (Kali Plumbor) secara administratif masuk wilayah Kota Semarang. Sungai (Kali Slembang) secara administratif masuk wilayah Kabupaten Kendal.

Untuk itu daerah Kota Semarang maupun Kabupaten Kendal dapat menarik garis dasar lurus untuk menutup mulut sungai mereka masing-masing terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia bahwa penetapan batas perairan pedalaman dalam perairan kepulauan dilakukan dengan menggunakan Garis Pangkal Biasa, Garis Pangkal

---

<sup>114</sup> *Loc.Cit.*

<sup>115</sup> *Loc.Cit.*

Lurus, dan Garis Penutup di Muara Sungai, Terusan, atau Kuala, di Teluk dan di Pelabuhan yang terdapat pada pantai pulau-pulau yang menghadap perairan kepulauan. Mulut sungai yang menghadap perairan kepulauan termasuk perairan pedalaman. Perairan Pedalaman bagi suatu negara kepulauan (seperti Indonesia) adalah perairan yang terletak pada sisi darat dari garis-garis penutup pada mulut sungai, teluk atau pelabuhan yang terletak di perairan kepulauan. Untuk penarikan 4 mil laut ke arah laut (perairan kepulauan), masing-masing daerah dapat menggabungkan garis dasar lurus dan atau garis dasar normal. Sehingga sisa 4 mil laut sampai 12 mil laut menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah.

Tersedianya data dari hasil pengukuran, maka akan diketahui titik koordinat di lapangan. Sehingga jelas bahwa batas wilayah di laut tidak ada patok yang ditempatkan di laut, melainkan titik koordinat yang tergambar dalam peta. Setelah pilar titik acuan selesai ditanam, perlu di sosialisasi kepada masyarakat di sekitarnya tentang keberadaan pilar dan fungsinya. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari interpretasi titik acuan sebagai titik batas antara 2 desa di pantai, karena dikira titik batas antara desa yang berdampingan.

#### **3.1.4.3. Penggambaran Peta Batas**

Dari hasil penegasan batas wilayah di laut antara daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal kemudian membuat peta batas dengan ukuran 1 : 100.000 untuk batas daerah Kabupaten Kendal 1 : 50.000 untuk batas daerah Kota Semarang. Skala tersebut adalah skala minimal. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 bahwa Peta batas daerah menggunakan skala minimal 1 : 100.000 untuk Kabupaten dan 1 : 50.000 untuk Kota.

Seperti halnya dalam penegasan batas wilayah darat antara daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal memakai peta dengan ukuran yang lebih besar yaitu 1 : 35.000. Oleh karena itu peta batas wilayah laut antara daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal dapat juga memakai ukuran skala 1: 35.000. Sehingga nantinya daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal diharapkan memiliki memiliki peta batas daerah di wilayah darat dan wilayah laut dari hasil penegasannya.

Pembuatan peta batas wilayah darat dan wilayah laut secara terpisah dalam artian dibuat tersendiri dan tidak menjadi satu rangkaian kegiatan dalam pelaksanaannya hanya membuat lama proses penegasan batas wilayah daerah. Hal ini juga akan membuat inefisiensi anggaran Pemerintah Daerah masing-masing dalam menegaskan wilayah daerahnya. Karena pada dasarnya peta batas daerah mencakup

batas daerah di darat dan di laut.<sup>116</sup> Untuk itu lebih efisien waktu dan anggaran maka proses penegasan batas wilayah darat dan wilayah laut Kota Semarang dan Kabupaten Kendal dijadikan satu kegiatan. Sehingga peta yang dihasilkan cukup satu peta yang memuat peta batas wilayah darat dan wilayah laut.

Dari peta yang dibuat dari hasil penegasan batas daerah dapat dijadikan sarana/acuan bagi penyajian informasi geografis dengan tema-tema tertentu lainnya. Informasi yang dapat ditampilkan seperti:

1. Hipsografi (tinggi rendahnya medan yang dalam peta digambar dengan kontur atau digambar secara 3-dimensi).
2. Hidrografi/unsur-unsur air (laut, sungai, danau, dan sebagainya);
3. Cakupan lahan (luas vegetasi, sawah, ladang, dan sebagainya);
4. Unsur-unsur buatan (kota, desa, bandar udara, bendungan, jalan raya, kereta api dan sebagainya);
5. Nama-nama unsur geografi (nama-nama laut, pulau, gunung, sungai, tanjung, pelabuhan, teluk, dan sebagainya, disebut juga dengan istilah toponym atau nama geografis);
6. Batas-batas di darat dan di laut (batas-batas administrasi pemerintahan: Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa, kawasan lindung, kawasan konservasi).

---

<sup>116</sup> Pasal 17 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Peta-peta yang menyajikan berbagai informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pemerintah daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal merencanakan pembangunannya. Selain itu dengan peta dapat diketahui batas wilayah masing dengan jelas baik di darat maupun di laut, sebagai acuan menata ruang wilayahnya masing-masing, khususnya wilayah perbatasan. Jadi penegasan batas wilayah antar daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal tidak sekedar untuk mengetahui batas wilayahnya saja khususnya di wilayah laut, tetapi juga sebagai acuan dalam pembangunan daerah masing-masing.

#### **3.1.5. Pengaturan Batas Laut Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal**

Pada prinsipnya penegasan batas laut antar daerah mengikuti peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Sebagaimana kegiatan penegasan batas daerah di darat Kota Semarang dan Kabupaten Kendal dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah, maka penegasan batas di laut juga semestinya dilakukan oleh Tim Penegasan Batas Daerah. Kegiatan dari kedua tim yang berbeda tersebut pada prinsipnya merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan bersama-sama dalam menegaskan batas wilayah daerah.

Hasil dari kerjasama teknis pekerjaan menegaskan batas wilayah daerah dituangkan dalam berbagai berita acara. Berita acara dalam penegasan batas wilayah daerah terdiri :

1. Berita Acara Pelacakan Batas Daerah.
2. Berita Acara Data Survei Pelacakan Lokasi Pemasangan Pilar Batas Daerah.
3. Berita Acara Penetapan / Pemasangan Pilar Batas Daerah.

Berita acara penegasan batas wilayah daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal ditandatangani oleh Ketua Tim Penegasan Batas Daerah masing-masing dan Ketua Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Provinsi. Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Provinsi sebagai koordinasi dan fasilitator.

Berita acara hasil penegasan batas wilayah daerah merupakan bentuk perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak daerah. Dengan ditandatangani berita-acara penegasan batas wilayah oleh masing-masing Ketua Tim Penegasan Batas Daerah berarti bahwa telah terjadi perjanjian. Seperti dalam kasus perjanjian batas wilayah antar negara, hasil perjanjian batas wilayah diratifikasi oleh masing-masing negara. Bentuk ratifikasi semacam Undang-Undang (UU) dan Keputusan Presiden (Kepres). Perjanjian batas wilayah antar daerah tidak perlu dibuat semacam ratifikasi oleh masing-masing daerah, karena belum lazim digunakan. Misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau

Keputusan Kepala Daerah masing-masing daerah, namun cukup dibuat Peraturan Bersama yang dibuat oleh kedua daerah. Perjanjian batas wilayah antar daerah yang dibuat dalam Perda atau Keputusan Kepala Daerah belum lazim digunakan. Selain itu proses pembuatan Perda memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Jika dibuat dalam Keputusan Kepala Daerah, maka harus dibuat Perda terlebih dahulu, karena Keputusan Kepala Daerah dibuat untuk melaksanakan Perda.

Peraturan Bersama sebagai bentuk perjanjian batas wilayah di laut memuat persetujuan atas batas wilayah di laut masing-masing daerah. Teknis pekerjaan penegasan batas wilayah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh ke dua Ketua Tim Penegasan Batas Daerah. Dengan ditandatanganinya Peraturan Bersama perjanjian batas wilayah di laut oleh ke dua Pimpinan Daerah maka batas wilayah di laut telah berlaku mengikat oleh ke dua daerah. Peraturan bersama dibuat dengan alasan lebih praktis dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar seperti pembuatan Peraturan Daerah. Peraturan bersama ini sangat memungkinkan untuk dirubah karena batas yang telah dibuat sudah tidak sesuai dengan kondisinya.

Kondisi batas wilayah laut relatif dinamis, di mana dapat mempengaruhi lokasi titik awal maupun titik-titik menonjol (*salient points*) dapat berubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisinya. Sebagaimana diketahui bahwa titik awal maupun titik-titik menonjol



(*salient points*) merupakan dasar dalam menentukan batas wilayah di laut ke dua daerah. Kondisi yang relatif dinamis dapat disebabkan oleh faktor alam maupun ulah manusia. Faktor alam dapat terjadi karena tsunami, abrasi, gelombang pasang, banjir rob, pasang surut maupun pemanasan global. Aktivitas ulah manusia terjadi karena penambangan karang dan pasir pantai, penggundulan hutan mangrove, reklamasi pantai.

Untuk menguatkan Peraturan Bersama perlu dimintakan persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Menteri Dalam Negeri. Perlu dipahami mengapa perjanjian batas wilayah antar daerah perlu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Menteri Dalam Negeri. Pertama, bahwa objek yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak daerah adalah berbentuk wilayah. Menurut Robinson Tarigan yang membedakan bentuk wilayah salah satunya berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan. Di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintahan seperti Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan dusun.<sup>117</sup> Secara hiraraki kekuasaan pemerintah Kabupaten/Kota merupakan wilayah dari pemerintah Provinsi. Wilayah Provinsi merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan

---

<sup>117</sup> Robinson Tarigan, *Loc.Cit.* hlm. 115-116.

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sebagai bagian dari NKRI, maka sepatutnya bentuk perjanjian batas wilayah di laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal yang dibuat dan disepakati oleh kedua daerah, mendapat persetujuan dari pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri, meskipun batas wilayah laut tersebut merupakan batas kewenangan.

Kedua, untuk memperkuat NKRI. Maksudnya untuk mewujudkan pandangan bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. Artinya, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di dalam kesatuan pemerintahan lokal ataupun regional yaitu daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu batas wilayah laut daerah merupakan batas kewenangan, bukan batas kedaulatan mutlak milik daerah. Batas kewenangan identik hak berdaulat dalam istilah bahasa Inggris disebut *souverign right*, sedangkan kedaulatan mutlak identik dengan *soverignty*.

Seperti halnya batas wilayah di darat dan di laut antar daerah, menurut Pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006, bahwa keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri. Dengan ditetapkan oleh Mendagri maka bentuk perjanjian batas wilayah antar daerah berbentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk itu penegasan batas daerah selalu menunggu Keputusan Mendagri, setelah diadakakan hasil verifikasi Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat. Bentuk perjanjian batas wilayah daerah di laut yang nantinya berupa Peraturan Bersama ke dua daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Mendagri mengenai batas daerah terdiri hasil-hasil berita acara penegasan batas daerah di laut, daftar koordinat batas wilayah laut dan peta batas daerah di laut sebagai lampiran.

#### **3.1.6. Penegasan Batas Wilayah Pesisir Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal**

Tepat bila menekankan kepastian batas wilayah pesisir menurut kewenangan daerah memakai pendekatan administratif. Dilihat dari pendekatan secara administratif, bahwa batas wilayah pesisir meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Untuk kewenangan Kabupaten/Kota memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi 12 mil laut.

Kepastian batas wilayah pesisir secara administratif dapat ditentukan bila batas wilayah di darat dan batas wilayah di laut sudah ditentukan terlebih dahulu dengan pekerjaan penegasan batas wilayah. Sehingga pada hakikatnya penegasan batas wilayah pesisir antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal merupakan kegiatan penegasan batas wilayah di darat dan di laut antar ke dua daerah. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bahwa wilayah pesisir meliputi ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih teras pengaruh lautnya. Dalam implementasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi. Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan.

Menentukan batas wilayah di darat pesisir Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal yang mencakup wilayah administrasi kecamatan dapat dilihat dari hasil penegasan batas wilayah di darat. Sedangkan batas wilayah di laut bisa dilihat setelah hasil penegasan

batas wilayah di laut dilakukan. Laut yang dimaksud adalah laut Jawa. Laut Jawa termasuk dalam perairan kepulauan. Perairan kepulauan yaitu perairan yang terletak di sebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan. Hasil penegasan batas wilayah termasuk di dalamnya membuat peta. Dibuatnya peta batas wilayah antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal baik di darat maupun di laut akan mempermudah mengetahui batas wilayah pesisir antar ke dua daerah.

Dilihat dari hasil penegasan batas wilayah di darat antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal bahwa untuk wilayah pesisir kecamatan di Kota Semarang yaitu Kecamatan Tugu. Sedangkan wilayah pesisir kecamatan di Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Kaliwungu. Untuk wilayah laut selebar 4 mil laut dari pesisir Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal belum ditemukan batas koordinatnya, karena penegasan batas wilayah di laut antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal belum dilakukan.

### **3.2. Konsep Pemecahan Masalah Batas Wilayah Laut antar Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai Upaya Penataan Ruang Wilayah Pesisir**

Untuk menyelesaikan suatu masalah tentunya perlu diketahui penyebabnya terlebih dahulu. Seperti halnya dengan batas wilayah laut antar Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal, kemungkinan terjadi

masalah batas wilayah di laut antar ke dua daerah sangat terbuka. Masalah batas wilayah di laut antara ke dua daerah dapat terjadi karena tumpang tindih klaim batas maupun belum ada pengaturan batas yang jelas. Berbagai kemungkinan lain masalah batas wilayah di laut antar ke dua daerah karena agenda pembangunan kedua daerah yang berbeda yang pada akhirnya menimbulkan masalah batas wilayah laut. Misalnya penataan tata ruang wilayah di laut masing-masing ke dua daerah yang berbenturan atau tidak sinergi dalam bentuk perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Aktivitas ke dua daerah seperti penggundulan hutan mangrove, reklamasi pantai yang pada akhirnya juga dapat menimbulkan masalah mengenai batas wilayah laut ke dua daerah.

Dari uraian di atas dikemukakan konsep pemecahan masalah batas wilayah laut antara ke dua daerah yang sifatnya futuristik artinya memecahkan masalah yang mungkin timbul pada saat mendatang. Konsep pemecahan masalah tidak bisa dilepaskan dari dua hal yakni teknis penegasan dan bentuk pengaturan batas wilayah laut. Kedua hal yaitu teknis penegasan dan bentuk pengaturannya merupakan satu kesatuan, karena pengaturan batas wilayah laut merupakan hasil dari teknis penegasan batas wilayah laut. Dari dua hal tersebut dapat diketahui untuk mengetahui suatu masalah yang berkaitan dengan batas wilayah laut antar kedua daerah.

### **3.2.1. Pemecahan Masalah Batas Wilayah Laut dari Segi Teknis Penegasan**

Dari teknis penegasan batas wilayah laut, dikemukakan beberapa masalah ke dua daerah dalam menegaskan batas wilayah laut kemudian bagaimana konsep pemecahannya. Pertama, penegasan batas wilayah di darat belum selesai, sehingga penegasan batas wilayah di laut belum bisa dilakukan. Belum dilakukannya penegasan batas wilayah di laut sangat memungkinkan terjadinya klaim lebar kewenangan laut masing-masing daerah seluas 4 mil laut di batas ke dua daerah.

Kedua, Tim Penegasan Batas Daerah ke dua daerah yang ada dibentuk untuk tujuan menegaskan batas wilayah di darat. Sebagaimana diketahui bahwa penegasan batas wilayah di darat antara daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal dilakukan oleh Ketua Tim Penegasan Batas Daerah masing-masing dan Ketua Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Provinsi. Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Provinsi sebagai koordinasi dan fasilitator. Dengan merevisi Tim Penegasan Batas Daerah ke dua daerah, nantinya penegasan batas wilayah di laut ke dua daerah dapat dilaksanakan. Dalam menegaskan batas wilayah laut antara ke dua daerah (Kota Semarang dan Kabupaten Kendal), Pemerintah Provinsi melalui Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat

Provinsi menjadi koordinator dan fasilitator. Karena menjadi fasilitator dan koordinator dalam menegaskan batas wilayah laut ke dua daerah, maka secara teknis Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Provinsi dapat menjadi penengah jika terdapat permasalahan dalam pekerjaan penegasan di lapangan. Menjadi penengah memecahkan masalah penegasan batas wilayah laut bagi Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Provinsi, artinya bertindak sebagai mediator.

Ketiga, dalam menegaskan batas wilayah di laut membutuhkan peralatan yang tidak sederhana. Misalnya mengamati (*survey*) untuk mengetahui pasang surut laut menggunakan theodolit, mengetahui posisi koordinat suatu lokasi (misal titik awal, *salient points*, titik batas) dengan menggunakan *General Position System (GPS)*, maupun pekerjaan *survey* lainnya. Peralatan tersebut relatif mahal dan belum tentu tim teknis ke dua daerah maupun dari Provinsi memiliki dan dapat menjalankan peralatan tersebut. Untuk itu, dalam pelaksanaan *survey* tersebut sebagaimana pengalaman penegasan batas wilayah darat antara daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal mempercayakan pihak ketiga yaitu Topdam IV Diponegoro sebagai pelaksana *survey* dan pekerjaan teknis lainnya seperti pemasangan pilar acuan titik acuan. Kedua daerah dapat juga mengkontrakkan pekerjaan *survey* ini kepada dunia usaha atau instansi pemerintah pusat, seperti Bakosurtanal dan/atau Dishidros-AL (sekarang Janhidros/Jawatan



Hidro-Oceanografi TNI AL) atau perguruan tinggi. Anggaran pekerjaan lapangan menjadi tanggung jawab daerah yang bersangkutan dapat dibebankan oleh Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal.

Pihak pelaksana *survey* bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepadanya yaitu *survey* di lapangan sampai dengan pembuatan peta batas bersama dengan Tim Teknis Penegasan Batas Daerah. Survey di lapangan meliputi pelacakan batas, pemasangan pilar di titik acuan, penentuan titik awal, *salient points* dan titik batas dan pengukuran dan penentuan batas. Setelah pekerjaan penegasan di lapangan sampai pembuatan peta maka kedua Tim Teknis Penegasan Batas Daerah membuat kesepakatan bersama berbentuk Peraturan Bersama. Seperti halnya kasus penegasan batas wilayah di darat antara daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal terlalu lama menunggu verifikasi dari Tim Teknis Penegasan Batas Pusat yaitu permintaan persetujuan ke Mendagri diserahkan oleh Pelaksana *Survey*. Untuk itu sebaiknya pelaksana *survey* cukup melaksanakan pekerjaan sampai tahap pembuatan peta batas. Kemudian Tim Teknis Penegasan Batas menyampaikan laporan berupa Berita Acara penegasan, Peraturan Bersama dan peta kepada masing-masing Kepala Daerah. Kemudian kedua Kepala Daerah meminta persetujuan kepada Mendagri untuk ditegaskan dalam bentuk Permendagri.

### **3.2.2. Pemecahan Masalah Batas Wilayah Laut dari Segi Bentuk Pengaturan**

Hasil pengaturan dari penegasan batas wilayah laut antar ke dua daerah berupa Peraturan Bersama. Peraturan Bersama ini akan berlaku mengikat antara ke dua daerah sejak ditandatangani. Peraturan Bersama dikuatkan lagi dengan Permendagri. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 bahwa keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemecahan masalah batas wilayah laut dari segi bentuk pengaturan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu;

1. Pemecahan masalah sebelum pengaturan batas wilayah laut ditegaskan.
2. Pemecahan masalah ketika pengaturan batas wilayah laut ditegaskan.
3. Pemecahan masalah setelah pengaturan batas wilayah laut ditegaskan.

Pertama, berbagai hal yang menyebabkan ke dua daerah belum menegaskan batas wilayah laut. Belum dilakukannya penegasan batas wilayah laut antara ke dua daerah, maka akan terbuka terjadi sengketa batas wilayah laut antar ke dua daerah. Untuk menghindari konflik atau sengketa sebelum ditegaskannya batas wilayah laut antara ke dua

daerah, ke dua daerah dapat membuat *MoU* (*Memoradum of Understanding*). Alasan dibuat *Memorandum of understanding* karena *MoU* tidak hanya dibuat oleh badan hukum privat semata-mata, tetapi juga oleh badan hukum publik.<sup>118</sup> Pemerintah ke dua daerah merupakan badan hukum publik.

Pada prinsipnya, setiap *memorandum of understanding* yang dibuat oleh para pihak, tentunya mempunyai tujuan tertentu. Munir Fuady telah mengemukakan tujuan *memorandum of understanding*. Tujuan *memorandum of understanding* adalah:

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement* nantinya, dalam hal objeknya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan apakah *deal* kerjasama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah *memorandum of understanding* yang mudah dibatalkan.
2. Penandatanganan perjanjian batas wilayah di laut masih lama karena masih dilakukuan negosiasi. Karena itu, daripada tidak ada ikatan apa-apa sebelum ditandatangani perjanjian batas wilayah di laut, dibuatlah *memorandum of understanding* yang akan berlaku sementara waktu.

---

<sup>118</sup> Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 53.

3. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal penandatanganan suatu perjanjian batas wilayah di laut, sehingga untuk sementara dibuatlah *memorandum of understanding*.
4. *Memorandum of understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif (Kepala Daerah). Sehingga untuk perjanjian batas wilayah di laut yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasi khusus oleh staf-staf yang lebih rendah tetapi lebih menguasai secara teknis (Tim Teknis Penegasan Batas ke dua Daerah).

Menurut I. Nyoman Sudana, dkk., mengartikan *memorandum of understanding* sebagai suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti diikuti perjanjian lainnya.<sup>119</sup> Artinya sebelum ada perjanjian batas wilayah laut antar ke dua daerah, masing-masing daerah sepakat untuk menahan diri untuk tidak menarik batas wilayah laut sejauh 4 mil laut secara sepihak. *MoU* merupakan perjanjian yang dibuat atas kerja sama ke dua daerah. Apabila telah terjadi persesuaian pernyataan kehendak dan telah ditandatangani kerjasama itu, maka *memorandum of understanding* telah mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan. Artinya bahwa *memorandum of understanding* mempunyai kekuatan mengikat. Akan tetapi dalam praktiknya, apabila salah pihak tidak melaksanakan isi *memorandum of understanding*, Apabila terjadi

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm 47.

penyimpangan terhadap MoU tersebut maka dapat diselesaikan dengan musyawarah dan Keputusan Gubernur.

Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 50 Tahun 2007, apabila kerja sama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:

- a. musyawarah; atau
- b. Keputusan Gubernur.

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat. Baru setelah ke dua daerah mengadakan penegasan batas wilayah laut, dapat dibuat perjanjian batas ke dua daerah yang berbentuk Peraturan Bersama.

Kedua, secara tegas pengaturan baik teknis penegasan batas wilayah laut diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2006. Dalam pelaksanaan penegasan batas wilayah laut antar daerah memungkinkan timbulnya perselisihan. Untuk memecahan masalah pengaturan batas wilayah laut antar ke dua daerah ketika penegasan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk memfasilitasi penyelesaian. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 bahwa penyelesaian perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh Gubernur. Kewenangan Provinsi melalui Gubernur tentunya tidak

dilakukan oleh Gubernur sendiri, melainkan oleh Tim Teknis Penegasan Batas Daerah Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.

Ketiga, sengketa batas wilayah laut antar ke dua daerah masih terbuka meskipun telah dilakukan penegasan oleh ke dua daerah. Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa batas wilayah di laut antar ke dua daerah setelah penegasan batas wilayah laut antar ke dua daerah dilakukan. Artinya meskipun telah memiliki Peraturan Bersama mengenai batas wilayah laut antar ke dua daerah dan Permendagri tentang batas wilayah laut ke dua daerah, masih memungkinkan terjadinya sengketa. Sengketa tersebut bisa saja terjadi karena faktor alam maupun aktivitas manusia. Faktor alam misalnya terjadinya perubahan kondisi geografis yang dapat menyebabkan batas wilayah laut sudah tidak sesuai. Misalnya karena tsunami, abrasi, gelombang pasang, banjir rob, pasang surut maupun pemanasan global. Sedangkan faktor aktivitas manusia karena agenda pembangunan kedua daerah yang berbeda yang pada akhirnya menimbulkan masalah batas wilayah laut. Misalnya penataan tata ruang wilayah di laut masing-masing ke dua daerah yang berbenturan atau tidak sinergi dalam bentuk perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Aktivitas ke dua daerah seperti penggundulan hutan mangrove, reklamasi pantai yang pada akhirnya juga dapat menimbulkan masalah mengenai batas wilayah laut ke dua daerah.

Untuk memecahkan masalah adanya sengketa batas wilayah laut yang dapat berubah karena dari faktor alam, ke dua daerah dapat melakukan penegasan kembali batas wilayah laut yang disesuaikan dengan kondisinya. Dalam melakukan penegasan tersebut tentunya mengikuti peraturan yang berlaku. Tuntutan penegasan kembali batas wilayah laut karena adanya aktivitas manusia tentunya tidak dibenarkan. Semestinya ke dua daerah dalam melaksanakan aktivitasnya memperhatikan batas wilayah yang sudah ditegaskan. Hasil dari penegasan kembali batas wilayah laut tentunya mengubah Peraturan Bersama penegasan batas wilayah laut sebelumnya maupun mengubah Permendagri sebelumnya.

### **3.3. Konsep Kerjasama Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai Upaya Penataan Ruang Wilayah Pesisir**

#### **3.3.1. Gambaran Umum Kota Semarang**

Secara geografis, Kota Semarang terletak antara garis  $6^{\circ} 50' - 7^{\circ} 10'$  LS Selatan (LS) dan garis  $109^{\circ} 35' - 110^{\circ} 50'$  Bujur Timur (BT). Batas wilayah perencanaan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang.
- Sebelah Timur : Kabupaten Demak.

- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal.<sup>120</sup>

Wilayah perencanaan Kota Semarang mencakup 16 (enam belas) Kecamatan dengan luas 37.360,947 ha, yang terdiri dari:

- a. Kecamatan Semarang Tengah seluas 604,997 ha;
- b. Kecamatan Semarang Utara seluas 1.135,275 ha;
- c. Kecamatan Semarang Timur seluas 770,255 ha;
- d. Kecamatan Gayamsari seluas 636,560 ha;
- e. Kecamatan Genuk seluas 2.738,442 ha;
- f. Kecamatan Pedurungan seluas 1.984,948 ha;
- g. Kecamatan Semarang Selatan seluas 848,046 ha;
- h. Kecamatan Candisari seluas 555,512 ha;
- i. Kecamatan Gajahmungkur seluas 765,004 ha;
- j. Kecamatan Tembalang seluas 4.420,057 ha;
- k. Kecamatan Banyumanik seluas 2.509,084 ha;
- l. Kecamatan Gunungpati seluas 5.399,085 ha;
- m. Kecamatan Semarang Barat seluas 2.386,473 ha;
- n. Kecamatan Mijen seluas 6.213,266 ha;
- o. Kecamatan Ngaliyan seluas 3.260,584 ha;
- p. Kecamatan Tugu seluas 3.133,359 ha.<sup>121</sup>

Secara administratif terbagi menjadi 4 (empat) wilayah kecamatan pesisir Kota Semarang yaitu Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk.

Kota Semarang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950), dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kodya Dati II Semarang, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Wilayah

---

<sup>120</sup> Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Semarang Tahun 2000 - 2010.

<sup>121</sup> Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Kota Semarang Tahun 2000 - 2010.



Kecamatan di Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 84).<sup>122</sup>

### 3.3.2. Gambaran Umum Kabupaten Kendal

Kendal merupakan wilayah yang secara administratif termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini terletak di pesisir Utara Jawa Tengah, dan termasuk salah satu wilayah di Pulau Jawa yang dilewati oleh jalur Pantai Utara Pulau Jawa (pantura) sehingga daerah ini sangat ramai dengan lalu lintas yang cukup padat.

Secara geografis, Kabupaten Kendal terletak pada 109 ° 40' – 110 ° 18' BT dan 6 ° 32' – 7 ° 24' LS, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kota Semarang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung
- Sebelah Barat : Kabupaten Batang

Kabupaten Kendal memiliki 20 kecamatan, 265 desa, dan 20 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 1.002,23 km<sup>2</sup>. Dua puluh wilayah kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Plantungan,

---

<sup>122</sup> Rizki Addiwiansyah, "Pengaturan Reklamasi Pantai Marina Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 di Kota Semarang", *Laporan Kegiatan*, (Semarang; Fakultas Hukum Undip, 2005), hlm. 49 diambil dari Sumber data Biro Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2003.

Sukorejo, Pegeruyung, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu Utara, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Pegandon, Ngampel, Gumuh, Ringinarum, Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon serta Kota Kendal.

Di wilayah pesisir Kabupaten Kendal yang memiliki pantai sepanjang 43,5 km (BPS, 2005), secara administratif terbagi menjadi 7 (tujuh) Kecamatan wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Kaliwungu (47,73 km<sup>2</sup>), Kecamatan Brangsong (34,54 km<sup>2</sup>), Kecamatan Rowosari (32,64 km<sup>2</sup>), Kecamatan Cepiring (38,98 km<sup>2</sup>), Kecamatan Kangkung (30,08 km<sup>2</sup>), Kecamatan Patebon (44,30 km<sup>2</sup>) serta Kota Kendal (27,49 km<sup>2</sup>).

### **3.3.3. Pengaturan Tata Ruang Daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal secara Umum**

#### **3.3.3.1. Pengaturan Tata Ruang Daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal menurut Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota**

Sampai saat ini pengaturan tata ruang secara umum Kota Semarang dan Kabupaten Kendal diatur dalam Peraturan Daerah Tata Ruang Daerah masing-masing. Pengaturan tata ruang merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 merupakan induk pengaturan penataan ruang baik di darat, di laut maupun di udara.

Tujuannya adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi. Menurut Robinson Tarigan, wilayah dapat dilihat sebagai suatu ruang pada permukaan bumi.<sup>123</sup> Pengertian bumi adalah menunjuk pada tempat atau lokasi yang dilihat secara horisontal dan vertikal. Di dalamnya termasuk apa yang ada pada permukaan bumi, yang ada di bawah permukaan bumi dan yang ada di atas permukaan bumi. Demikian juga, wilayah pesisir termasuk bagian sub wilayah ruang pada permukaan bumi.

#### **3.3.3.1.1. Pengaturan Tata Ruang Daerah Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Perda Tata Ruang Kota Semarang yang berlaku saat ini adalah Perda Kota Semarang Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 -2010. RTRW Kota Semarang dibuat masih mengacu kepada ketentuan undang-undang penataan ruang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang Rencana. Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang adalah rencana pengembangan Kota Semarang yang disiapkan secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Kota Semarang yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi

---

<sup>123</sup> Robinson Tarigan, *Op.Cit.* hlm. 111.

wilayah kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota. Bagian Wilayah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota. Setiap penataan ruang di BWK diatur secara detail dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). RDTRK Kota Semarang berupa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010.

Wilayah perencanaan RTRW Kota Semarang dibagi dalam 10 (sepuluh) BWK sebagai berikut :

1. Bagian Wilayah Kota I (Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur dan Semarang Selatan) dengan luas 2.223,298 ha;
2. Bagian Wilayah Kota II (Kecamatan Candisari dan Gajahmungkur) dengan luas 1.320,516 ha;
3. Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Utara) dengan luas 3.521,748 ha;
4. Bagian Wilayah Kota IV (Kecamatan Genuk) dengan luas 2.738,442 ha;

5. Bagian Wilayah Kota V (Kecamatan Pedurungan dan Gayamsari) dengan luas 2.621,508 ha;
6. Bagian Wilayah Kota VI (Kecamatan Tembalang) dengan luas 4.420,057 ha;
7. Bagian Wilayah Kota VII (Kecamatan Banyumanik) dengan luas 2.509,084 ha;
8. Bagian Wilayah Kota VIII (Kecamatan Gunungpati) dengan luas 5.399,085 ha;
9. Bagian Wilayah Kota IX (Kecamatan Mijen) dengan luas 6.213,266 ha;
10. Bagian Wilayah Kota X (Kecamatan Ngaliyan dan Tugu) dengan luas 6.393,943 ha.

Bagian Wilayah Kota Semarang yang merupakan wilayah pesisir adalah Kecamatan Tugu masuk BWK X, Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara masuk BWK III dan Kecamatan Genuk masuk BWK IV. Bagian Wilayah Kota Semarang yang memiliki batas dengan Kabupaten Kendal adalah BWK X (Kecamatan Ngaliyan dan Tugu). Ruang lingkup RDTRK BWK X meliputi wilayah perencanaan, batas-batas wilayah perencanaan dan komponen perencanaan. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang batasannya ditentukan berdasarkan berdasarkan tujuan perencanaan. Wilayah Perencanaan RDTRK BWK X meliputi: Kecamatan Ngaliyan: 3.260,584 ha dan

Kecamatan Tugu: 3.133,359 ha. Wilayah Perencanaan BWK X terdiri dari Kecamatan Ngaliyan yang mencakup 10 kelurahan dan Kecamatan Tugu yang mencakup 7 kelurahan. Kecamatan Tugu merupakan kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal.

Kecamatan Tugu terdiri dari 7 Kelurahan yaitu:

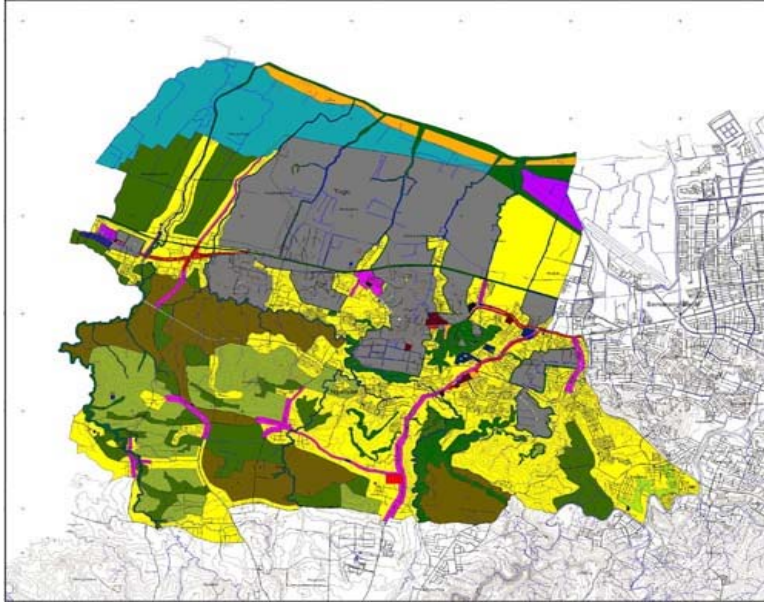
1. Kelurahan Jerakah dengan luas 153,425 Ha;
2. Kelurahan Tugurejo dengan luas 855,838 Ha;
3. Kelurahan Karanganyar dengan luas 429,904 Ha;
4. Kelurahan Randugarut dengan luas 465,493 Ha;
5. Kelurahan Mangkang Wetan dengan luas 346,510 Ha;
6. Kelurahan Mangkang Kulon dengan luas 399,819 Ha;
7. Kelurahan Mangunharjo dengan luas 482,370 Ha.

Batas-batas wilayah perencanaan RDTRK BWK X adalah :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa.
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Mijen.
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Barat.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Peta batas wilayah perencanaan RDTRK BWK X dilihat di gambar 11 berikut:

Gambar 11  
Peta Tata Guna Lahan Bagian Wilayah Kota ( Bwk X)  
( Kecamatan Ngaliyan Dan Kecamatan Tugu )



Legenda :



Sumber: [http://semarang.go.id/cms/index.php?option=com\\_wrapper&Itemid=123](http://semarang.go.id/cms/index.php?option=com_wrapper&Itemid=123)  
(tanggal 10 September 2008)

Dari peta di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar tata guna lahan BWK X yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal merupakan area Tambak dan Pertanian Lahan Basah. Komponen perencanaan RDTRK BWK X meliputi :

- a. Rencana Struktur Tata Ruang Kota;
- b. Rencana Kependudukan;
- c. Rencana Pengembangan Kawasan Potensial;
- d. Rencana Pemanfaatan Lahan;
- e. Rencana Sistem Jaringan Transportasi;
- f. Rencana Kebutuhan Fasilitas;



- g. Rencana Jaringan Utilitas;
- h. Rencana Perpetakan Bangunan;
- i. Rencana Kepadatan Bangunan;
- j. Rencana Ketinggian Bangunan;
- k. Rencana Garis Sempadan;
- l. Rencana Penanganan Bangunan.

Komponen perencanaan RDTRK BWK X di Kecamatan Tugu masuk dalam Blok 3.1 dan 3.2. Penentuan ruang di Blok 3.1 adalah sebagai berikut:

1. Permukiman	42,700	Ha;
2. Perdagangan dan Jasa	8,115	Ha;
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	3,184	Ha;
4. Perkantoran	1,279	Ha;
5. Pendidikan	2,157	Ha;
6. Kesehatan	0,533	Ha;
7. Peribadatan	0,256	Ha;
8. Olahraga dan Rekreasi	42,717	Ha;
9. Pelayanan Umum	1,588	Ha;
10. Permukiman Industri	23,467	Ha;
11. Industri	205,594	Ha;
12. Tambak	243,069	Ha;
13. Terminal	12,942	Ha;
14. Stasiun Kereta Api	5,230	Ha.

Penentuan ruang di Blok 3.2. adalah sebagai berikut :

1. Permukiman	141,318	Ha;
2. Perdagangan dan Jasa	4,022	Ha;
3. Campuran Perdagangan dan Jasa, Permukiman	30,558	Ha;
4. Perkantoran	2,684	Ha;
5. Pendidikan	1,920	Ha;

6. Kesehatan	0,356	Ha;
7. Peribadatan	0,220	Ha;
8. Olahraga dan Rekreasi	62,557	Ha;
9. Pelayanan Umum	3,881	Ha;
10. Permukiman Industri	88,552	Ha;
11. Tambak	197,552	Ha;
12. Industri	814,018	Ha;
13. Bandar Udara	49,296	Ha;
14. Makam	6,259	Ha.

Ketentuan rencana garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut :

1. Garis Sempadan pantai alami ditetapkan berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
2. Garis Sempadan pantai buatan atau hasil reklamasi ditetapkan berjarak 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
3. Garis Sempadan pantai ditetapkan sebagai kawasan lindung

Dilihat dari penataan ruang berdasar fungsi utama menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka peta dan penentuan blok di Kecamatan Tugu memiliki kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung tercermin dari pengaturan sempadan pantai. Kawasan budi daya tercermin dari pemakaian blok yang diperuntukkan untuk dibudidayakan atas kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan seperti industri, tambak, pendidikan dan lain-lain.

Dari RDTRK BWK X diketahui mengatur ruang yang meliputi ruang daratan dan ruang udara. Sebagaimana dalam Pasal 1 huruf d

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Tahun 2000–2010 bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang di Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 belum mencerminkan kesatuan antara ruang darat, udara dan laut. Sehingga penataan ruang di BWK X hanya sebatas di wilayah darat.

Rencana Pola pemanfaatan ruang meliputi :

1. Kawasan Lindung yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan Lindung termasuk di dalamnya kawasan sempadan pantai merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
2. Kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

#### **3.3.3.1.2. Pengaturan Tata Ruang Daerah Kabupaten Kendal menurut Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Peraturan Daerah Tata Ruang Kabupaten Kendal yang berlaku saat ini adalah Perda Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2026. RTRW Kabupaten Kendal dibuat mengacu dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTRW Kabupaten Kendal adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Kendal yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budi daya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah. Perencanaan RTRW Kabupaten Kendal dijadikan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Kendal meliputi seluruh wilayah daerah seluas 1.002,23 km<sup>2</sup> yang secara administratif terdiri dari 20 kecamatan yaitu Kecamatan Plantungan, Sukorejo, Pegeruyung, Singorojo, Limbangan, Boja, Kaliwungu Utara, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Pegandon, Ngampel, Gumuh, Ringinarum, Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon serta Kota Kendal. Dari ke 20 kecamatan tersebut dibagi dalam Sub Wilayah Pengembangan (SWP) sesuai dengan potensi dan geografi untuk pengembangan. SWP Kabupaten Kendal terdiri dari:

1. SWP I meliputi wilayah Kecamatan Kendal, Patebon, Cepiring dan Kangkung.

2. SWP II meliputi wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Brangsong, Pegandon dan Ngampel.
3. SWP III meliputi wilayah Kecamatan Weleri, Rowosari, Ringinarum dan Gemuh.
4. SWP IV meliputi wilayah Kecamatan Sukorejo, Pageruyung, Patean dan Plantungan.

5. SWP V meliputi wilayah Kecamatan Boja, Singorojo dan Limbangan.

Secara administratif wilayah SWP Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kota Semarang adalah SWP II. Kecamatan Kaliwungu merupakan SWP II yang berbatasan dengan Kota Semarang. Fungsi SWP II sebagai pusat pertanian, perkebunan dan pariwisata.

RTRW Kabupaten Kendal menentukan kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang memiliki batas fungsi utama atau batas wilayah yang ditetapkan berdasarkan lingkup pengamatan suatu fungsi tertentu. Kawasan strategis diidentifikasi memberikan dampak atau pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan Kabupaten Kendal. Kriteria kawasan strategis wilayah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- Kawasan pusat pertumbuhan
- Kawasan cepat berkembang
- Kawasan kurang berkembang
- Kawasan perbatasan
- Kawasan industri

- Kawasan pengembangan wisata
- Kawasan konservasi alam dan lingkungan hidup.

Kecamatan Kaliwungu sebagai SWP II merupakan salah satu kecamatan yang termasuk kawasan strategis. Penataan ruang Kecamatan Kaliwungu secara detail diatur dalam Perda Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Industri Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2026. Fungsi RDTR Kawasan Industri Kaliwungu adalah:

1. Sebagai dasar bagi Pemda Kabupaten Kendal menetapkan lokasi dalam penyusunan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
2. Sebagai dasar pengembangan fungsi pelayanan berbagai kegiatan pemerintah dan atau Pemda, khususnya pembangunan dan pengembangan kegiatan industri
3. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang, sehingga sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.

Wilayah perencanaan dalam RDTR Kawasan Industri Kaliwungu

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa.
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwungu Selatan.
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Tugu Kota Semarang.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Brangsong.

### **3.3.3.2. Pengaturan Tata Ruang Wilayah Pesisir Daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal**

#### **3.3.3.2.1. Pendekatan Batasan Wilayah Pesisir dalam Mengatur Tata Ruang Wilayah Pesisir Daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal**

Dilihat dari pendekatan administratif pengertian wilayah pesisir, maka dalam penataan wilayah pesisir di ruang laut akan mengikuti ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, bahwa ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengamanatkan mengenai penataan ruang di wilayah pesisir yang masuk dalam masuk dalam pengaturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, RZWP-3-K diserasikan, diseleraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota.

RTRW pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada klasifikasi penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Klasifikasi penataan ruang terdiri dari:

- f. Sistem, terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- g. Fungsi utama kawasan, terdiri atas kawasan lindung dan budi daya.
- h. Wilayah administrasi, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota
- i. Kegiatan kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- j. Nilai strategis kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

Wilayah pesisir secara eksplisit tidak termasuk di dalam klasifikasi tersebut. Mengingat sebagai wilayah yang memiliki berbagai fungsi, secara administrasi jelas batas wilayahnya dan memiliki nilai strategis, wilayah pesisir dapat masuk dalam klasifikasi penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Wilayah pesisir dapat masuk dalam klasifikasi sebagai:

- 1. Fungsi utama kawasan, karena wilayah pesisir merupakan kawasan lindung dan dapat dibudidayakan.
- 2. Wilayah administrasi, karena pengaturan tata ruang wilayah pesisir diserasikan, diseleraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata



Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Nilai strategis kawasan, karena wilayah pesisir memiliki tingkat persaingan dalam pemanfaatan ruangnya. Menurut Herman Hermit, tata ruang kawasan transisi darat-laut ini akan sangat mungkin tergolong kawasan strategis mengingat persaingan penggunaan atau pemanfaatan ruang di kawasan ini.<sup>124</sup>

Berangkat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, maka ada kewajiban bagi pemerintah daerah termasuk Kota Semarang dan Kabupaten Kendal memiliki Rencana zonasi wilayah pesisir. Rencana zonasi wilayah pesisir ke dua daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal meliputi ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan sejauh 4 mil laut untuk wilayah laut. Kewenangan 4 mil laut terdiri atas pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. Sehingga dasar laut di bawahnya bukan menjadi kewenangan ke dua pemerintah daerah.

Dari segi pendekatan ekologis, rencana Zonasi yang diusulkan akan membarikan arahan pemanfaatan kawasan yang didasarkan pada suatu keseimbangan antara konservasi dan pembangunan didalam suatu pola berkelanjutan, mengidentifikasi isu-isu sumberdaya dan

---

<sup>124</sup> Herman Hermit, *Op.Cit.*, hlm. 65.

tingkat kepentingan pemerintah dan stakeholders lainnya, dan memberikan sasaran-sasaran dalam implementasi maksud pengelolaan zona yang diusulkan. Unsur-unsur dalam lingkungan tidak secara terpisah-pisah, melainkan terintegrasi dalam beberapa komponen yang saling terkait dalam suatu sistem.

Melihat wilayah pesisir dengan fungsinya sebagai satu kesatuan ekosistem, maka dalam mengatur wilayah pesisir mencerminkan fungsi dari wilayah pesisir. Fungsi wilayah pesisir berupa kawasan lindung dan dapat dibudidayakan menurut klasifikasi penataan ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kawasan lindung yang diatur adalah cagar alam laut, cagar alam, taman nasional dan taman wisata alam dan hutan lindung. Kawasan budidaya yang diatur adalah hutan produksi, pertanian, budidaya perairan, pariwisata, tambang, perdagangan, kawasan industri, permukiman kepadatan tinggi (perkotaan) dan permukiman kepadatan rendah (perdesaan).

Dari pendekatan perencanaan, ditentukan oleh kawasan prioritas di dalam wilayah perencanaan. Perencanaan dalam menata tata ruang wilayah pesisir didapat dari batas administrasi dari suatu kecamatan. Bagian Wilayah Kota Semarang yang merupakan wilayah pesisir adalah Kecamatan Tugu masuk BWK X, Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara masuk BWK III dan Kecamatan Genuk masuk BWK IV. Kabupaten Kendal wilayah pesisir mencakup

Kecamatan Cepiring, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Patebon serta Kota Kendal masuk SWP I, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong masuk SWP II dan Kecamatan Rowosari masuk SWP III.

#### **3.3.3.2.2. Bentuk Peraturan Tata Ruang Wilayah Pesisir Daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal**

Sampai saat ini Pemerintah Kota Semarang belum memiliki pengaturan tata ruang wilayah pesisir. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Kendal masih sebatas rancangan Perda mengenai Rencana Tata Ruang Pesisir dan Laut Kabupaten Kendal. Ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Laut Kabupaten Kendal ini mencakup perencanaan tata ruang wilayah daratan pesisir (daerah *supralitoral* dan *intertidal* dalam wilayah kecamatan-kecamatan yang memiliki garis pantai di Kabupaten Kendal serta wilayah laut (*sublitoral*) yang termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah, yaitu sejauh 4 mil dari garis pantai.

Perwilayahan dalam rencana tata ruang wilayah pesisir dan laut Kabupaten Kendal terbagi atas 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Pesisir, yaitu:

1. Wilayah Pengembangan Pesisir I (WPP-I).
2. Wilayah Pengembangan Pesisir II (WPP-II)
3. Wilayah Pengembangan Pesisir III (WPP-III)

WPP-I merupakan wilayah yang memiliki batas dengan Kota Semarang. Wilayah Pengembangan Pesisir I (WPP-I) merupakan wilayah pengembangan yang berpusat di Kota Kaliwungu. WPP-I meliputi wilayah perbatasan Kabupaten Kendal dengan Kota Semarang ke arah barat hingga kawasan Pelabuhan Penyebarangan Kendal. Fungsi dominan Wilayah Pengembangan Pesisir I (WPP-I) ditetapkan sebagai berikut :

1. WPP-I berfungsi sebagai pusat kegiatan industri. Hal tersebut didasarkan pada keberadaan kawasan industri Kaliwungu (termasuk di dalamnya PT. Kayu Lapis Indonesia) serta rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) dan didukung oleh keberadaan kawasan pelabuhan penyeberangan.
2. WPP-I berfungsi sebagai daerah perbatasan.
3. WPP-I berfungsi sebagai kawasan pusat kegiatan budidaya perikanan, yang terletak di kawasan Wonorejo hingga Mororejo.
4. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan.
5. Pengembangan kawasan wisata bahari, khususnya di Pantai Ngebum, Desa Mororejo.
6. Pusat perhubungan laut (pelabuhan).
7. WPP-I sebagai pengembangan penanggulangan degradasi lingkungan (abrasi). Fenomena abrasi di wilayah ini (khususnya di kawasan pantai Mororejo) mencapai 29 % dari total seluruh abrasi di

Kabupaten Kendal dan kondisi ini merupakan fenomena abrasi terluas di seluruh Kabupaten Kendal.

Idealnya, pengaturan tata ruang wilayah pesisir daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal berupa Peraturan Daerah mencakup wilayah tata ruang wilayah daratan pesisir dalam wilayah kecamatan-kecamatan yang memiliki garis pantai serta wilayah laut yang termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah, yaitu sejauh 4 mil dari garis pantai. Bentuk Perda sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 adalah Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir. RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur.<sup>125</sup>

Zona Banyak Ragam Pemanfaatan (*Multiple Use Zone*), didefinisikan sebagai wilayah dimana aktifitas khusus yang dilakukan manusia ditekankan pada yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya (lahan). Karena itu, pemanfaatannya tidak terbatas pada satu aktifitas saja. Contoh aktifitas pemanfaatan yang timbul di dalam zona ini adalah konsesi pemanfaatan hutan yang berkelanjutan, usaha penangkapan ikan skala komersial, taman/kawasan industri yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur (misalnya: jaringan rel kereta api/ jalan raya, fasilitas pengolahan limbah, penerangan listrik,

---

<sup>125</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.

dsb), kegiatan di bidang pertanian (penanaman kelapa sawit, padi sawah dengan sistem irigrasi ekstensif, dsb). Sifat dan intensitas aktifitas manusia di dalam wilayah tersebut seharusnya dikontrol melalui sistem perijinan. Apabila perijinan ekstraksi dan eksplorasi minyak, gas dan bahan tambang dilakukan oleh pusat, maka perijinan yang lain seharusnya dikeluarkan oleh kabupaten atau Provinsi tergantung pada skala operasionalnya.

Zona Konservasi, didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki atribut ekologi yang khusus atau luar biasa, memiliki biodiversity yang tinggi, dan biasanya memiliki species-species endemik, langka maupun yang terancam punah. Wilayah tersebut terdiri dari habitat yang belum terjamah atau masih asli yang luas yang memiliki posisi yang penting baik dalam skala lokal, regional, nasional atau bahkan dunia. Daerah suaka laut, suaka alam maupun daerah perlindungan ikan merupakan prioritas tertinggi untuk diproteksi, sedangkan sub-sub zona yang lainnya mendapatkan proteksi yang lebih rendah tergantung pada kondisi maupun khususnya. Dengan demikian memungkinkan pemanfaatan oleh manusia secara terkontrol (misalnya: pengembangan wisata dan rekreasi yang ramah lingkungan, kegiatan perikanan pada skala tradisional).

Zona Pemanfaatan Khusus (*special Use Zona*) – Zona ini diperuntukkan bagi tujuan primer yang tertentu. Pangkalan militer,

pelabuhan dan terminal kargo merupakan salah satu contoh dari zona tersebut.

Zona Koridor / Alur (*corridor Zona*) (Usulan) Zona ini khususnya diperuntukkan bagi perairan yang wilayahnya merupakan jalur lalu-lintas kapal secara reguler dalam skala internal maupun internasional. Zona tersebut termasuk juga wilayah tempat jalur pipa laut dan kabel telekomunikasi berada.

Arahan zonasi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dapat dilihat di tabel 4 berikut:

Tabel 4.:  
Alokasi Ruang RZWP-3-K Kabupaten/Kota

Klasifikasi Zona	Kategori sub –zona berdasarkan tujuan pengelolaan (ditetapkan oleh pemerintah kabupaten)
Zona pemanfaatan umum	1. hutan produksi 2. pertanian 3. budidaya perairan 4. pariwisata 5. tambang 6. perdagangan 7. kawasan industri 8. permukiman kepadatan tinggi (perkotaan) 9. permukiman kepadatan rendah (perdesaan) 10.dsb
Zona Konservasi	1. cagar alam laut 2. cagar alam 3. taman nasional 4. taman wisata alam 5. hutan lindung 6. lokasi-lokasi bersejarah 7. cagar (sanctuary) perikanan 8. daerah perlindungan laut (DPL)
Zona	Fasilitas/instalansi militer, pusat pembangkit listrik,

penggunaan khusus	pelabuhan
Zona lorong (alur)	Pipa dasar laut, kabel, alur pelayaran, alur migrasi hewan laut

### **3.3.3.3. Analisis Pengaturan Tata Ruang Wilayah Pesisir Daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal**

Dari kondisi yang ada pengaturan tata ruang baik di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, sama-sama memiliki Peraturan Daerah mengenai tata ruang. Pengaturan tata ruang secara umum ke dua daerah diatur dalam Perda Tata Ruang yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006. Perda Tata Ruang Kota Semarang yang berlaku saat ini adalah Perda Kota Semarang Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010. Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Untuk itu perlu disesuaikan dengan undang-undang penatan ruang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang yang berlaku saat ini. Kabupaten Kendal memiliki Perda Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2026. Perda ini dibuat mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006.



Secara umum ke dua Perda mengatur perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara umum. Pengaturan tata ruang tersebut sebatas wilayah darat. Ke dua perda belum mengatur tata ruang di wilayah pesisir sepenuhnya, karena wilayah pesisir tidak hanya di wilayah darat, namun juga di wilayah laut seluas 4 mil laut. Oleh karena itu, ke dua pemerintah daerah perlu memiliki perda pengaturan wilayah pesisir yang meliputi wilayah di darat dan di laut. Pengaturan wilayah pesisir yang berbentuk zonasi diserasikan dengan klasifikasi penataan ruang yang sudah ada. Wilayah pesisir ke dua daerah masuk sebagai klasifikasi penataan ruang sebagai wilayah strategis. Dalam Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 2008 Tanggal : 10 Maret 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa wilayah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi) ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional. Hal ini sesuai Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dijelaskan bahwa RZWP-3-K diserasikan, diseleraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota. Agar zonasi yang dibuat sesuai ekologis, maka kelayakan biofisik di wilayah pesisir harus diidentifikasi dahulu. Ada 12 (dua belas) langkah dalam penyusunan rencana zonasi sebagai berikut:<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Tim Penyusun Pedoman Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K, DKP, *Pedoman*

13. Memulai penyusunan rencana
14. Menyusun katalog informasi sumber daya yang tersedia
15. Mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya dan isu-isu perencanaan
16. Analisa data potensi dan pemanfaatan sumber daya untuk mengidentifikasikan nilai-nilai yang berdasarkan kepentingan stakeholder
17. Memilih tujuan pengelolaan untuk paket sumber daya
18. Menetapkan tujuan pengelolaan zona dan sub-zona
19. Membuat draft peta zonasi
20. Menyusun matriks kesesuaian ragam aktivitas dengan tujuan pengelolaan sumber daya
21. Memeriksa konsistensi draft rencana zonasi dengan RTRW dan aturan-aturan lainnya
22. Melaksanakan review publik untuk draft rencana zonasi
23. Mengidentifikasikan lokasi konflik pemanfaatan sumber daya, atau berpotensi konflik dan memberikan rekomendasi pemecahannya
24. Mengajukan rencana zonasi untuk pengesahan.

Perlu diperhatikan dalam pengaturan tata ruang wilayah pesisir ke dua daerah adalah berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Untuk wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah perlu disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan ruang wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah dapat dilihat dari perencanaan tata ruang ke dua daerah. Satu hal yang perlu dalam perencanaan tata ruang adalah membuat peta. Pentingnya peta bagi perencanaan adalah menempatkan posisi detail-detail objek rencana dalam ruang pada posisi yang benar. Objek yang digambarkan dalam peta rencana harus memberikan nilai koordinat dan luasan yang sesungguhnya. Jika direkonstruksikan di lapangan, objek-objek rencana tersebut dapat

diimplementasikan. Oleh karena itu batas wilayah pesisir ke dua daerah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini berkaitan penempatan posisi detil-detil objek rencana dalam ruang wilayah pesisir pada posisi yang benar, tidak terjadi tumpang tindih posisi detil objek rencana ke dua daerah.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada ke dua Pemerintah daerah. Ijin merupakan salah satu instrumen hukum yang berfungsi mengendalikan perilaku orang atau lembaga (badan usaha) yang bersifat preventif. Suatu ijin yang diberikan oleh pemerintah daerah memiliki maksud untuk mencapai kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Di sisi lain tujuan dari perijinan bagi pemerintah daerah seringkali dikaitkan dengan pendapatan asli daerah, karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa pendapatan yang memadai, mustahil otonomi daerah dapat terwujud.

Ateng Syafrudin mengatakan, ijin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan.<sup>127</sup> Hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan ijin memerlukan perumusan limitatif. Asep Warlan Yusuf, mengatakan, ijin “adalah suatu instrumen pemerintah

---

<sup>127</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. (Bandung: Nuansa, 2008). hlm. 106.

yang bersifat yuridis previntif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.”<sup>128</sup>

Jadi, dapat dikatakan bahwa ijin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan. Ijin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Yang paling penting dalam persoalan ijin adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan ijin. Hal ini sangat penting karena ijin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara.

Di sisi lain, bila dilihat dari pengertian keputusan tata usaha negara itu sendiri, ijin memiliki sifat-sifat keputusan tersebut, yaitu bahwa ijin bersifat konkret. Artinya, obyek yang diputuskan dalam tata usaha negara itu tidak abstrak, akan tetapi berwujud, tertentu dan ditentukan. Ijin memiliki sifat yang individual. Artinya, dalam ijin tersebut harus disebutkan secara jelas siapa yang diberikan ijin. Ijin bersifat final, artinya bahwa dengan ijin tersebut seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Perijinan

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

diharapkan dapat tercapainya tujuan-tujuan tertentu, yang diantaranya adalah:<sup>129</sup>

1. Adanya suatu kepastian hukum.
2. Perlindungan kepentingan umum.
3. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Adapun pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan perijinan berada/terletak pada tangan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menjadi dasar hukumnya. Ini termasuk bentuk ketetapan yang pada umumnya tertulis. Tertulis artinya bahwa ketetapan tadi berupa Surat Keputusan Kepala Daerah yang diterbitkan dalam suatu surat keputusan, maka sesungguhnya ketetapan yang menyangkut pemberian perijinan memiliki unsur-unsur:

1. *Positif*, artinya bahwa ketetapan tadi telah menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi pemohon perijinan.
2. *Ekstern*, artinya bahwa dalam ketetapan tadi terdapat hubungan hukum antara pemerintah, dalam hal ini pejabat administrasi negara selaku aparatur pemerintahan, dengan orang perorangan atau badan hukum perdata selaku pemohon perijinan.<sup>130</sup>

### **3.3.4. Kondisi Kerjasama antar Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal**

---

<sup>129</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Loc.Cit.*, hlm. 108.

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

Tahun 1998 antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Salatiga Pemerintah Daerah Tingkat II Kendal, Demak dan Grobogan mengadakan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Naskah Kesepakatan Bersama. Naskah Kesepakatan Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tersebut lebih dikenal dengan Wilayah Pembangunan Sub Regional KEDUNGSEPUR.

Sesuai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani Kepala Daerah Tingkat II diajukan ke DPRD Tingkat II masing-masing guna mendapatkan persetujuan DPRD. Kesepakatan Bersama telah mendapat persetujuan DPRD masing-masing daerah. Kesepakatan Bersama ditandatangani tanggal 21 Desember 1998 oleh Kepala Daerah antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Salatiga Pemerintah Daerah Tingkat II Kendal, Demak dan Grobogan Nomor : 130/07272 - Nomor : 16/Perj-XII/1998 - Nomor : 261/1998 - Nomor : 762A/1998 - Nomor : 1694/1998 - Nomor : 180/1998 tentang Kerjasama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Salatiga Pemerintah Daerah Tingkat II Kendal, Demak dan Grobogan dengan Gubernur Jawa Tengah. Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi bidang:

1. Pembangunan Perkotaan dan Pengembangan Teknologi.
2. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

3. Industri dan Perdagangan
4. Perumahan dan Permukiman
5. Transportasi
6. Pertanian dan Pengairan
7. Pariwisata
8. Pendidikan dan Kebudayaan.

Dirasa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, Kesepakatan Bersama ditingkatkan lagi. Pada tahun 2005 dibuatlah Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Keputusan Bersama ditandatangani tanggal 15 Juni 2005 oleh Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor : 30 Tahun 2005 – Nomor : 130.1/0975.A - Nomor : 130/02646 - Nomor : 63 Tahun 2005 - Nomor : 130.1/A.00016 - Nomor : 130.1/4382 tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur.

Tujuan Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur untuk menyatukan dan mengintegrasikan program-program pembangunan di wilayah Kedungsepur secara serasi dan selaras sehingga mampu memberikan manfaat dan meningkatkan

kualitas hidup masyarakat di wilayah Kedungsepur. Program pembangunan Kerjasama di wilayah Kedungsepur meliputi bidang:

1. Tata ruang, pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2. Industri dan Perdagangan
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana
4. Perhubungan dan Pariwisata
5. Pertanian dan Pengairan
6. Pendidikan dan Kebudayaan
7. Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Masalah Sosial
8. Keamanan dan Ketertiban
9. Bidang lain-lain yang dianggap perlu.

Kegiatan Program pembangunan Kerjasama di wilayah Kedungsepur dipusatkan di Pemerintah Kota Semarang sebagai tempat Sekretariat Bersama (Sekber).

Program pembangunan Kerjasama di wilayah Kedungsepur merupakan suatu bentuk pengelolaan kerjasama antar daerah (*regional management/RM*). *Regional Management* memiliki dua pengertian. Pengertian *Regional Management* dalam arti luas diartikan sebagai suatu kesatuan sistem pengelolaan pembangunan regional yang terdiri



dari berbagai komponen antar daerah.<sup>131</sup> Pelaksanaan *Regional Management* yaitu pemanfaatan *networking*, partisipasi para aktor terkait dan pengambilan keputusan secara konsensus dalam rangka mencapai sinergitas, peningkatan efektifitas dan efisiensi pembangunan kewilayahan. Pengertian *Regional Management* sebagai sebuah lembaga kerjasama antar daerah dapat diartikan sebagai lembaga profesional yang didirikan untuk memobilisasi dan merealisasikan inisiasi kesepakatan pembangunan regional tersebut. Dibentuknya *Regional Management* tidak lepas dari pemberlakuan otonomi daerah. Daerah memiliki peluang untuk merubah pola kerjasama yang sebelumnya mengutamakan aspek koordinasi dari pusat dan menggantikannya dengan aspek komunikasi partisipatif antar daerah.

Hal ini sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

Dilihat dari kerjasama program pembangunan di wilayah Kedungsepur, maka secara langsung antara Kota Semarang dengan

---

<sup>131</sup> Jana Marie Mehrrens & Benjamin Abdurrahman, *Regional Marketing Buku Panduan untuk Menarik Investasi Melalui Aliansi Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V & GTZ-RED Jakarta, 2007). hlm. 22.

Kabupaten Kendal sudah terikat dalam kerjasama khususnya di bidang penataan ruang. Keputusan Bersama tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur pada hakikatnya hanya perjanjian pendahuluan atau lebih dikenal dengan nama *Memorandum of Understanding (MoU)* . Menurut I. Nyoman Sudana, dkk., mengartikan *memorandum of understanding* sebagai suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti diikuti perjanjian lainnya. Ke dua daerah perlu membuat perjanjian lainnya yang berupa implementasi dari *MoU* tersebut.

#### **3.3.4.1. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir Perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal**

Meskipun penegasan batas wilayah pesisir antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal memakai pendekatan administratif, namun perlu juga mempertimbangkan pendekatan lain dalam menegaskan batas wilayah pesisir. Dilihat dari pendekatan ekologis, batas wilayah pesisir tidak dibatasi oleh administrasi pemerintahan. Pendekatan ekologis wilayah pesisir lebih melihat wilayah pesisir dengan fungsinya sebagai satu kesatuan ekosistem. Pendekatan ekologi wilayah pesisir sangat memperhatikan ekosistem antara wilayah darat dengan wilayah laut sebagai satu kesatuan ekosistem. Pendekatan secara ekologis pada hakikatnya akan memperlihatkan kawasan pesisir, karena kawasan merupakan istilah

ekologis. Dengan peta batas wilayah di darat maupun di laut antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat dibuat peta sebagai sarana/acuan bagi penyajian informasi geografis dengan tema-tema tertentu lainnya (peta tematik). Peta tematik dapat menyajikan informasi wilayah pesisir dengan fungsi-fungsinya.

Dengan peta tersebut nantinya akan mempermudah pemerintah daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dalam merencanakan wilayah pesisirnya. Berdasarkan pendekatan dari segi perencanaan, wilayah pesisir merupakan wilayah perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan yaitu wilayah pesisir yang akan dikelola secara bertanggung jawab. Dari peta penegasan batas wilayah pesisir secara administratif maupun peta tematik yang menyajikan informasi wilayah pesisir, dapat dijadikan alat (*tool*) untuk merencanakan wilayah pesisir Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal khususnya di daerah perbatasan.

Dalam merencanakan tata ruang wilayah pesisir perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal perlu kerja sama antara ke dua daerah. Hal ini sesuai wewenang ke dua pemerintah daerah. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dijelaskan wewenang pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang antara lain kerja sama penataan

ruang antar kabupaten/kota. Perencanaan tata ruang wilayah pesisir dapat memadukan berbagai jenis perencanaan yaitu:

4. *Top-down and bottom-up planning*
5. *Vertical and horizontal planning*
6. Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung

Dengan kerjasama perencanaan wilayah pesisir perbatasan antara pemerintah daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat menunjukkan manfaatnya, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

- f. Perencanan wilayah pesisir mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah persisir tersebut di masa yang akan datang.
- g. Dapat membantu atau memandu para stakeholder (para pihak yang berkepentingan) untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan masih diijinkan.
- h. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan lahan.

Dilihat dari kerjasama program pembangunan di wilayah Kedungsepur, maka secara langsung antara Kota Semarang dengan

Kabupaten Kendal sudah terikat dalam kerjasama khususnya di bidang penataan ruang. Sehingga Keputusan Bersama tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur dapat dijadikan sebagai dasar kerjasama penataan ruang antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal khususnya di wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah.

#### **3.3.4.2. Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir Perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal**

Perbenturan atau persilangan wewenang di dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan perselisihan bagi para pemegang wewenang itu. Itulah kiranya yang menimbulkan pemikiran, apakah perlu dibentuk suatu badan koordinasi dalam penanganan permasalahan penataan rencana tata ruang pada daerah perbatasan? Praktik-praktik untuk memecahkan perselisihan tersebut, adakalanya hanya diadakan secara isidentil atau kasuistis melalui rapat koordinasi antara pemerintah daerah yang bersangkutan atau dengan kata lain. Maka kiranya perlu dibentuk suatu badan koordinasi untuk penyelesaian masalah-masalah penataan rencana tata ruang di daerah perbatasan, sehingga dimungkinkan nantinya, badan tersebut berfungsi sebagai

badan pengendali dan pengkoordinasi antara pemerintah yang memiliki kepentingan.

Selain masalah kewenangan memang sudah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi tidaklah salah apabila badan koordinasi untuk perencanaan tata ruang tetap diadakan, mengingat undang-undang tersebut pengaturannya hanya bersifat umum. Keberadaan lembaga penataan ruang daerah belum berjalan secara terpadu dan dalam satu kesatuan sistem. Kebijakan yang ditetapkan masing-masing dinas atau instansi lebih banyak diwarnai oleh tugas dan fungsi yang diembannya, sehingga seringkali bertentangan atau tidak seiring dengan kebijakan yang perlu dikeluarkan oleh dinas atau instansi lain.

Kepmendagri No. 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Penataan Ruang Daerah. Keputusan tersebut merupakan suatu tindak lanjut suatu kesepakatan para gubernur dalam Rapat Kerja Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (Rakernas BKTRN) tahun 2003, keputusan tersebut menghasilkan suatu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), yang terbagi ke dalam dua wilayah, yaitu BKPRD Provinsi dan BKPRD Kabupaten/Kota. Dengan adanya badan koordinasi tersebut nantinya diharapkan dapat menjembatani kepentingan-kepentingan antar daerah, sehingga akan tercapai suatu pengendalian

dan pengkoordinasian yang baik, dan terhindar dari suatu permasalahan antar daerah serta terhindar dari disintegrasi nasional. Walaupun dengan adanya badan koordinasi akan tetapi selesainya suatu permasalahan akan tergantung pada perhatian para pihak yang bersengketa, sehingga pada dasarnya koordinasi dapat diciptakan secara baik melalui pertimbangan yang bijaksana dari pendekatan-pendekatan tersebut.

Pemerintah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal sampai saat ini belum memiliki lembaga yang mengkoordinasikan penataan ruang. Penataan ruang antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal masih sebatas dalam tahap perjanjian pendahuluan yang tertuang dalam Keputusan Bersama tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur.

### **3.3.4.3. Konsep Kerjasama Penataan Ruang Wilayah Pesisir Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal**

#### **3.3.4.3.1. Landasan Yuridis Kerjasama**

Beberapa hal yang dikemukakan dalam dasar kerjasama penataan ruang wilayah pesisir Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sebagai berikut :

1. Penataan ruang wilayah pesisir perbatasan antara daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal perlu diselesaikan bersama-sama.
2. Wilayah pesisir secara ekologis tidak mengenal batas administrasi.
3. Penataan ruang wilayah pesisir antara daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal harus jelas batas wilayah administrasi ke dua daerah.
4. Persoalan mengenai penataan tata ruang wilayah pesisir memerlukan koordinasi di antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut diperlukan oleh karena kondisi ruang antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain.

Dari dasar tersebut, daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat melakukan kerjasama penataan ruang wilayah pesisir perbatasan antara ke dua pemerintah daerah. Sebagai landasan yuridis, selanjutnya pemerintah daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan kerjasama tersebut haruslah melakukan suatu langkah yang kongkret yang disesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan yang melekat pada pemerintah kabupaten/kota dalam administrasi negara disebut dengan sikap dan tindak administrasi negara. Sikap dan tindak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat diwujudkan dalam suatu



bentuk kebijakan. Bila dilihat dari sudut hukum administrasi negara, kebijakan pemerintah daerah terdiri dari dua bentuk, yaitu:

1. ketetapan atau keputusan (*beschiking*)
2. peraturan daerah (*beleid*).<sup>132</sup>

Ketetapan atau keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini sering disebut sebagai keputusan bupati/walikota, biasanya sering dilihat dalam bentuk izin. Sementara peraturan daerah merupakan suatu produk hukum yang merupakan hasil penetapan dari DPRD. Peraturan daerah dibuat sebagai instrumen untuk melaksanakan pengaturan atau pengurusan rumah tangga daerah.

Sehubungan dengan penataan ruang, maka perencanaan tata ruang yang dibuat oleh daerah, baik itu Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal, harus sesuai peraturan daerah yang telah dibuat sebelumnya, bahkan untuk lebih memberikan kekuatan hukum, perencanaan tata ruang wilayah yang akan dibuat harus disahkan melalui peraturan daerah.

Ketetapan atau keputusan maupun Perda yang dibuat oleh masing-masing daerah dapat menimbulkan konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir perbatasan. Hal tersebut dapat terjadi karena pemanfaatan lahan di wilayah pesisir yang berbeda-beda dan tidak

---

<sup>132</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Loc.Cit.*, hlm. 91.

sinkron antar ke dua daerah. Untuk itu dibutuhkan koordinasi antara ke dua pemerintah daerah yang memiliki Ketetapan atau keputusan dan Perda sendiri-sendiri.

Peraturan mengenai tata ruang Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Perda Kota Semarang Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010.
- b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010.
- c. Sampai saat ini Pemerintah Kota Semarang belum memiliki pengaturan tata ruang wilayah pesisir.

RDTRK BWK X meliputi: Kecamatan Ngaliyan: 3.260,584 ha dan Kecamatan Tugu: 3.133,359 ha. Kecamatan Tugu merupakan kecamatan Bagian Wilayah Kota X merupakan Kecamatan Tugu merupakan kecamatan termasuk wilayah pesisir yang berbatasan dengan Kabupaten Kendal.

Peraturan mengenai tata ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- a. Perda Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal Tahun 2007 – 2026.

- b. Perda Nomor 24 Tahun 2007 tentang Rencana Detail Tata Ruang Industri Kaliwungu Kabupaten Kendal Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2026
- c. Sampai saat ini Kabupaten Kendal memiliki rancangan Perda mengenai Rencana Tata Ruang Pesisir dan Laut Kabupaten Kendal. Secara administratif wilayah SWP Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Kota Semarang adalah SWP II. Kecamatan Kaliwungu merupakan SWP II yang berbatasan dengan Kota Semarang.

Dari peraturan mengenai penataan tata ruang ke dua daerah, kerjasama penataan ruang wilayah pesisir ke dua daerah yang dimaksud adalah:

- a. Kecamatan Tugu, secara administrasi masuk Kota Semarang dan
- b. Kecamatan Kaliwungu, secara administrasi masuk Kabupaten Kendal.

Belum ditetapkannya Perda mengenai Rencana Tata Ruang Pesisir dan Laut bagi Kabupaten Kendal dan belum dimilikinya Perda Tata Ruang Pesisir bagi Kota Semarang, dapat dijadikan langkah awal ke dua daerah untuk merencanakan wilayah pesisir ke dua daerah. Wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah tersebut yaitu Kecamatan Tugu dan Kecamatan Kaliwungu. Langkah awal perencanaan wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah perlu segera adanya kerjasama ke dua pemerintah daerah.

Implementasi dari kerjasama penataan ruang wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah diperlukan koordinasi. Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana pada dasarnya merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Koordinasi di sini adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang menghubungkan, bertujuan untuk menyerasikan setiap langkah dan kegiatan dalam berorganisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain sebagai suatu proses, koordinasi dapat juga diartikan sebagai suatu pengaturan yang tertib dari kumpulan atau gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan.<sup>133</sup>

Koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah. Dengan pengendalian dan koordinasi yang baik, maka dalam penataan ruang wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah akan tercapai suatu keadaan dapat dicegah terjadinya kesimpangsiuran dan duplikasi kegiatan.

Oleh karena itu koordinasi bukan hanya bekerjasama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan di

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

samping penyesuaian perencanaan, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara sesama daerah yang bersangkutan dengan memahami dan mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai peraturan pelaksanaannya. Ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam koordinasi penataan ruang wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah yaitu Perda-Perda mengenai tata ruang ke dua daerah, khususnya Perda tata ruang pesisir. Untuk itu ke dua daerah perlu segera membuat dan menetapkan Perda tata ruang pesisir.

Keputusan Bersama tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur dapat dijadikan landasan yuridis dalam melakukan kerjasama antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal. Keputusan Bersama ini pada hakikatnya merupakan perjanjian pendahuluan. Untuk perjanjian berikutnya sebagai implementasi Keputusan Bersama, pemerintah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat melaksanakan kerjasama penataan ruang wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah. Perjanjian sebagai implementasi Keputusan Bersama dibuat dan disepakati bersama oleh masing-masing Kepala Daerah, dimintakan persetujuan DPRD masing-masing dan diketahui oleh Gubernur Jawa Tengah. Perjanjian tersebut memuat teknis pelaksanaan penataan ruang wilayah pesisir antara ke dua daerah. Langkah konkrit melaksanakan kerjasama penataan ruang

wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah dapat diwujudkan dengan pembentukan lembaga.

#### **3.3.4.3.2. Pembentukan Bentuk Kerjasama dan Lembaga**

Salah satu bentuk implementasi yang yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah, baik itu Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal, adalah melalui penerapan *regional management*. *Regional Management* sebagai sebuah lembaga kerjasama antar daerah dapat diartikan sebagai lembaga professional yang didirikan untuk memobilisasi dan merealisasikan inisiasi kesepakatan pembangunan regional tersebut. *Regional management* merupakan merupakan salah satu bentuk instrumen pembangunan yang bersifat formal non-keruangan atau dengan kata lain yang berkaitan dengan kebijakan. Bentuk kerja sama tersebut dapat tertuang dalam isi kebijakan yang dibuat oleh masing-masing daerah yang saling berkaitan, sehingga akan mungkin terciptanya suatu koordinasi diantara daerah satu dengan yang lainnya.

Keberhasilan kerjasama sangat dipengaruhi oleh peran aktif dan komitmen pemerintah yang bekerjasama. Salah satu kunci keberhasilan utama adalah terletak pada kesungguhan dan keseriusan pihak yang berkepentingan yaitu para Pemimpin Daerah yang bekerjasama dan seluruh jajaran instansi dinas terkait. Untuk menjembatani kerja para

Pemimpin Daerah yang bekerjasama dan seluruh jajaran instansi dinas terkait dalam penataan ruang wilayah pesisir Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dibutuhkan lembaga. Lembaga yang menangani berbagai permasalahan terkait dengan hal-hal yang tercakup dalam kerjasama tersebut.

Lembaga tersebut memiliki tugas serta fungsi yang tepat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir ke dua daerah perbatasan. Untuk Lembaga yang dibentuk untuk menerima mandat ini perlu dikukuhkan melalui Keputusan Bersama Daerah, terdapat diskripsi tugas dan tanggungjawab yang jelas, rinci dari para pihak yang berkepentingan (Pemimpin Daerah dan seluruh jajaran instansi maupun dinas terkait).

Jajaran instansi maupun dinas terkait yang diharapkan dengan penataan ruang wilayah pesisir di Pemerintah Kota Semarang terdiri dari Badan Perencana Daerah Kota Semarang, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Semarang, Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, Bagian Pemerintahan Umum, dan Kecamatan Tugu maupun dinas yang terkait lainnya. Jajaran instansi maupun dinas terkait yang diharapkan dengan penataan ruang wilayah pesisir di Pemerintah Kabupaten Kendal terdiri dari Badan Perencana Daerah Kabupaten Kendal, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kendal, Dinas Cipta Karya dan

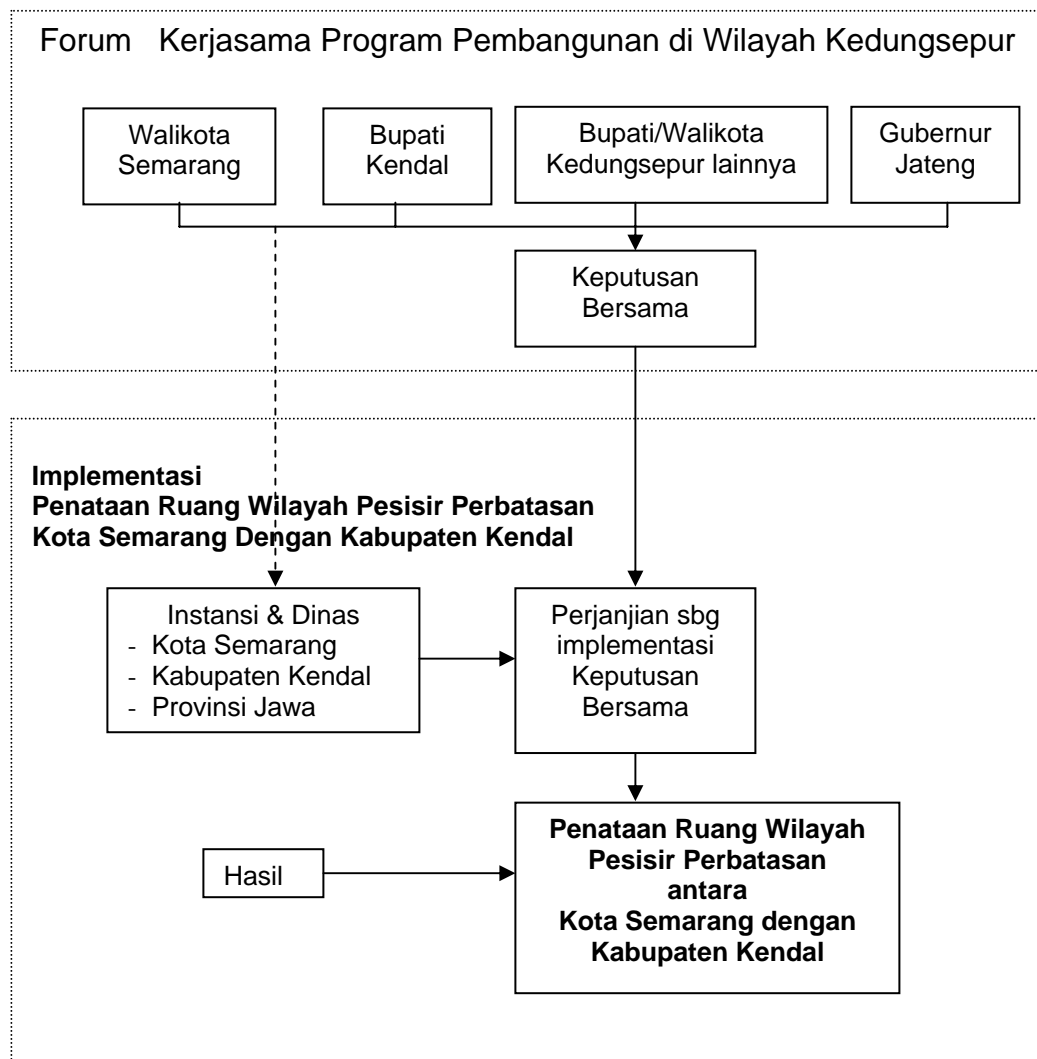
Tata Ruang Kabupaten Kendal, Dinas Perikanan Kabupaten Kendal, Bagian Tata Pemerintahan Umum Kabupaten Kendal dan Kecamatan Kaliwungu maupun dinas yang terkait lainnya. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah, jajaran instansi maupun dinas terkait yang diharapkan sebagai fasilitator penataan ruang wilayah pesisir adalah Badan Perencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Biro Kerja Sama dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah maupun maupun dinas terkait lainnya.

Keterlibatan pemerintah Provinsi karena masih memiliki kewenangan untuk mengadakan pengawasan dan koordinasi antara kabupaten kota. Hal ini sesuai Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007, bahwa pemerintah Provinsi memiliki wewenang untuk memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. Untuk mendukung jalannya lembaga kerjasama perlu dukungan dalam bentuk politik, teknis, finansial (misalnya berbagai anggaran untuk biaya operasional untuk bantuan operasional kantor sekretariat kerjasama, maupun SDM dari masing-masing ke dua daerah.

Lembaga penataan ruang wilayah pesisir perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah



Kedungsepur. Berikut skema pembentukan lembaga kerja sama penataan ruang wilayah pesisir perbatasan Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal :



#### **3.3.4.3.3. Penyelesaian Perselisihan**

Apabila pelaksanaan kerjasama penataan ruang wilayah pesisir perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat menimbulkan perselisihan, antara pemerintah ke dua daerah dapat membuat kesepakatan penyelesaian perselisihan. Kesepakatan penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan dan ditarik oleh pemerintah Provinsi. Penyelesaian perselisihan oleh tingkat Provinsi untuk menghindari masing-masing daerah lebih mengutamakan kepentingan sektoral.

Penyelesaian perselisihan harus sejalan dengan tingkatan kewenangan yang diberikan kepada pembuat keputusan yaitu berdasar Keputusan Bersama. tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur yang dijadikan landasan yuridis dalam melakukan kerjasama. Perselisihan dapat terjadi karena penetapan sasaran batas-batas zona pemanfaatan ruang wilayah pesisir. Zona pemanfaatan ruang wilayah pesisir terdiri dari rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana alur. Perselisihan tersebut dapat diatasi sedini mungkin pada proses perencanaan.

Keputusan Bersama tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur memberikan cara penyelesaian perselisihan. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bersama diselesaikan sebagai berikut:

1. Secara musyawarah oleh Sekretariat Bersama Kerjasama antar Daerah Kedungsepur.
2. Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaiannya difasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
3. Apabila dalam penyelesaian salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, dapat mengajukan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri.
4. Kemudian, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan di Mendagri, akan diselesaikan melalui Badan Peradilan.

Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan mengadakan pengawasan dan koordinasi antara kabupaten kota. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi dapat menjadi fasilitator jika terjadi perselisihan penataan ruang wilayah pesisir antara pemerintah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal. Hal ini sesuai dengan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa:

- (4) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.

- (5) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Dalam Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah juga dijelaskan penyelesaian perselisihan kerjasama antar daerah yaitu:

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Cara penyelesaian perselisihan menurut Keputusan Bersama tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur memberi peluang untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Peradilan. Secara teori menyelesaikan perselisihan melalui Badan Peradilan dapat dilakukan, namun sampai saat ini Badan Peradilan yang menangani perselisihan kerjasama antar daerah belum ada. Hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Pada prinsipnya

Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur merupakan implementasi Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dijelaskan dalam Pasal 195 ayat (2) bahwa kerja sama antar daerah dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Padahal ke dua peraturan jelas tidak membuka peluang untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Peradilan. Ke dua peraturan dijelaskan bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final dalam menyelesaikan perselisihan kerjasama antar dua pemerintah daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab III dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, penegasan batas daerah di wilayah laut antara daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal belum dilaksanakan. Pelaksanaan penegasan batas wilayah laut ini belum dilakukan karena penegasan batas daerah di wilayah laut merupakan perpanjangan setelah penegasan batas darat. Kedua daerah perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah yang mencerminkan pelaksanaan tugas penegasan batas wilayah di laut. Pelaksana survey di lapangan lapangan pelaksanaan penegasan batas wilayah laut antar daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat mengkontrakkan pekerjaan *survey* ini kepada dunia usaha, instansi pemerintah atau perguruan tinggi. Setelah penentuan batas secara kartometri wilayah laut, Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat menegaskan luas kewenangan wilayah laut ke dua daerah masing-masing 4 mil laut yang meliputi:

- a. Tahap Rekonesen (penjajakan di lapangan)
- b. Tahap Pekerjaan Lapangan

### c. Penggambaran Peta Batas

Dari hasil penegasan batas wilayah di laut antara daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal kemudian membuat peta batas wilayah laut antara daerah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

Setelah diadakan penegasan batas wilayah laut perlu diatur dalam perjanjian batas wilayah antar daerah. Perjanjian batas wilayah antar daerah tidak perlu dibuat semacam ratifikasi oleh masing-masing daerah. Misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Keputusan Kepala Pemerintah Daerah masing-masing daerah, namun cukup dibuat Peraturan Bersama yang dibuat oleh kedua daerah kemudian dimintakan persetujuan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini melalui Menteri Dalam Negeri.

Diketahuinya batas wilayah laut maka akan diketahui batas wilayah pesisir ke dua daerah. Dilihat dari hasil penegasan batas wilayah di darat antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal bahwa untuk wilayah pesisir kecamatan di Kota Semarang yaitu Kecamatan Tugu. Sedangkan wilayah pesisir kecamatan di Kabupaten Kendal yaitu Kecamatan Kaliwungu.

Kedua, konsep pemecahan masalah batas wilayah laut antara ke dua daerah yang sifatnya futuristik artinya memecahkan masalah yang mungkin timbul pada saat mendatang. Konsep pemecahan masalah tidak bisa dilepaskan dari dua hal yakni teknis penegasan dan bentuk

pengaturan batas wilayah laut. Pemecahan masalah batas wilayah laut dari segi teknis penegasan yang dapat diselesaikan oleh kedua Tim Teknis Penegasan Batas Daerah dengan fasilitas Tim Teknis Penegasan Batas Daerah Provinsi.

Pemecahan masalah batas wilayah laut dari segi bentuk pengaturan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu;

- a. Pemecahan masalah sebelum pengaturan batas wilayah laut ditegaskan yang dapat diselesaikan dengan membuat *MoU* (*Memorandum of Understanding*) oleh ke dua daerah.
- b. Pemecahan masalah ketika pengaturan batas wilayah laut ditegaskan yang mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2006.
- c. Pemecahan masalah setelah pengaturan batas wilayah laut ditegaskan, dengan melakukan penegasan kembali batas wilayah laut ke dua daerah.

Ketiga, secara langsung antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal sudah terikat dalam kerjasama termasuk di bidang penataan ruang. Keputusan Bersama tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur pada hakikatnya hanya perjanjian pendahuluan atau lebih dikenal dengan nama *Memorandum of Understanding (MoU)*. Keputusan Bersama tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur dapat dijadikan landasan yuridis dalam melakukan kerjasama antara Kota Semarang



dengan Kabupaten Kendal. Keputusan Bersama ini pada hakikatnya merupakan perjanjian pendahuluan. Untuk perjanjian berikutnya sebagai implementasi Keputusan Bersama, pemerintah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat melaksanakan kerjasama penataan ruang wilayah pesisir perbatasan ke dua daerah. Perjanjian sebagai implementasi Keputusan Bersama dibuat dan disepakati bersama oleh masing-masing Kepala Daerah, dimintakan persetujuan DPRD masing-masing dan dan diketahui oleh Gubernur Jawa Tengah. Perjanjian tersebut memuat teknis pelaksanaan penataan ruang wilayah pesisir antara ke dua daerah.

Salah satu bentuk implementasi yang yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah, baik itu Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal, adalah melalui penerapan *regional management*. *Regional management* merupakan merupakan salah satu bentuk instrumen pembangunan yang bersifat formal non-keruangan atau dengan kata lain yang berkaitan dengan kebijakan. Bentuk kerja sama tersebut dapat tertuang dalam isi kebijakan yang dibuat oleh masing-masing daerah yang saling berkaitan, sehingga akan mungkin terciptanya suatu koordinasi diantara daerah satu dengan yang lainnya.

Untuk menjembatani kerja para Pemimpin Daerah yang bekerjasama dan seluruh jajaran instansi dinas terkait dalam penataan ruang wilayah pesisir Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal

dibutuhkan lembaga. Lembaga tersebut memiliki tugas serta fungsi yang tepat dalam perencanaan dan pelaksanaan. Lembaga yang dibentuk untuk menerima mandat ini perlu dikukuhkan melalui Keputusan Bersama Daerah, terdapat diskripsi tugas dan tanggungjawab yang jelas, rinci dari para pihak yang berkepentingan (Pemimpin Daerah dan seluruh jajaran instansi maupun dinas terkait).

Untuk menyelesaikan perselisihan pelaksanaan kerjasama penataan ruang wilayah pesisir perbatasan antara Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal, ke dua daerah dapat membuat kesepakatan penyelesaian perselisihan. Kesepakatan penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan dan ditarik oleh pemerintah Provinsi. Keputusan Bersama tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur memberikan cara penyelesaian perselisihan. Perselisihan yang timbul diselesaikan sebagai berikut:

- a. Secara musyawarah oleh Sekretariat Bersama Kerjasama antar Daerah Kedungsepur.
- b. Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka penyelesaiannya difasilitasi Gubernur Jawa Tengah.
- c. Apabila dalam penyelesaian salah satu pihak tidak menerima keputusan tersebut, dapat mengajukan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri.

#### **4.2. Saran**

1. Tim Penegasan Batas Daerah Kota Semarang maupun Kabupaten Kendal yang ada, bahwa tim tersebut hanya dibuat untuk melaksanakan penegasan batas wilayah darat antara daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal. Kedua surat keputusan dari kedua Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah belum mencerminkan pelaksanaan tugas penegasan batas wilayah di laut. Oleh karena itu dalam penegasan batas wilayah di laut perlunya merevisi Keputusan kedua Kepala Daerah baik Daerah Kota Semarang maupun Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah.
2. Penegasan Batas wilayah di laut antara daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal merupakan hal yang cukup penting. Karena dengan diketahuinya batas wilayah di laut, maka akan jelas pula batas wilayah pesisir ke dua daerah. Untuk itu daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal dapat menegaskan batas wilayah laut dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
3. Diketahuinya batas wilayah pesisir antar ke dua daerah, dijadikan acuan bagi ke dua pemerintah untuk merencanakan penataan ruang

wilayah pesisir yang berbatasan. Bentuk implementasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah, baik itu Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal, adalah melalui penerapan kerja sama antar daerah (*regional management*) yang meliputi landasan yuridis, pembentukan lembaga dan penyelesaian perselisihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nurmadi, 2006. *Manajemen Perkotaan, Aktor, Organisasi, Pengelolaan Daerah Perkotaan dan Metropolitan di Indonesia*. Yogyakarta: Fisip Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Adi Sumardiman, 1992. *Seri Hukum Internasional Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya Buku I*. Jakarta: PT. Anem Kosong Anem.
- Akhmad Fauzi dan Suzy Anna, 2005. *Pemodelan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan untuk Analisis Kebijakan*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Akhmad Fauzi, 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu Sintesis dan Gagasan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anak Suryo, 2007. *Tata Cara Mengurus Ijin Usaha*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Ateng Syafrudin, 2006. *Sekilas tentang Pemerintahan Daerah di Jepang*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Ateng Syarifudin, 2006. *Kapita Selekta Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Citra Media.
- Bagir Manan, 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bruce Mitchell, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, 2000. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Burhan Ashshofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyo Saporinto, 2007. *Pendayagunaan Ekosistem Mangrove*. Semarang: Effhar Offset Semarang.

- Elfrida Gultom, 2007. *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Etty R. Agoes, 2000. *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita di Laut*, Jakarta: DKP.
- FX. Adji Samekto, 2005. *Kapitalisme, Modernisasi & Kerusakan Lingkungan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Gempur Santoso, 2006. *Analisis Ergonomis Kelayakan Pabrik*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisir.
- H.R. Otje Salman S, Anton F. Susanto, 2005. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hans-Dieter Evers & Rudiger Korff. 2002. *Urbanisme di Asia Tenggara Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-ruang Sosial*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Hasim Djalal, 1979. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Jakarta : BPHN.
- Henny Lilywati dan Budiman, 2007. *Data Spasial Pilihan Cerdas Bangsa yang Bijak*. Jakarta: Buku Ilmiah Populer.
- Henry S. Siswesoediro, 2007. *Mengurus Surat-Surat Perizinan*. Jakarta: Visimedia.
- Herman Hermit, 2008, *Pembahasan Undang Undang Penataan Ruang (U.U. No. 26 Tahun 2007)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ida Kurnia, 2007. *Kedudukan Negara-Negara pada Zona Ekonomi Eksklusif* . Jakarta: Diadit Media.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Rezim Hukum Landas Kontinen*. Jakarta: Diadit Media.
- I Made Andi Asrana, 2007. *Batas Maritim Antar Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jacob Rais, 2003. *Pedoman Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999*, (USAID – Indonesia Coastal Resources Management Project Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003).

- \_\_\_\_\_, 2003. *Studi Kasus Batas Wilayah Laut antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka-Belitung* (USAID – Indonesia Coastal Resources Management Project Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003).
- Jana Marie Mehrrens & Benjamin Abdurrahman, 2007. *Regional Marketing Buku Panduan untuk Menarik Investasi Melalui Aliansi Pembangunan Daerah*. (Jakarta: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V & GTZ-RED.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa.
- J.G. Starke. 2003. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh (2)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- J.G. Starke. 2004. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh (1)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Komar Kantaatmadja. 1982. *Bunga Rampai Hukum Lingkungan Laut Internasional*. Bandung : Alumni.
- Kusnadi, 2007. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta : LKiS.
- L. Tri Setyawanta R, 2005. *Masalah-Masalah Hukum di Wilayah Pesisir dan Laut suatu Kompilasi*, Semarang, Pusat Studi Hukum Laut Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Buku Ajar Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional*. Semarang : Pusat Studi Hukum Laut (Study Center for the Law of the Sea/SYCLOS)
- \_\_\_\_\_, 2006. *Penelitian Ilmiah Kelautan Marine Scientific Research di Zona Ekonomi Eksklusif*. Semarang : Gradika Bhakti Litiga Press.
- \_\_\_\_\_, Re-orientasi Konsep “Coastal Region Eco-Development” sebagai Pola Ilmiah Pokok Undip dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. *Majalah Masalah-masalah Hukum*, Vol. XXXIII, No. 2, April-Juni 2004
- Maria S.W. Sumardjono, 2006. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.

- M. Daud Silalahi, 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- M. Manullang, 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indah.
- M. Suparmoko. 2006. *Panduan dan Analisis Valuasi Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan (Konsep, Metode Perhitungan, dan Aplikasi)*. Yogyakarta : BPFE.
- Moh. Mahfud MD, 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES.
- MS. Wibisono. 2005. *Pengantar Ilmu Kelautan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Mulyanto, 2007. *Pengembangan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyono Sadohutomo, 2008. *Manajemen Kota dan Wilayah, Realita & Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustafa Abubakar, 2006. *Menata Pulau-Pulau Kecil Perbatasan Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan dan Sebatik*. Jakarta : Kompas.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Paulus Hariyono, 2007. *Sosiologi Kota untuk Arsitek*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rebecca M.M. Wallace, 1993. *Hukum Internasional*. diterjemahkan oleh Bambang Arumanadi, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Robinson Tarigan, 2005. *Perencanaan Pengembangan Wilayah*, Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara.
- Rokhmin Dahuri dkk, 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang.



- Salim HS dkk., 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetrisno Hadi, 1980. *Metodology Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Soetomo, 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solichin Abdul Wahab, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Subandono Diposaptono, 2007. *Mengantisipasi Bencana*. Bogor: Buku Ilmiah Populer.
- Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Tim Penyusun Pedoman Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K, DKP, 2007. *Pedoman Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Laut*. Jakarta: DKP.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Laut*. Jakarta: DKP.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Pedoman Penyusunan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir*. Jakarta: DKP.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*. Jakarta: DKP.
- Tridoyo Kusumastanto, 2003. *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usep Ranawijaya dkk., 2008. *Ancaman Terhadap Jati Diri Bangsa Lewat Politik "Adu Domba dan Kuasai" dari Nekolim*. Jakarta: Yayasan Kepada Bangsa.
- Wiyana, A., G.H. Perdanahardja, J.M. Patlis (eds.), 2005. *Materi Acuan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Seri Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta: Bapenas, DKP dan Depkum dan HAM bekerja sama dengan Coastal Resources Management Project (USAID).

- \_\_\_\_\_, 2005. *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 Pengalaman Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Editor : Budhiy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, Gita Chandrika Napitupulu, Wahyu Mulyana. Jakarta : URDI-YSS Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- \_\_\_\_\_, 2007. *Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil di Indonesia Robert M. Delinom (Ed)*. Jakarta : LIPI Press.

### **Makalah, Jurnal dan Artikel**

- Arif Havas Oegroseno, *Doktrin Uti Possidetis Juris dan Status Hukum Propinsi Papua*, Analisis CSIS “Koreksi Terhadap Strategi Pembangunan di Papua” Vol. 35, No. 4, Desember 2006.
- Arifin Rudyanto, *Kerangka Kerjasama dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, Sosialisasi Nasional Program MFCDP*, 22 September 2004.
- Dewayany Sutrisno, John Pariwono, Jacob Rais, dan Tridoyo Kusumastanto, *Dampak Kenaikan Muka Laut Pada Pengelolaan Delta: Studi Kasus Penggunaan Lahan Tambak di Pulau Muaraulu Delta Mahakam*, Jurnal Ilmiah Geomatika Vol.11 No.1, September 2005.
- Dirjen Penataan Ruang Departmen Permukiman dan Prarana Wilayah. *Dukungan Sektoral dalam Pengembangan Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Investasi dan Pembangunan Daerah di Sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) Selat Makasar*, Balik Papan 25-26 Juni 2002.
- Dirjen Pesisir dan Lautan, Dirjen Kelautan, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil, “Kebijakan Pengelolaan Jasa Kelautan dan Kemaritiman”, Jakarta : 2007.
- Dishidros TNI AL, 2003. *Menyikapi dan Menginventarisir Pulau-Pulau Kecil di Perbatasan dengan Negara Tetangga*. Rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR.

Etty Roesmaryati Agoes, Orasi ilmiahnya berjudul "Sepuluh Tahun Berlakunya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Unclos) 1982: Kewajiban Negara Peserta dan Implementasinya oleh Indonesia" (Fakultas Hukum Unpad, 18 September 2004).

Indah Susilowati, "Keselarasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Bagi Manusia dan Lingkungan". Pidato Pengukungan Guru Besar dalam Fakultas Ekonomi Undip, Semarang, 8 Maret 2006.

Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen, Vol. IV, No. 21, Januari-Februari 2008

Kausar AS, Investasi di Pulau-Pulau Kecil dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Ceramah Dirjen Otonomi Daerah pada Acara Seminar Nasional dengan Topik: "Investasi Asing dan Kedaulatan Bangsa di Pulau-Pulau Kecil" diselenggarakan Komunitas Wartawan Kelautan dan Perikanan (Komunikan), Jakarta, 17 April 2006

M. Daud Silalahi, Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Pengelolaan (Termasuk Perlindungan) Sumber Daya Alam yang Berbasis Pembangunan Sosial dan Ekonomi. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Paulus Hadisuprpto, Ilmu Hukum dan Pendekatannya, Diskusi Panel "Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum" dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Undip, Semarang, 17 Januari 2006.

Rizki Addiwiansyah, "Pengaturan Reklamasi Pantai Marina Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 di Kota Semarang", *Laporan Kegiatan PHK A2 Tahun 2005*, (Semarang; Fakultas Hukum Undip, 2005).

Ruslan Ginting, Bambang Untoro dan Krisna Indriawan, 2003. Laporan Sementara ( Januari – Juni 2003 ) *Kajian Satelit Masa Depan – ALOS*. Proyek Penelitian Pemanfaatan Dan Pengembangan Data Penginderaan Jauh Tahun 2003. Bidang Pengembangan Teknologi Penginderaan Jauh Pusat Pengembangan Pemanfaatan Dan Teknologi Penginderaan Jauh Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lapan

Sambutan dan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam rangka Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan Dan Kemaritiman, Jakarta : 19 Juni 2007.

Sarwoko Mangkoedihardjo, Seminar Nasional Inovasi Praktek Penataan Ruang dalam Desentralisasi Pembangunan. ITS Surabaya, 22 September 2005.

Sobar Sutsina, Kemungkinan Luas Laut Sebagai Bagian dari Luas Wilayah dalam Perhitungan DAU, Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal, Workshop Nasional Penguatan Pelaksanaan kebijakan Desentralisasi Fiskal, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal, DepKeu RI, Jakarta, 5-6 April 2006.

Tatag Wiranto, Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Kerangka Pembangunan Perekonomian Daerah, Sosialisasi Nasional Program MFCDP, 22 September 2004

Tim Teknis PPBD, 2006. Laporan Hasil Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Batas Daerah Penegasan dan Penetapan Batas Daerah Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dengan Kota Semarang. "Laporan Akhir". (Semarang, 30 Desember 2006).

Zudan Arif Fakrulloh, Konstruksi dan Implementasi Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam rangka Seminar Nasional di Semarang, 5 Juli 2007.

\_\_\_\_\_, Invenstasi di Pulau-Pulau Kecil dan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Ceramah Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada acara Seminar Nasional dengan topik : Investasi Asing dan Kedaulatan Bangsa di Pulau-Pulau Kecil. Komunitas Wartawan kelautan dan Perikanan (Komunikan), Jakarta, 17 April 2006.

\_\_\_\_\_, Seminar Arah Pembangunan Hukum menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, Jakarta : 29-31 Mei 2006, BPHN.

I Made Andi Arsana, [Arti Penting Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah](http://geo-boundaries.blogspot.com/2006/11/arti-penting-penegasan-batas-wilayah.html). <http://geo-boundaries.blogspot.com/2006/11/arti-penting-penegasan-batas-wilayah.html>. (2 Nopember 2006)

\_\_\_\_\_, *Zona Pesisir dan Zona Laut, Mofologi Dasar Laut*. Pustekom, 2005, [http://www.edukasi.net/mol/mo\\_full.php?moid=99&fname=geox0804.htm](http://www.edukasi.net/mol/mo_full.php?moid=99&fname=geox0804.htm). (4 Pebruari 2008)

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

*United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982.*

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peta

Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Pangkal Kepulauan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep. 10/Men/2002 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu